



GARUDA PANCASILA

Sejarah Penciptaan Lambang Negara

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

GARUDA PANCASILA

Sejarah Penciptaan Lambang Negara

Aris Heru Utomo, dkk.

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

2023

Garuda Pancasila
Sejarah Penciptaan Lambang Negara

Periset:

Aris Heru Utomo
Nanang Rahmat Hidayat
Pramukti Adhi Bhakti

Penulis:

Aris Heru Utomo
Nanang Rahmat Hidayat
Pramukti Adhi Bhakti

Editor:

Pramukti Adhi Bhakti

Desain Sampul:

Bangun Pratomo

Tata Letak:

Bima Iswarta

ISBN:

xxiv + 144 halaman; 14,8 x 21 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Jl. Veteran 3 No. 2, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat, 10110

Cetakan I, September 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

HAL IHWAL PENCIPTAAN LAMBANG NEGARA INDONESIA

Pengantar

Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Buku karya Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PMPIP), Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang berjudul *"Garuda Pancasila: Sejarah Penciptaan Lambang Negara"* ini sangat menarik karena berisi kebaruan (*novelty*) yang dapat memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai makna dan hal ihwal penciptaan lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila.

Pemahaman mengenai makna dan sejarah penciptaan lambang negara Garuda Pancasila sangat diperlukan untuk memperkuat wawasan Pancasila dan kebangsaan masyarakat Indonesia. Karena meskipun sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XV tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pada pasal 36A, dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,

tetapi kenyataannya masih banyak anggota masyarakat Indonesia yang belum memiliki wawasan yang memadai tentang makna dan sejarah penciptaan lambang Negara Garuda Pancasila tersebut.

Di tengah keterbatasan referensi mengenai makna dan sejarah penciptaan lambang negara Garuda Pancasila, kehadiran buku ini sangat tepat dan penting sebagai salah satu materi pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia dan salah satu ikhtiar untuk membanjiri ruang-ruang publik dengan informasi mengenai wawasan Pancasila.

Melalui buku ini, diketahui bahwa gagasan untuk membuat lambang negara untuk pertama kalinya, sesungguhnya sudah disampaikan ketika sidang kedua Badan Perintis Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 13 Juli 1945 oleh salah seorang anggota BPUPK yang bernama Parada Harahap. Meski belum menyebutkan bentuknya, tetapi Parada Harahap mengusulkan mengenai perlunya perancangan lambang negara karena lambang negara merupakan cerminan identitas bangsa dan negara.

Usulan Parada Harahap tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Indonesia Raya melalui Peneetapan Presiden Nomor 28 Tahun 1948 tanggal 16 November 1948. Tugas panitia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro dan Sekretaris Umum Mohammad Yamin serta 21 orang anggota adalah menetapkan undang-undang dan peraturan yang salah satunya adalah berkaitan dengan bentuk dan cara pemakaian lambang negara Republik Indonesia.

Panitia ini kemudian melakukan penelitian antara lain mengenai arti lambang-lambang dan menemukan adanya simbol-simbol burung garuda di berbagai kitab dan candi di Indonesia, yang kemudian dibuatkan sketsanya. Hasil temuan ini yang kemudian menjadi dasar perancangan selanjutnya

oleh panitia berikutnya yang dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat/RIS (1949-1950).

Pada masa RIS tersebut, Presiden Sukarno membentuk Panitia Perencana Lambang Negara pada 10 Januari 1950 yang diketuai oleh Mohammad Yamin dengan anggota antara lain Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, Raden Mas Ng. Poerbatjaraka. Panitia ini bertanggung jawab dan dikoordinatori oleh Sultan Hamid II selaku Menteri Negara Zonder Portofolio. Secara khusus, panitia ini ditugasi untuk menyeleksi usulan-usulan rancangan lambang negara yang akan dipilih dan diminta menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin setelah rancangan yang dipilih diperiksa oleh ahli heraldik (ahli lambang dan simbologi).

Dari pembentukan Panitia Indonesia Raya dan Panitia Perencana Lambang Negara pada kurun waktu 1948-1950, diketahui pula bahwa sejak awal kemerdekaan para tokoh bangsa Indonesia telah menyadari mengenai pentingnya lambang negara sebagai perwujudan identitas bangsa dan negara. Untuk itu, guna mendapatkan masukan mengenai makna dan simbol negara yang akan dihasilkan, maka dalam proses penciptaannya, sejak awal telah melibatkan banyak orang, baik melalui sayembara ataupun kepanitiaan yang dibentuk pemerintah. Penciptaan lambang negara tidak dilakukan oleh perorangan.

Dalam perkembangannya, agar tidak disalahgunakan, lambang negara Garuda Pancasila pun diatur dalam UUD 1945 Bab XV tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pada pasal 36A, yang menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

Selanjutnya melalui UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara serta Lagu Kebangsaan, pada pasal 46 disebutkan bahwa Lambang NKRI berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Selanjutnya pada pasal 47 s.d 50 disebutkan ciri-ciri khusus dari Garuda Pancasila yang digunakan sebagai lambang Negara seperti memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Dijelaskan pula mengenai warna-warna pokok yang digunakan seperti merah, putih, kuning emas dan hitam.

Tentu saja masih banyak hal yang dapat digali dari makna dan sejarah penciptaan lambang negara Garuda Pancasila, namun sebagai pengantar saya cukupkan. Selanjutnya dengan mengucapkan *“Bismillahirrahmanirrahim”* saya turut menghantarkan kehadiran buku ini ke ruang publik.

23 Januari 2023

LAMBANG GARUDA PANCASILA DAN PENGUNAANNYA

Oleh

Aris Heru Utomo, S.H, M.B.A, M.Si

Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Badang Pembinaan Ideologi Pancasila

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya, buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PMPIP), Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berjudul *"Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara"* dapat terbit dan hadir di hadapan pembaca. Penulisan dan penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan referensi mengenai makna dan sejarah penciptaan lambang negara Garuda Pancasila.

Sebagaimana dipahami bersama, sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memiliki lambang negara yang secara formal diperuntukkan sebagai (1) sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) manifestasi kebudayaan yang

berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara formal, penggunaan lambang negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XV tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pada pasal 36A yaitu lambang negara adalah Garuda Pancasila. Adapun desain lambang Negara dan penggunaannya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, lambang negara Indonesia berbentuk burung garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik (lambang atau simbol), perisai yang digantung dengan rantai pada leher garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh garuda.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Nanang Rahmat Hidayat beserta timnya dan dituliskan dalam buku *"Mencari Telur Garuda"* (E. Boekoe, 2021) desain lambang negara Garuda Pancasila di atas merupakan hasil kerja Panitia Perencana Lambang Negara yang dibentuk Presiden Sukarno pada 10 Januari 1950. Panitia tersebut diketuai oleh Mohammad Yamin dengan anggota antara lain Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, Raden Mas Ng. Poerbatjaraka. Panitia ini bertanggung jawab dan dikoordinatori oleh Sultan Hamid II selaku Menteri Negara Zonder Portofolio.

Secara khusus panitia ini ditugasi untuk menyeleksi usulan-usulan rancangan lambang negara yang akan dipilih dan diminta menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin setelah rancangan yang dipilih diperiksa oleh ahli heraldik (ahli lambang dan simbologi). Hasilnya, desain resmi perdana

lambang Garuda Pancasila ditampilkan dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950.

Ketika pertama kali melihat lambang Garuda Pancasila, pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa burung garuda yang dipilih sebagai lambang negara Indonesia? Benarkah burung garuda merupakan sosok hewan yang nyata dalam kehidupan atau sekedar sosok hewan imajinatif dalam dongeng?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tersebut di atas, melalui buku *"Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara"*, Direktorat PMPIP BPIP memberikan gambaran mengenal proses penciptaan lambang negara Garuda Pancasila mulai dari pro dan kontra penggunaannya seperti dalam kasus seragam tim nasional sepakbola Indonesia, cerita tentang garuda di berbagai tempat di Indonesia dan penggunaannya sebagai lambang kerajaan di Indonesia, tokoh-tokoh yang berperan dalam penciptaan lambang negara Garuda Pancasila, hingga penjelasan mengenai ukuran objek lambang negara Garuda Pancasila

Melalui buku ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang makna dan sejarah penciptaan lambang negara Garuda Pancasila yang dilakukan secara gotong royong. Dengan memahami makna dan sejarah penciptaan lambang negara Garuda Pancasila dan ketentuan yang melingkupinya, diharapkan masyarakat dapat mempraktikkan penggunaan lambang negara secara benar, dan tidak terjadi lagi penyalahgunaan simbolik lambang negara untuk tujuan di luar aktivitas formal kenegaraan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Kepala BPIP, Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D yang mendukung penulisan dan penerbitan buku ini, melakukan koreksi dan memberikan kata pengantarnya.

Terima kasih pula kepada kedua periset naskah buku ini, Sdr. Nanang Rahmat Hidayat dan Sdr. Pramukti Adhi Bhakti yang dengan tekun telah menelusuri jejak-jejak penciptaan lambang negara Garuda Pancasila melalui berbagai arsip dan pemberitaan yang terserak di berbagai tempat.

Terakhir, ucapan terima kasih disampaikan kepada staf Direktorat PMPIP yang dikoordinasikan oleh Sdr. Bonaventura Salman yang telah memberikan dukungan administrasi sehingga dapat terlaksananya kegiatan penyusunan materi buku ini.

Jakarta, 23 Januari 2023

HASIL KERJASAMA DAN DARAH DAGING RAKYAT

PROLOG BUKU SEJARAH LAMBANG NEGARA

Oleh Prof. Dr. Asvi Warman Adam

Buku ini secara komprehensif menjelaskan hal-hal terdapatnya lambang negara Indonesia. Tidak benar lambang negara dibuat oleh orang perorangan, namun ini hasil karya bersama. Siapa saja yang terlibat atau berjasa dalam penciptaan lambang negara? Kapan lambang negara ini dibuat? Prosesnya dimulai sejak Indonesia belum merdeka, diusulkan Parada Harahap dalam sidang BPUPK tanggal 13 Juli 1945 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah no. 66/1951 pada tanggal 17 Oktober 1951.

Lambang negara yang dipilih bukanlah muncul tiba-tiba. Memang ada berbagai negara memakai burung sebagai lambang negara, untuk negara Indonesia tentu perlu kekhasan tertentu. Dalam mitologi Nusantara, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Burung Garuda juga terdapat beberapa candi seperti candi Dieng dan Prambanan. Dalam kitab Adiparwa yang merupakan buku pertama Mahabharata ter-

dapat mitos Garuda, yang ternyata menyelamatkan sang ibu (dari perbudakan). Burung Garuda juga digunakan sebagai lambang kerajaan di Nusantara seperti di Jawa (Kahuripan, Kesultanan Yogyakarta), Sumatera (Samudera Pasai), Kalimantan (Sambas, Sintang), Maluku (Ternate), Nusa Tenggara Barat (Bima)

HASIL KERJA DUA PANITIA

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1948 pemerintah membentuk Panitia Indonesia Raya dengan Penetapan Presiden no 28/1948 tanggal 16 November 1948, diketuai Ki Hajar Dewantara, dengan 21 anggota, antara lain M. Yamin, Poerbatjaraka dan Basuki Resobowo. Panitia ditugasi antara lain mempelajari sejarah lambang-lambang dalam peradaban Indonesia dan menemukan burung Garuda dalam berbagai kitab dan candi. Basuki Resobowo diminta Ki Hajar Dewantara untuk membuat sketsa lambang tersebut dari buku dan candi. Panitia ini juga mengadakan sayembara yang menghasilkan 15 lukisan lambang, namun tidak satu pun yang memenuhi syarat sesuai delapan kriteria yang diajukan panitia.

Setelah terbentuk RIS, maka Presiden Sukarno mengangkat Sultan Hamid II dari Pontianak sebagai Menteri Negara yang bertugas antara lain mempersiapkan lambang negara. Maka dibentuklah Panitia Perencana Lambang Negara dengan Peraturan Pemerintah no. 66/1951 tertanggal 17 Oktober 1951. Tiga orang anggotanya berasal dari Panitia Indonesia Raya. Susunannya adalah M. Yamin sebagai ketua, dengan anggota Ki Hajar Dewantara, Poerbatjaraka, M. Natsir dan M.A.Pelaupessy. Dalam proses ini, ada dua usulan yang masuk, lambang banteng dari M.Yamin dan lambang burung Garuda dari Sultan Hamid II. Yang dipilih pemerintah adalah burung Garuda. Presiden Sukarno menyarankan agar sila-sila Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara tersebut. Menurut keterangan Sultan

Hamid II, visualisasi sila pertama (bintang) diusulkan oleh M. Natsir, sila kedua (rantai) oleh Sultan Hamid II, sila ketiga (pohon Astana) oleh Purbatjaraka, sila keempat (banteng) oleh M. Yamin dan sila kelima (padi-kapas) oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam pembicaraan antara Sukarno, Hatta dan Sultan Hamid II, pita merah putih diganti dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Gambarnya secara teknis diperbaiki oleh pakar lambang Dirk Rühl, Jr. dan kemudian dilukis kembali oleh Dullah.

MENGHILANGKAN KONTROVERSI PEMAKAIAN LAMBANG NEGARA

Lambang Garuda Pancasila yang ada di dada kaos pemain dan bahkan para pendukung tim nasional PSSI yang berlaga di ajang piala AFF menambah spirit nasionalisme. Itu yang terjadi ketika kesebelasan Indonesia berhadapan dengan Malaysia di Jakarta 29 Desember 2010. Beberapa waktu sebelumnya seorang pengacara menuntut ke pengadilan pemakaian lambang negara Garuda Pancasila pada kaos pemain PSSI. Alasannya karena ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Padahal lambang tersebut sudah digunakan oleh PSSI pada tahun 1950-an seperti terlihat pada sebuah foto yang ada dalam buku memoar Maulwi Saetan, bekas kiper ketika Indonesia berlaga di Olimpiade Melbourne tahun 1956.

David Tobing mengajukan gugatan *citizen lawsuit* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga, PSSI dan perusahaan Nikki yang membuat kaos untuk tim nasional. Saya menjadi saksi ahli yang membela pemakaian kaos berlambang Garuda oleh PSSI. Hakim menolak gugatan tersebut namun tidak sampai menyentuh substansi perkara. Hakim menilai *legal standing* David Tobing tidak memenuhi syarat.

Bulan Juli 2011 saya kembali menjadi saksi ahli di pengadilan negeri Purwakarta, Jawa Barat. Pasalnya dua anggota Serikat Buruh Metal diadili karena menggunakan stempel lambang Garuda dalam surat undangan pemilihan pengurus. Saya memang tidak menyarankan logo Garuda Pancasila dipakai sebagai stempel panitia, namun saya menilai kedua buruh tersebut tidak bertujuan melecehkan lambang negara. Akhirnya keduanya dihukum percobaan selama tiga bulan.

Undang-Undang no 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, mencantumkan pasal-pasal tentang penggunaan resmi lambang negara Garuda Pancasila seperti di dalam kantor pemerintah, kop surat departemen, paspor, materai, dll. Namun pada pasal 57 disebutkan "dilarang menggunakan lambang negara selain keperluan yang diatur Undang-Undang". Pasal 69 menyebutkan "ketentuan ini mengatur bukan saja lambang yang sama dengan lambang negara tetapi juga yang menyerupai lambang negara". Jadi tidak boleh lambang sebuah partai politik mirip garuda Pancasila.

Pada Januari 2012 sejumlah warga memohon pengujian UU no 24 tahun 2009 pasal 57 huruf c dan huruf d yang mengatur larangan penggunaan lambang negara. Di antara para pemohon terdapat Erwin Agustian dan Eko Santoso, dua orang pemuda yang pernah diadili karena menggunakan lambang Garuda untuk stempel organisasi di Purwakarta. Saya juga diminta menjadi ahli dalam perkara di MK tersebut.

Keputusan MK adalah "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,".

Di dalam UU no 24/2009 memang diatur dalam acara resmi apa saja, lambang negara itu boleh digunakan. Namun pasal 57 d berbunyi “menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”, sementara pasal 69 c menetapkan sanksi hukumannya. MK berpendapat larangan penggunaan lambang negara dalam Pasal 57 huruf d tidak tepat karena tidak memuat rumusan yang jelas. Apalagi, larangan itu diikuti dengan ancaman pidana. Menurut Mahkamah, ancaman pidana seharusnya memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex certa*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*). Selain itu, MK menyatakan pembatasan penggunaan lambang negara oleh masyarakat adalah bentuk pengekangan ekspresi yang dapat mengurangi rasa memiliki dan mengurangi kadar nasionalisme. Terlebih, lambang Garuda Pancasila, mutlak menjadi milik bersama seluruh masyarakat.

Secara resmi, pemakaian lambang negara Garuda Pancasila sudah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah tahun 1951, 1958 dan kemudian Undang-Undang no 24/2009 dan hasil keputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi. Namun dalam kehidupan bermasyarakat biarkanlah rakyat memakai kaos berlambang Garuda Pancasila, demikian pula sedikit berkreasi asal tidak berlebihan dalam membuat patung burung garuda Pancasila yang terdapat di mana-mana di seluruh Indonesia. Seperti dikatakan Bung Karno dalam pidato tahun 1958, “*lambang ini telah menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kecintaannya kepada republik*”.

Prof. Dr. Asvi Warman Adam,
 Profesor Riset bidang sejarah sosial politik BRIN.

DAFTAR ISI

Pengantar

Hal Ihwal Penciptaan Lambang Negara Indonesia ~ iii

Lambang Garuda Pancasila dan Penggunaannya ~ vii

Prolog

Hasil Kerjasama dan Darah Daging Rakyat ~ xi

Daftar Gambar ~ xxi

1

Pendahuluan ~ 1

2

Garuda di Berbagai Tempat dan Kisah Nusantara ~ 11

Garuda dalam Cerita-Cerita di Indonesia ~ 12

Kisah Garuda dalam Kitab Adiparwa ~ 14

3

Garuda di Beberapa Lambang Kerajaan-Kerajaan Nusantara ~ 19

Kesultanan Ternate ~ 20

Kesultanan Bima ~ 21

Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ~ 23

Kerajaan Kahuripan ~ 26

Kesultanan Sambas ~ 28

Kesultaan Samudera Pasai ~ 30

Kesultanan Sintang ~ 32

4

Sejarah Penciptaan Lambang Negara

Garuda Pancasila ~35

Masa Revolusi (1945) ~ 36

Masa Republik Indonesia (1945-1949) ~ 37

Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950) ~ 42

Masa Republik Indonesia Era Orde Lama ~ 72

Masa Republik Indonesia Era Reformasi ~ 77

5

Tokoh-Tokoh dan Peranannya dalam

Perancangan Lambang Negara ~ 83

Parada Harahap ~ 84

Sukarno ~ 85

Basuki Resobowo ~87

Sultan Hamid II ~ 89

Mohammad Yamin ~ 90

Ki Hajar Dewantara ~ 92

Mohammad Natsir ~ 94

Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka ~ 95

Melkias Agustinus Pellaupessy ~ 97

Dirk Rühl, Jr. ~ 98

Dullah ~ 100

Penutup ~ 103

Lampiran ~ 107

Daftar Pustaka ~137

Profil Periset ~143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Lambang Indonesia Moeda	~ 5
Gambar 2.1.	Relief garuda di Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah	~ 13
Gambar 2.2.	Silsilah keluarga Garuda	~ 18
Gambar 3.1.	Lambang Kesultanan Ternate berbentuk burung Goheba	~ 20
Gambar 3.2.	Lambang Kesultanan Bima	~ 22
Gambar 3.3.	Lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	~ 24
Gambar 3.4.	Arca Garudamukha koleksi Museum Nasional	~ 26
Gambar 3.5.	Lambang Kota Kediri	~ 28
Gambar 3.6.	Lambang Kesultanan Sambas	~ 29
Gambar 3.7.	Lambang Kesultanan Samudera Pasai	~ 31
Gambar 3.8.	Hiasan tiang penyangga gong yang dipinjam Sultan Hamid II sebagai model rancangan lambang negara	~ 32
Gambar 3.9.	Lambang Kesultanan Sintang	~ 33
Gambar 4.1.	Sketsa simbol-simbol garuda di berbagai candi yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada Sultan Hamid II pada proses bersama Panitia Perencana Lambang Negara	~ 38
Gambar 4.2.	Lima belas rancangan lambang negara dari seniman	~ 39
Gambar 4.3.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Panitia Perencana Lambang Negara	~ 46
Gambar 4.4.	Rancangan lambang negara yang diusulkan	~ 47

Gambar 4.5. Sketsa rancangan lambang negara Sultan Hamid II	~ 49
Gambar 4.6. Usulan 1	~ 52
Gambar 4.7. Usulan 2	~ 52
Gambar 4.8. Usulan 3	~ 52
Gambar 4.9. Usulan 4. Sila Ketuhanan YME belum hadir dalam perisai Pancasila	~ 52
Gambar 4.10. Rancangan lambang negara dengan bentuk tubuh antropomorfis	~ 53
Gambar 4.11. Rancangan Lambang Negara dengan bentuk tubuh antropomorfis yang sudah diubah pitanya	~ 53
Gambar 4.12. Lambang Kerajaan Samudera Pasai	~ 54
Gambar 4.13. Lambang-lambang negara Syiria, Polandia, dan Mesir	~ 55
Gambar 4.14. Perubahan jumlah bulu ekor pada rancangan lambang negara dari tujuh helai menjadi delapan helai	~ 56
Gambar 4.15. Rancangan Lambang Negara dengan bentuk kepala gundul dan arah cakar terbalik	~ 59
Gambar 4.16. Hotel Des Indes, Batavia [Hotel Duta Indonesia, Jakarta].	~ 60
Gambar 4.17. Keputusan Presiden RIS No. 72 Tahun 1950 tentang pembubaran Panitia Perencana Lambang Negara	~ 62
Gambar 4.18. Presiden Sukarno duduk di ruang sidang gedung parlemen Istana Merdeka Pejambon. Terlihat lambang negara yang masih terlihat "gundul" dan cakarnya terbalik	~ 63
Gambar 4.19. Majalah Mingguan Bergambar Kementerian Penerangan RIS Lukisan Indonesia	~ 65
Gambar 4.20. Terlihat pada gambar cakar garuda masih terbalik	~ 65
Gambar 4.21. Kepala garuda sudah berjambul, namun cakar masih terbalik, hanya berubah posisi jempol cakarnya dari dalam ke luar	~ 66

Gambar 4.22. Lembaran berita dari Kantor Berita Antara,Bandung, 16 Maret 1950, yang menyebutkan Dirk Rühl diperintahkan oleh presiden untuk memperbaiki lambang negara	~ 67
Gambar 4.23. Lambang negara final yang direvisi oleh Dirk Rühl	~ 70
Gambar 4.24. Proporsi skala ukuran, bentuk, dan warna yang dibuat oleh Sultan Hamid II	~ 71
Gambar 4.25. Lampiran Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951	~ 76
Gambar 4.26. Lambang negara dengan proporsi dan warna baru pada Lampiran Undang-Undang No. 24 Tahun 2009	~ 78
Gambar 4.27. Perbandingan proporsi dan warna lambang negara PP No. 66 tahun 1951 dan UU No. 24 tahun 2009	~ 79
Gambar 4.28. Lambang Negara yang telah divektorisasi hasil karya Muhammad Fajar (kiri) dan Rahmad Kurniawan (kanan)	~ 81
Gambar 5.1. Parada Harahap	~ 84
Gambar 5.2. Sukarno	~ 86
Gambar 5.3. Basuki Resobowo	~ 87
Gambar 5.4. Basuki Resobowo di masa tua	~ 88
Gambar 5.5. Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau Sultan Hamid II	~ 89
Gambar 5.6. Mohammad Yamin	~ 91
Gambar 5.7. Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara	~ 93
Gambar 5.8. Mohammad Natsir	~ 94
Gambar 5.9. Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka	~ 96
Gambar 5.10. Melkias Agustinus Pellaupessy	~ 97
Gambar 5.11. Dullah	~ 101

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun yang lalu, media dan masyarakat sempat heboh menanggapi munculnya kaos Giorgio Armani yang menggunakan lambang seperti Garuda Pancasila yang dijual secara *online* di beberapa butik di Indonesia. Tentu saja masyarakat ada yang menanggapinya secara positif, ada pula yang menanggapinya secara negatif. Asvi Warman sendiri menanggapinya dengan melihat peraturan yang ada. *"Pada Pasal 57 Undang-Undang tersebut dinyatakan 'dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini'."*¹

Tentu saja dalam undang-undang yang sama, Undang-Undang no. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan negara adalah hukuman yang menanti, berupa penjara selama 1 tahun atau denda dengan nominal 100 juta rupiah. Pada pasal 69 malah menye-

1 *Menguak Misteri Sejarah*, Asvi Warman Adam, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, halaman 210

butkan ketentuan ini tidak hanya lambang yang sama persis, tetapi juga yang menyerupai lambang negara. Lalu bagaimana dengan banyaknya rakyat Indonesia yang memakai kaos bergambar lambang negara atau partai politik yang memiliki lambang mirip dengan lambang negara?²

Akan tetapi kontroversi itu lanjutan pula oleh Asvi dalam tulisannya itu. *"Kontroversi berikutnya yang masih perlu dijelaskan di tengah masyarakat adalah tentang siapa pencipta lambang negara Garuda Pancasila. Ada yang menyebutkan lambang ini dirancang Mohammad Yamin. Setelah era reformasi muncul klaim bahwa lambang itu diciptakan Sultan Hamid II."*³

Bagaimana pun juga, kita tahu siapa yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita juga sudah tahu kapan hari lahir Pancasila dan siapa yang mengusulkannya. Namun, apakah kita tahu siapa yang merancang lambang negara Garuda Pancasila? Kapan lambang ini dilahirkan? Bagaimana proses perancangannya? Bukankah tidak mungkin lambang yang menurut Sukarno *"alangkah megahnya dan cantiknya Burung Elang Rajawali Garuda yang sayap kanan dan kirinya berelar 17 buah, dengan ekor yang berelar 8 buah, tanggal 17 bulan 8, dan yang berkalungkan perisai yang di*

2 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan larangan dan pidana-an penggunaan lambang negara selain dari apa yang diatur di dalam Undang-Undang. MK berpendapat larangan penggunaan yang dimaksud Pasal 57 huruf d UU no. 24 tahun 2009 tidak tepat, "Pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya." Lihat Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 [online] tersedia di http://peraturan.bpk.go.id/Home/DownloadUjiMateri/70/putusan_sidang_4-PUU-X-2012_bendera%20lambang%20negara_telah%20baca%2015%20Jan%202013.pdf.

3 *Menguak Misteri Sejarah*, Asvi Warman Adam, Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 211.

atas perisai itu tergambar Pancasila, yang di bawahnya tertulis seloka buatan Empu Tantular 'Bhinneka Tunggal Ika,' *Bhinna ika tunggal ika, berjenis-jenis tapi tunggal*"⁴ ini terwujud sendiri tanpa ada yang membuatnya.

Dalam mitologi bangsa Indonesia, garuda merupakan figur yang sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai kendaraan Dewa Wisnu dalam kepercayaan Hindu. Begitu pun dalam kehidupan perpolitikan, Raja Airlangga menggunakan garuda sebagai lambangnya dengan mempersonifikasikan dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu yang mengendarai garuda.

Penelitian lebih lanjut ternyata ditemukan bahwa banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menggunakan figur garuda sebagai lambang mereka. Ada kemungkinan hasil penelitian para perancang lambang negara membawa data-data ini ke meja kerja mereka dan menjadikannya referensi untuk merancang lambang negara. Bisa dikatakan, dalam sejarah bangsa Indonesia figur garuda memang sudah menjadi bagian dari simbol-simbol peradaban mereka dan kini kembali digunakan sebagai simbol negara.

Menariknya, penggunaan figur garuda atau figur sayap tidak hanya terjadi pada masa kerajaan. Ditemukan bahwa sesaat setelah bangsa Indonesia "lahir" lewat kesepakatan para pemuda di dalam ikrar yang disebut "Sumpah Pemuda" pada tahun 1928, figur garuda juga digunakan. Mereka berikrar bertanah air satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Para pemuda yang tergabung dalam perkumpulan Jong Java, Jong Indonesia, Jong Sumatranen Bonds, Jong Celebes, dan Sekar Rukun, sepakat untuk membuat perkumpulan yang lebih besar dan ber-

4 Pidato Presiden Sukarno tanggal 22 Juli 1958 dalam *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara, Bunga Rampai Pameran & Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum KAA, 2014, halaman 5.

fusi menjadi Indonesia Moeda pada sebuah kongres di Gedung Pertemuan Habiprojo, Solo, pada 30 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Kongres itu menyepakati nama-nama perkumpulan yang bersifat kedaerahan itu tidak boleh lagi dipakai.

Nama-nama para pemuda yang tergabung di dalamnya terdiri atas Soewadji Prawirohardjo, R.M. Joesoepadi Danoe-hadiningrat, Mohammad Tamzil, Roesmali, Kanoejoso, Hinoeri-mawan, G.R. Pantouw, Adenan Kapau Gani, dan Kajatoen. Selain itu pula ada nama-nama seperti Abdulrahman Saleh, Achmad Bastari, Amir Hamzah, Ani Idrus, Armijn Pane, Asaat, Mohammad Yamin, Roeslan Abdulgani, Saridjah Niung "Ibu Sud," Soedarisman Poerwokoesoemo, Soekarni, Suparna Sastra Diredja, dan Sutan Mohammad Rasjid.⁵

Dalam kongres itu para pemuda berhasil membangun kesatuan dalam bentuk Indonesia Moeda yang lambangnya menggunakan figur bersayap. Menariknya, mereka menyebut lambang ini dengan simbol emas "Garuda Muda," yaitu sayap Garuda yang mendukung sebuah keris-ligan, yang berdiri di atas tiga landasan bunga teratai. Dikutip dari laman Kemdikbud⁶, lambang itu berarti "*Indonesia Muda untuk perjuangan (keris) menuju arah Indonesia Raya (sayap garuda) berdasarkan ideologi kesatuan bangsa, tanah air, dan budaya (3 teratai)*".

Di sisi lain, Mohammad Yamin sendiri memaparkan dengan apik mengenai "lahirnya" bangsa Indonesia ketika Sumpah Pemuda itu dilantangkan dan bagaimana filosofi simbol "Garuda Muda" yang menjadi lambang Indonesia Moeda.

5 *Indonesia Moeda* [Online] tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Moeda [11 September 2022]

6 *Aktivis Persatuan Pemuda RM. Joesoepadi Danoe-hadiningrat (9) "Indonesia Moeda"* [Online] tersedia di: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/aktivis-persatuan-pemuda-rm-joesoepadi-danoehadiningrat-9/> [10 September 2022] yang bersumber dari Aktivis Persatuan Pemuda: R.M. Joesoepadi Danoe-hadiningrat (Cetakan Kedua), Museum Sumpah Pemuda, 2010.



Gambar 1.1. Lambang Indonesia Moeda
(sumber: kemdikbud.go.id)

Dasar jang tiga jaitulah: Indonesia jalah tanah-air jang bulat dalam kesatuanja; rakjat Indonesia bersatulah mendjadi satu Bangsa, dan Bahasa Indonesia jalah bahasa persatuan. Tanggal 28 Oktober 1928 jalah lahirnja Bangsa Indonesia. Kelahiran Bangsa itu diiringi dengan lahirnja lagu Indonesia Raja, dan pada hari itu pulalah dikibarkan bendera Merah Putih Garuda Terbang. Bendera ini achirnja dalam perkumpulan Indonesia Muda mendjadi bendera Merah Putih, sedangkan kedua belah sajab Burung Garuda itu lalu berpindah keatas pandji-pandji perkumpulan, dilukiskan disebelah kiri-kanan se-

bilah mata keris jang hulunja tertanam atas lapisan daun kembang serodja; sebelah keudjung mata keris bersinarlah Matahari Indonesia Raja. Tak heranlah, apabila tanggal 28 Oktober itu selalu dirajakan dalam Republik Indonesia sebagai hari lahirnja Angkatan Pemuda Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah-Putih dan memperingati pentjiptaan lagu-kebangsaan Indonesia Raja.⁷

Bukankah menarik bagaimana figur bersayap yang dijadikan lambang Indonesia Moeda itu disebut sebagai garuda? Ini memperlihatkan bagaimana figur garuda terus hadir dalam simbol-simbol bangsa Indonesia bahkan sejak bangsa ini “dilahirkan.”

Kembali kepada pertanyaan siapa yang merancang dan bagaimana proses perancangan lambang negara itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dipaparkan. Buku-buku sejarah kita lebih banyak dan lebih tertarik membahas peristiwa-peristiwa besar yang sifatnya heroik, seperti peperangan-peperangan atau perundingan-perundingan. Memang, pada saat proses perancangan lambang negara, catatan sejarah bangsa ini menyebutkan bahwa kita sedang berada pada masa-masa genting dengan adanya Agresi Militer Belanda satu dan dua, berbagai perundingan seperti Linggarjati, Renville, dan Konferensi Meja Bundar. Belum lagi perubahan bentuk negara dan pemerintahan, dari Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, memang membuat kisah sejarah yang menarik dan heroik.

Namun, seperti diingatkan oleh Rosihan Anwar bahwa di balik peristiwa-peristiwa sejarah yang besar, di sana terdapat *petite history*, sejarah kecil yang mungkin luput dari perhatian.

7 6000 Tahun Sang Merah Putih, Mohammad Yamin, Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958, halaman 228.

Proses singkat perancangan lambang negara, di tengah-tengah peristiwa besar, mungkin membuatnya menjadi *petite history* yang luput dari pengamatan sejarah. Padahal jika kita mau merenungkan kembali, perancangan lambang negara, yang menjadi simbol bagi bangsa dan negara, tentu bukan peristiwa kecil. Ia menandai satu titik dimana bangsa ini berusaha memvisualisasikan identitas dan nilai-nilai yang dibawa dalam membangun sebuah organisasi bernama negara Indonesia.

Beruntungnya, bermunculan berbagai penelitian mengenai perancangan lambang negara yang memungkinkan untuk mengungkap siapa perancang dan bagaimana proses perancangan lambang negara. Sebagai contoh, pada tahun 1985 U'un Mahdar Asmadi melakukan penelitian akademis mengenai sejarah hukum proses penciptaan lambang negara dalam kaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta. Muncul pula buku berjudul *Sekitar Garuda Pancasila* (1986) yang ditulis oleh Drs. Akmal Sutja yang membuka sejarah mengenai perancangan lambang negara. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Turiman Faturrachman Nur tahun 1996 dalam bentuk tesis dengan judul *Historisitas Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pengaturan Lambang Negara Republik Indonesia Dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Selain itu, terdapat pula buku-buku ringan yang membahas mengenai lambang negara, seperti *Pancasila Dalam Puisi* karya Sides Sudiyarto Ds. (1979), dan *Lambang Negara Republik Indonesia* karya Dra. Endang Daruni Asdi (1984).

Lalu apakah memang tidak ada buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memaparkan sejarah perancangan lambang negara? Jawabannya tidak juga.

Dahlan Djazh menulis dua buku bergambar Seri Pendidikan Kepribadian Bangsa bertemakan lambang negara, yaitu *Garuda Pancasila Lambang Negaraku* (1989) dan *Sejarah Penciptaan Lambang Garuda Pancasila* (1991). Keduanya diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pernah menerbitkan buku *Garuda Pancasila Lambang Negara Republik Indonesia* (2012) yang memaparkan proses penciptaan, simbolisasi makna, dan penggunaan lambang negara. Namun tak lama setelah terbit, buku ini ditarik kembali tanpa alasan yang jelas. Terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga pernah menerbitkan buku *Kisah Pancasila* (2017) dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2017 yang di dalamnya terdapat paparan sejarah perancangan lambang negara. Versi digital buku ini bahkan dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat melalui laman daring kemdikbud.go.id.⁸

Menariknya lagi, berpuluh tahun sejak lambang negara diresmikan penggunaannya oleh pemerintah, baru pada tahun 2011 diadakan seminar nasional dan pameran yang diadakan di Gedung Merdeka dan Museum Konperensi Asia-Afrika Bandung yang membahas mengenai sejarah perjalanan lambang negara. Rangkaian kegiatan ini menghasilkan sebuah buku berjudul *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara, Sejarah Elang Rajawali Garuda Pancasila: Bunga Rampai Pameran & Seminar Lambang Negara Republik Indonesia* yang diterbitkan oleh Sahabat Museum Konperensi Asia-Afrika pada tahun 2014.

Dari berbagai literatur yang membahas mengenai lambang negara yang sudah disebutkan di atas, masih banyak ragam versi sejarah yang tidak merujuk pada satu titik temu.

⁸ <https://repositori.kemdikbud.go.id/23801/1/Kisah%20pancasila.pdf>

Keterbatasan arsip, data, dan sumber sejarah, serta kesimpangsiuran informasi yang beredar di berbagai media membuat pengkajian sejarah menjadi sulit.

Oleh karena itu, paparan mengenai lambang negara yang disajikan di dalam buku ini bukanlah paparan yang sudah paten dan tidak dapat diganggu gugat, melainkan paparan yang terbuka terhadap berbagai versi sejarah dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dalam peristiwa tersebut. Paparan ini dapat dikritik, ditolak, bahkan dinihilkan apabila di masa yang akan datang ditemukan data-data baru yang meyakinkan mengenai detail-detail proses perancangan lambang negara.

2. GARUDA DI BERBAGAI TEMPAT DAN KISAH NUSANTARA

Garuda bukanlah sosok nyata ada di alam dunia ini, tetapi ia merupakan sosok yang hadir dalam kisah-kisah yang diceritakan turun temurun di Indonesia. Pemilihan sosok garuda sebagai lambang negara bukan tanpa alasan, karena Indonesia sejak dulu terkenal sebagai bangsa yang sarat akan nilai-nilai mitologi dan spiritual.

Makhluk bersayap ini *"dihadirkan dalam sebuah peradaban sebagai penguasa area transisi antara bumi dan langit, jembatan dunia bawah dan dunia atas, pertalian antara manusia dan lingkungannya."*⁹ Dunia atas adalah dunianya para dewa yang digambarkan lebih tinggi derajatnya daripada manusia di dunia bawah. Untuk mencapai dunia atas ini dilambangkan dengan figur burung yang memiliki sayap sebagai instrumen untuk mengangkasa mendekati tempat para dewa.

9 *Mencari Telur Garuda (Jilid Kedua)*, Nanang R. Hidayat, i:Boekoe & Rumah Garuda, 2020, hlm. 3.

Kisah garuda di Indonesia ditemukan di beberapa tempat, di antaranya ada yang berbentuk ukiran di candi-candi dan ada pula yang ditemukan di dalam tulisan-tulisan kitab. Semuanya menunjukkan keluhuran budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak lama. Berikut ini dipaparkan figur-figur garuda yang terukir pada relief-relief candi dan sosok garuda yang diceritakan dalam kitab Adiparwa.

GARUDA DALAM CERITA-CERITA DI INDONESIA

Dalam cerita Nusantara, sosok Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu. Sebagai tunggangan Wisnu, ia diyakini pula memiliki sifat-sifat tuannya, yakni sebagai pemelihara dan penjaga alam semesta. Bukti-bukti mengenai figur Garuda ini terrekam dalam relief dan arca di beberapa candi, misalnya: Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Mendut, Candi Penataran, Candi Belahan, Candi Sukuh, dan Candi Cetho. Di Jawa dan Bali, figur Garuda digambarkan melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan dan disiplin. Dalam periode sejarah klasik Indonesia, banyak kerajaan-kerajaan pun menggunakan sosok Garuda sebagai lambang kerajaannya, misal: Kesultanan Yogyakarta, Kasultanan Ternate, Samudera Pasai, dan lain-lain, yang akan ditunjukkan pada bab berikutnya.

Figur Garuda diambil dari unsur-unsur peradaban Indonesia, yang hidup dalam mitologi, simbologi, dan kesusasteraan Indonesia sejak abad VI – XVI Masehi. Dalam dunia mitologi Indonesia, burung Garuda erat kaitannya dengan burung Elang Rajawali. Burung itu dilukiskan di Candi Dieng, Prambanan dan Penataran. Ada kalanya dilukiskan berupa manusia dengan paruh burung dan bersayap (Dieng). Di Candi Prambanan dan candi-candi Jawa Timur, digambarkan menyerupai



**Gambar 2.1. Relief garuda di Candi Sukuh, Karanganyar, Jawa Tengah
(Sumber: Nanang R Hidayat)**

burung dengan paruh panjang, berambut raksasa dan bercakar. Misal di Candi Prambanan, Sukuh, Kidal di Jawa Timur.

Lencana Garuda pernah dipakai oleh Raja Airlangga pada abad ke-11 M, dengan nama Garudamukha. Arca Raja Airlangga pun digambarkan mengendarai seekor Garuda. Pergerakan Indonesia Moeda tahun 1930 juga pernah memakai panji-panji berlambang 'Sayap Garuda' yang di tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis.

Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perisai perjuangan yang dijadikan lambang, wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban asli Indonesia.

KISAH GARUDA DALAM KITAB ADIPARWA

Kisah garuda diceritakan di dalam Kitab Adiparwa yang merupakan buku pertama atau bagian pertama dari kisah Mahabharata. Kisah yang ditulis oleh Begawan Byasa atau Vyasa ini terdiri atas delapan belas kitab yang disebut dengan Astadasaparwa. Ke delapan belas kitab itu di antaranya adalah Adiparwa, Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Saupitikaparwa, Striparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedhikaparwa, Asramawasikaparwa, Mosalaparwa, Mahapras-tanikaparwa, dan Swargarohanaparwa. Kisah garuda diceritakan dalam Kitab Adiparwa bagian Astikaparwa dari bagian XVI sampai bagian XXXIV.¹⁰

Dikisahkan dalam mitologi, terdapat seorang guru bijaksana bernama Resi Kasyapa. Ia memiliki dua orang istri putri Prajapati, yaitu Dewi Kadru dan Dewi Winata. Kasyapa menawarkan kepada keduanya sebuah anugerah. Kadru menginginkan putra, yaitu seribu ular naga dengan keagungan yang sama. Sedangkan Winata meminta dua putra yang keagungannya melebihi seribu putra Kadru. 500 tahun berlalu, telur-telur milik Kadru menetas dan melahirkan seribu naga seperti yang dimintanya. Namun, telur-telur Winata belum ada satu pun yang menetas. Karena ia tidak sabar, Winata nekat memecahkan salah satu telur miliknya dan lahirlah seekor burung yang gagah namun tidak lengkap tubuhnya, sebab tak memiliki kaki. Anak burung yang diberi nama Aruna itu marah dan mengutuk ibunya akan mengalami perbudakan. Setelah mengutuk ibunya, ia terbang ke langit untuk menjadi kusir Dewa Surya.

¹⁰ *The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa: Translated into English Prose*, Protap Chandra Roy, Bharata Press, 1884, hlm. 76-112.

Di sisi lain, para dewa dan asura sedang melakukan pengadukan Samudera Manthana untuk mencari Tirta Amerta atau air kehidupan. Ketika pengadukan terjadi, Tirta Amerta yang berhasil diambil, menjadi rebutan antara para dewa dan asura. Akhirnya, para dewa lah yang berhasil memenangkan air suci itu. Selain Tirta Amerta, dari dalam samudera muncul pula seekor kuda yang gagah bernama Uchchaisravas.

Pada suatu saat, Kadru bertanya kepada Winata apa warna ekor kuda Uchchaisravas yang muncul dari tengah samudera. Winata menjawab putih dan Kadru menjawab hitam. Kemudian, Kadru mengajak Winata untuk mempertaruhkan pilihan mereka dan bagi yang kalah taruhan akan menjadi budak bagi yang menang. Setelah Winata setuju dengan taruhan itu, Kadru memanggil anak-anak naganya dan memerintahkan mereka untuk mengubah diri mereka menjadi rambut hitam, kemudian menyelimuti ekor kuda tersebut supaya nampak menjadi hitam. Akan tetapi, para naga menolak permintaan ibunya itu. Kadru yang marah kepada anak-anaknya mengutuk mereka supaya dibinasakan oleh Agni dalam upacara pengorbanan ular Raja Janamejaya. Khawatir kutukan itu menjadi nyata, mereka memutuskan untuk memenuhi perintah ibunya.

Kemudian, Kadru dan Winata pergi ke tengah samudera untuk melihat sendiri apa warna ekor kuda Uchchaisravas. Menyaksikan warna ekor kuda itu berwarna hitam, Winata kalah dalam taruhan dan menjadi budak Kadru. Bersamaan dengan kejadian itu, telur terakhir milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung bernama Garuda. Tubuhnya gagah dan mampu berubah menjadi apapun. Sayapnya lebar dan bercahaya, sehingga membuat para dewa menjadi takut dan mengira bahwa Agni sedang marah. Saat mereka memohon perlindungan kepada Agni, ia mengatakan kepada para dewa

bahwa itu bukanlah dirinya, melainkan Garuda yang baru lahir dan mengatakan kepada mereka supaya tidak takut.

Sejak saat itu Garuda membantu ibunya, Winata, mengasuh para naga. Suatu hari Kadru meminta Winata untuk membawanya beserta anak-anaknya ke sebuah pulau indah di tengah samudera. Winata menggendong Kadru di pundaknya dan memerintahkan Garuda menggendong para naga. Saat Garuda terbang membawa para naga dan mendekati matahari, para naga merasa terbakar. Melihat itu, Kadru meminta kepada Dewa Indra supaya menurunkan hujan, sehingga para naga pun terselamatkan.

Ketika sedang bermain di pulau indah itu, para naga yang bosan meminta kepada Garuda untuk mengantar mereka ke pulau yang lebih indah lagi. Permintaan itu membuat Garuda termenung sejenak, lalu menanyakan kepada ibunya mengapa ia harus menuruti keinginan para naga. Ibunya menceritakan mengenai pertarungan yang ia kalah di dalamnya karena tindakan licik Kadru dan anak-anak naganya. Oleh karena itu, Garuda menemui para naga dan menanyakan apa syarat untuk membebaskan ibunya dari perbudakan Kadru. Para naga meminta supaya Garuda membawakan Tirta Amerta.

Mendengar permintaan itu, Garuda langsung meminta restu ibunya untuk berangkat mencari Tirta Amerta. Pertama-tama, untuk mendapatkan tenaga, ia harus pergi ke sebuah pulau yang dihuni para Nishada dan harus memakan semua yang ada di sana, kecuali para brahmana. Saat tanpa sengaja ia memakan seorang brahmana dan istrinya, sehingga tenggorokannya panas, Garuda terpaksa memuntahkan mereka semua dan memohon maaf atas kejadian itu. Segera saja Garuda pergi dari sana dan terbang menemui ayahnya, Kasyapa.

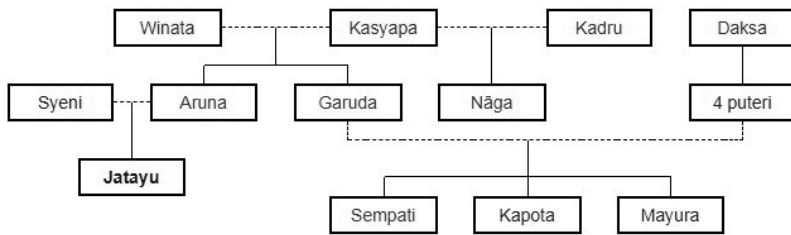
Ia meminta petunjuk ayahnya, di mana ia bisa mendapatkan makanannya kembali. Kasyapa menunjukan sebuah danau

tempat tinggal seekor kura-kura raksasa dan seekor gajah raksasa yang keduanya boleh dijadikan santapan bagi Garuda. Setelah mendapat restu dari ayahnya, ia berangkat menuju danau tersebut dan menyambar kedua hewan raksasa itu sambil mencari tempat untuk memakan keduanya. Saat mencari tempat untuk makan, ia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah cabang pohon raksasa yang ternyata tempat para Valakhilya bertapa. Dengan sigap Garuda menyambar cabang pohon tersebut dan membawa mereka ke puncak sebuah gunung. Di sana ia pun menyantap kedua hewan raksasa itu.

Bersamaan dengan kejadian itu, pertanda buruk bermunculan di khayangan. Petir Dewa Indra menyala-nyala dalam ketakutan, meteor dengan api dan asap menghiasi langit, dan senjata para dewa mulai mengeluarkan kekuatan mereka saling serang satu sama lain. Vrihaspati menjelaskan kepada Dewa Indra bahwa itu disebabkan karmanya terhadap Valakhilya dan karma itu telah terwujud dalam bentuk Garuda yang sebentar lagi akan muncul.

Benar saja, tak seberapa lama kemudian, Garuda muncul di khayangan dan memporakporandakan kerajaan langit itu. Ia mengalahkan para dewa dan berhasil menerobos ke tempat persembunyian Tirta Amerta. Ketika ia telah berhasil mendapatkan air suci itu, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Ternyata ia memuji perjuangan Garuda dan menawarkannya anugerah. Garuda meminta supaya keagungannya tetap berada di atas dewa tersebut dan hidup abadi tanpa meminum Tirta Amerta. Dewa Wisnu mengabulkannya.

Kemudian Garuda berbalik menawarkan anugerah kepada Dewa Wisnu. Ia meminta kepada Garuda supaya ia menjadi tunggangannya dan menjadi panji-panji perangnya. Garuda pun mengabulkannya. Usai berhadapan dengan Dewa Wisnu, Garuda berhadapan dengan Dewa Indra. Dewa Petir



Gambar 2.2. Silsilah keluarga Garuda
(Sumber: dictio.id)

itu menyerang Garuda dengan senjatanya, namun Garuda tidak merasa kesakitan. Namun, Garuda mencabut dua helai bulunya dan menyerahkannya kepada Dewa Indra sebagai tanda penghormatannya terhadap Bajra (petir Indra), pencipta Bajra, dan Dewa Indra itu sendiri. Setelah itu keduanya berdamai, menjalin hubungan pertemanan, dan Dewa Indra memberi kebebasan bagi Garuda untuk memangsa para naga.

Garuda pun kembali ke bumi, meletakkan air suci Tirta Amerta di atas rumput Kusa di hadapan para naga. Mereka pun menyatakan kebebasan Winata saat Garuda memberikan air suci itu. Garuda memberikan syarat bahwa mereka harus melakukan penyucian diri sebelum meminum Tirta Amerta. Saat para naga melakukan penyucian diri, Dewa Indra turun dan menyambar air suci itu kembali ke langit, sesuai perjanjiannya dengan Garuda.

3. GARUDA DI BEBERAPA LAMBANG KERAJAAN- KERAJAAN NUSANTARA

Simbol-simbol garuda di Indonesia nyatanya banyak sekali bertebaran di berbagai sudut daerah. Beberapa catatan sejarah menyebutkan beberapa kerajaan dan daerah di Nusantara dulu juga menggunakan garuda sebagai simbol-simbol mereka. Keberadaan spesies elang-rajawali endemik negeri ini menjadi salah satu faktor banyaknya penggunaan simbol yang menyerupai sosok garuda di sana.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, figur garuda banyak ditemukan pada relief-relief candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lencana Garuda pernah dipakai oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur pada abad ke-11 dengan nama Garudamukha, yang nantinya akan diadaptasi dan berubah menjadi lambang Kota Kediri.

Terdapat pula beberapa penggunaan figur garuda dalam lambang-lambang kerajaan di Nusantara. Berikut ini dipapar-

kan beberapa kerajaan dan daerah di Nusantara yang menggunakan garuda sebagai simbol utama di dalam lambangnya.

KESULTANAN TERNATE

Kesultanan yang berada di kepulauan Maluku ini memiliki lambang resmi berbentuk burung Goheba berkepala dua. Pada bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya dan pada bagian bawahnya terdapat pita bertuliskan "Limau Gapi."



**Gambar 3.1. Lambang Kesultanan Ternate berbentuk burung Goheba
(Sumber: detikcom)**

Dikutip dari detikTravel¹¹, Hidayat Mudaffar Sjah, pejabat Kesultanan Ternate setelah Sultan Mudaffar Syah II, menjelaskan bahwa "Limau Gapi" itu bermakna di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati, dan tenggang rasa antara raja selaku pemimpin dengan rakyatnya. Dalam bahasa

¹¹ *Makna di Balik Lambang Kesultanan Ternate yang Mendunia* [Online], Wahyu Setyo Widodo, tersedia di: <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3628232/makna-di-balik-lambang-kesultanan-ternate-yang-mendunia> [9 September 2022]

Ternate ada istilah *toma ua hang moju, toma limau gapi matubu, jou se ngofangare*, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan Engkau. Aku Tuhanmu dan Kau hambaKu.

Penjelasan lain yang menarik mengenai lambang ini dikutip dari Bobo¹², dua burung yang hadir dalam lambang Kesultanan Ternate menyimbolkan laki-laki dan perempuan. Perempuan dilambangkan sebagai burung elang darat atau *wuru*, sedangkan laki-laki dilambangkan dengan elang laut atau *goheba*. Dapat dikatakan bahwa kedua burung yang ditampilkan dalam lambang ini mewakili dua jenis elang endemik yang ada di Ternate.

Tampaknya lambang Kesultanan Ternate secara umum menyimbolkan dualisme yang terdapat pada alam raya, seperti yang digambarkan adanya raja dan rakyat, serta laki-laki dan perempuan. Bisa pula menyimbolkan dualisme secara umum seperti tua-muda, jauh-dekat, panjang-pendek, besar-kecil, tinggi-rendah, atau yang lebih besar lagi, Tuhan dan ciptaannya.

KESULTANAN BIMA

Lambang Kesultanan Bima dicetuskan oleh Sultan Abdul Hamid yang merupakan sultan ke-9 dari generasi Kesultanan Bima. Penetapan lambang ini dilakukan pada tanggal 22 Zulkaidah 1203 H atau 15 Agustus 1789 M.

Dikutip dari artikel Alan Malingi¹³ yang bersumber dari *Sejarah Bima Dana Mbojo* karya H. Abdullah Tayib, lambang berbentuk burung berkepala dua ini menggambarkan Kesul-

12 *Keraton Ternate, Kerajaan Islam Sejak Abad 15* [Online], Patronela Putri, tersedia di: <https://bobo.grid.id/read/08674329/keraton-ternate-kerajaan-islam-sejak-abad-15?page=all> [9 September 2022]

13 *Lambang Kesultanan Bima* [Online], Alan Malingi, tersedia di: <https://www.sejarahbima.com/2016/05/lambang-kesultanan-bima.html?m=1> [9 September 2022]



Gambar 3.2. Lambang Kesultanan Bima
(Sumber: sejarahbima.com)

tanan Bima berlandaskan pada hukum adat dan hukum Islam. Warna dasar kuning berarti bersih, warna biru pada burung berarti setia, dan warna merah berarti berani.

Sayap kiri burung melambangkan hukum adat dengan bulu pada bagian luar berjumlah 7 helai dan bulu bagian dalam berjumlah 5 helai. Bulu bagian luar melambangkan 7 orang *majelis teruli* yang terdiri dari Teruli Ngampo (perdana menteri), Teruli Bolo, Teruli Belo, Teruli Woha, Teruli Donggo, Teruli Parado, dan Teruli Sakuru. Sedangkan bulu bagian dalam melambangkan federasi Ncuhi yang pernah menguasai tanah Bima, yaitu Ncuhi Dara, Ncuhi Dorowuni, Ncuhi Banggapupa, Ncuhi Parewa, dan Ncuhi Padolo.

Sayap kanan burung melambangkan hukum Islam yang dijalankan di Kesultanan Bima dengan bulu bagian luar berjumlah 7 helai dan bulu bagian dalam berjumlah 5 helai. Bulu bagian luar melambangkan 7 macam ilmu fiqih, sedangkan bulu bagian dalam melambangkan 3 ilmu tauhid dan 2 ilmu tasawuf. Pada abad ke 18, ilmu tauhid dan ilmu fiqih berkembang sangat pesat di Bima dengan menganut paham *ahlu*

sunnah wal jamaah yang dikenal dengan istilah “ilmu dua belas.”

Bagian ekor burung melambangkan strata masyarakat, pelaksanaan hukum Islam dan pengurus adat, yang disimbolkan dengan tiga bagian bulu ekor. 4 helai bulu bagian kiri burung melambangkan strata masyarakat dan pola hubungannya, yaitu sultan, bangsawan, pertukangan, dan masyarakat biasa. 4 helai bulu bagian kanan melambangkan 4 orang *khatib* di Kesultanan Bima, yaitu Khatib Tua, Khatib Karoto, Khatib La Wili, dan Khatib To'i. Sedangkan 2 helai bulu pada bagian tengah ekor melambangkan ketua dan wakil ketua adat.

Tubuh burung secara keseluruhan melambangkan satu kesatuan sistem pemerintahan Kesultanan Bima yang dilambangkan dengan raja atau sultan sebagai pemimpin tertinggi adat dan pelindung penyayom masyarakat (*Hawo Ro Ninu*). Jika dihitung semua bulu burung itu berjumlah 35 helai yang melambangkan keterpaduan antara Sara (*umara*/pemimpin rakyat) dan Islam (*ulama*/pemimpin umat). Yang menjadi satu kesatuan dalam *Sara Dana Mbojo*.

KESULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT

Sampai pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana VII, lambang Kesultanan Ngayogyakarta masih terpengaruh oleh lambang Kerajaan Belanda yang identik dengan lambang singa, perisai, dan mahkota. Namun pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana VIII pada tahun 1921 muncul keinginan untuk membuat lambang keraton berdasarkan cita rasa seni budaya sendiri. Dibantu oleh K.R.T. Yosodipuro, seniman yang merupakan menantu Sri Sultan Hamengkubuwana VII, lambang Kesultanan Ngayogyakarta yang kita kenal hari ini pun hadir.



Gambar 3.3. Lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat
(Sumber: *kompas.com*)

Dikutip dari Kompas.com¹⁴, Lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini memiliki nama sebutan *Praja Cihna*. Selain berfungsi sebagai ragam hias di beberapa bangunan, Praja Cihna juga digunakan dalam kop surat resmi dan medali penghargaan. Sedangkan makna lambang ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Songkok atau mahkota yang berada di atas, melambangkan sifat ksatria yang merupakan sifat seorang raja atau sultan. Sumping atau hiasan telinga yang berada di samping kanan dan kiri bagian mahkota merupakan perhiasan yang oleh orang Jawa diselipkan di telinga, dikenal dengan nama

14 *Sejarah dan Makna Lambang Keraton Yogyakarta yang Dibuat Tahun 1921* [Online], Alinda Hardiantoro, tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/20/121500065/sejarah-dan-makna-lambang-keraton-yogyakarta-yang-dibuat-tahun-1921?page=all>. [9 September 2022]].

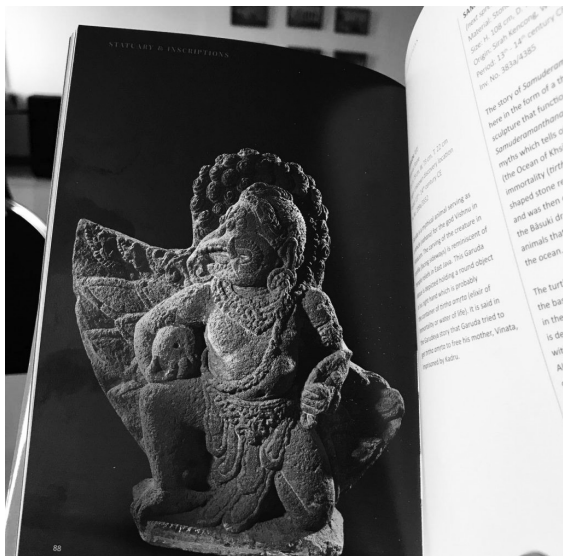
Giwang. Daun Keluwih yang ada di bagian atas dan bawahnya bermakna kelebihan, yang berasal dari kata *luwih*. Praba atau sorot cahaya melambangkan kehormatan Jawa Mataram.

Lar Sayang atau sayap pada kedua sisinya menyerupai sayap burung garuda memiliki arti cita-cita tinggi. Jumlah helai bulu pada masing-masing sayap menjadi identitas sultan yang bertahta. Misalnya pada lambang Sri Sultan Hamengkubuwana VIII digambarkan dengan jumlah bulu 8 helai. Tameng merah melambangkan perlindungan terhadap rakyat, dengan warna merah yang berarti keberanian tanpa meninggalkan kewaspadaan dalam membela kebenaran. Tulisan aksara Jawa yang saling tumpang tindih dibaca "Ha" dan "Ba" merupakan akronim dari Hamengku Buwana yang merupakan gelar sultan yang bertahta di Keraton Yogyakarta. Gelar tersebut merupakan harapan luhur agar seorang raja mampu melindungi, membela, dan mewujudkan kemakmuran rakyat. Sementara itu, warna kuning keemasan pada aksara Jawa itu melambangkan keagungan. Sekar Padma atau bunga padma yang merupakan jenis bunga teratai yang hidup di atas permukaan air menggambarkan kehidupan dunia yang mendasari kehidupan di akhirat, sedangkan sulur atau tumbuhan sulur melambangkan kehidupan kehidupan berkelanjutan seperti sulur yang terus menerus merambat.

Secara keseluruhan lambang Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan *sengkalan memet* yang berbunyi *Kaluwihaning Yaksa Salira Aji* yang bermakna 1851. *Kaluwihaning* berbentuk ukiran daun kluwih bermakna 1, *Yaksa* atau *kemamang* bermakna 5, *Salira* berupa binatang melata atau ular naga bermakna 8, dan *Aji* lambang tulisan "Ha" "Ba" di dalam lingkaran bola dunia bermakna 1. Artinya 1851 tahun saka atau 1921 masehi.

KERAJAAN KAHURIPAN

Garudamukha sudah menjadi lambang Kerajaan Kahuripan sejak era Raja Airlangga dan juga digunakan oleh dua kerajaan sesudahnya yang dipimpin oleh kedua puteranya, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kediri dengan rajanya Sri Samarawijaya dan Kerajaan Jenggala dengan rajanya Mapanji Garasakan. Pada masanya, Airlangga disebut sebagai titisan Dewa Wisnu dan Garuda burung suci yang menjadi tunggangan salah satu dewa utama dalam kepercayaan Hindu itu.



Gambar 3.4. Arca Garudamukha koleksi Museum Nasional

Dikutip dari tirto.id¹⁵ yang bersumber dari *Katuturanita Maharaja Erlangga* (2008) karya Koes Indarto, istilah Garudamukha termaktub dalam beberapa ungkapan pada masa

15 *Asal-Usul Lambang Garuda dalam Sejarah Kerajaan Raja Airlangga* [Online], Iswara N Raditya, tersedia di: <https://tirto.id/asal-usul-lambang-garuda-dalam-sejarah-kerajaan-raja-airlangga-giHm> [9 September 2022]

Airlangga. Salah satu ungkapannya berbunyi: *Gumereh ikang gong gendhing surak umwang gumuruh kang dhwaja mawagatra garudhamukha lancana rekta kumlab munggwing umiringaken dening wadwa manunggang waji mwang gajah*. Kalimat ini berarti: Suara gong dan tembang bergemuruh terdengar menyertai barisan balatentara dan bendera dengan lancana Garudamukha berkibar diiringi oleh para prajurit yang menaiki kuda serta gajah.

Terdapat pula ungkapan lain yang menyebut Garuda-mukha yaitu, *Sang Nerpati munggwing madya manunggang liman agung rinayaseng kambala mwang umiringaken dhwaja ginatra garudamukha rakta kumlap*. Kalimat ini berarti: Sang Raja menaiki gajah besar berhias rumbai dengan diikuti bendera berlambang Garudamukha yang berkibaran. Lambang Garudamukha ini seiring perjalanan zaman diadaptasi dan diubah menjadi lambang Kota Kediri dengan makna yang berkembang pula.

Dikutip dari laman resmi Kota Kediri¹⁶, lambang kota ini memiliki makna pada setiap bagian-bagiannya. Buto Locoyo (Ki Ageng Dhoho) merupakan patih yang setia, teguh, dan jujur dari Sri Aji Joyoboyo, penjaga Kota Kediri, lambang kesetiaan, keteguhan, dan kejujuran. Perisai menjadi lambang pertahanan dan Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo), raja pujangga yang merupakan ahli nujum ternama di Kediri menjadi lambang waspada. Bunga melati berdaun lima melambangkan Pancasila, sedangkan Padi-Kapas perlambang kemakmuran.

Dewi Kilisuci, yang bertapa untuk kepentingan saudaranya yang diberi hak untuk memimpin rakyat dan bersedia lapar demi orang lain, melambangkan tidak mementingkan diri sendiri. Pita bertulisan "Djojo ing Bojo" merupakan bahan pe-

16 *Lambang Daerah Kota Kediri* [Online], Pemerintah Kota Kediri, tersedia di: <https://kedirikota.go.id/page/profil/3> [9 September 2022]



Gambar 3.5. Lambang Kota Kediri
(sumber: kedirikota.go.id)

ngikat atau pemersatu yang berarti persatuan. Sayap dan ekor yang jumlah bulunya 17, 8, 4, dan 5, menjadi lambang tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia.

Secara umum, lambang Kota Kediri ini berarti bahwa Kediri tetap waspada mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan keberanian, kesucian, keteguhan, dan tidak takut penderitaan untuk mencapai hasil yang gilang gemilang (aman dan makmur).

KESULTANAN SAMBAS

Kesultanan Sambas yang berada di Kalimantan merupakan salah satu kerajaan yang menggunakan figur garuda atau elang pada lambangnya. Terdapat kesalahpahaman pada penafsiran bentuk figur yang terdapat pada lambang ini yang pada laman [misterpanglayo.com](https://www.misterpangalayo.com)¹⁷ menyebutnya gabungan

17 *Elang Laut: Si Penguasa Langit Pesisir Lambang Kesultanan Sambas* [Online], Mister Pangalayo, tersedia di: <https://www.misterpangalayo.com/2017/05/elang-laut-lambang-kesultanan-sambas.html> [9 September 2022]

antara elang laut dan kuda laut. Di sisi lain, dikutip dari TribunNews¹⁸, Abdul Muis, seniman muda Sambas menyebutkan bahwa figur yang terdapat pada lambang Kesultanan Sambas yang disebut dengan lambang Alwatzikhoebillah merupakan burung Elang Laut jenis dada putih.

Simbol ini dibuat oleh Pangeran Anom Kesultanan Sambas dan dibentuk seperti seekor naga dalam versi Asia. Simbol ini merupakan filosofi yang digunakan Pangeran Anom, seperti kuda yang berlari kencang di laut dan menerkam layaknya elang. Karena filosofi inilah banyak orang yang mengatakan simbol ini sebagai kuda laut. Diperkuat pula, menurut Abdul Muis, Pangeran Anom memasang simbol itu di kapalnya yang bernama Kapal Keruis atau Kapal Induk.



Gambar 3.6. Lambang Kesultanan Sambas
(Sumber: misterpangalayo.com)

18 *Terungkap, Ini Ternyata Simbol Istana Alwatzikhoebillah Sambas* [Online], Tito Ramadhani, tersedia di: <https://pontianak.tribunnews.com/2018/01/28/terungkap-ini-ternyata-simbol-istana-alwatzikhoebillah-sambas?page=3> [9 September 2022]

Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, penerus Kesultanan Sambas, juga dalam artikel yang sama mengatakan bahwa Pangeran Anom yang membuat lambang itu untuk menggambarkan dirinya seperti burung elang laut dada putih yang sangat kuat dan gesit dengan kekuatan dan kecepatan layaknya kuda yang mampu berlari kencang di laut. Ia juga menambahkan agar filosofi ini dapat menjadi penyemangat masyarakat Melayu dan Sambas supaya menjadi orang yang tangkas dan pemberani menghadapi tantangan zaman.

Selain itu, Drs. Ansar Rahman dalam bukunya *Kabupaten Sambas: Sejarah Kesultanan dan Pemerintahan Daerah* yang dikutip oleh misterpangalayo.com¹⁹ mengatakan bahwa Alwatzikhoebillah bermakna “berpegang teguh dengan nama Allah” yang merupakan motto Kesultanan Sambas. Dua ekor elang laut yang berada di atas tulisan itu memiliki makna kekuatan Kerajaan Sambas diutamakan pada kekuatan laut. Angka 9 yang ditampilkan pada lambang di atas berarti bahwa istana kesultanan itu direnovasi oleh sultan ke-9 yaitu Sultan Mulia Ibrahim Syafiuddin, sedangkan bintang bersegi tiga belas berarti sultan dan wakil sultan ke-13 yang memerintah Negeri Sambas, yaitu yaitu Sultan Muhammad Syafiuddin II (1866-1924).

KESULTANAN SAMUDERA PASAI

Penemuan terbaru dalam penelitian mengenai sejarah lambang negara adalah munculnya lambang Kesultanan Samudera Pasai yang secara bentuk sangat mirip dengan lambang negara Garuda Pancasila. Banyak polemik yang muncul ketika penemuan ini menyeruak dengan tuduhan ne-

19 *Elang Laut: Si Penguasa Langit Pesisir Lambang Kesultanan Sambas* [Online], Mister Pangalayo, tersedia di: <https://www.misterpangalayo.com/2017/05/elang-laut-lambang-kesultanan-sambas.html> [9 September 2022]



Gambar 3.7. Lambang Kesultanan Samudera Pasai
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

gatif bahwa rancangan lambang negara Garuda Pancasila meniru atau menjiplak lambang Kesultanan Samudera Pasai

Dikutip dari BeritaSatu.com²⁰, lambang Kesultanan Samudera Pasai dirancang oleh Sultan Samudera Pasai Sultan Zainal Abidin. Lambang burung itu bermakna syiar agama Islam yang luas, berani, dan bijaksana. Lambang tersebut berisi kalimat tauhid dan rukun Islam. Kepala burung bermakna *basmallah*, sayap dan kakinya berisi dua kalimat syahadat. Perisai yang berada di depan tubuhnya berisi lima rukun Islam.

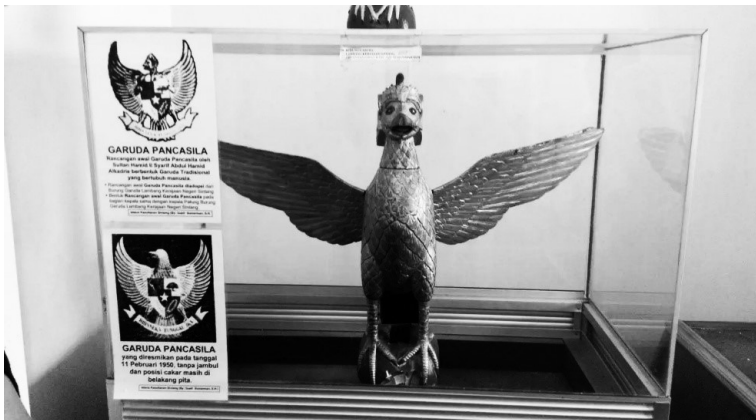
Dalam artikel yang sama, R Indra S Attahashi mengatakan bahwa lambang itu disalin ulang oleh Teuku Raja Muluk Attahashi bin Teuku Cik Ismail Siddik Attahashi yang merupakan Sultan Muda Aceh yang diangkat setelah peristiwa

²⁰ *Lambang RI Mirip Kerajaan Samudera Pasai* [Online], BeritaSatu, tersedia di: <https://www.beritasatu.com/home/76210/lambang-ri-mirip-kerajaan-samudera-pasai> [9 September 2022]

Perang Cumbok tahun 1945. Ia juga mengatakan bahwa lambang itu sudah ada dalam silsilah keluarganya lebih dari 100 tahun yang lalu. Asal usul pendiri Kesultanan Samudera Pasai sendiri adalah Al Ghazy Syarif Attahashi yang merupakan panglima pemimpin utusan Dinasti Utsmaniyah yang membantu Aceh menghadapi serangan Portugis.

KESULTANAN SINTANG

Berdasarkan surat yang dikirimkan Sultan Hamid II kepada Solichim Salam, salah satu referensi yang ia gunakan untuk merancang lambang negara adalah lambang Kesultanan Sintang. Ade Mohammad Djohan, yang pada saat itu sebagai kepala Swapraja Sintang anggota RIS, bertemu dengan Sultan Hamid II yang sedang melakukan studi komparatif untuk mencari ide mengenai rancangan lambang negara. Ade yang mengatakan bahwa lambang Kesultanan Sintang adalah burung garuda, membuat Sultan Hamid II tertarik dan terjadi diskusi intensif antar keduanya.



Gambar 3.8. Hiasan tiang penyangga gong yang dipinjam Sultan Hamid II sebagai model rancangan lambang negara (Sumber: liputan6.com)



Gambar 3.9. Lambang Kesultanan Sintang
(Sumber: Wikipedia)

Ketika Sultan Hamid II berkunjung ke Kapuas Hulu dan sengaja singgah ke Kesultanan Sintang pada Januari 1950, ia meminjam garuda yang ada di Kesultanan Sintang untuk dibawa ke Pontianak. Figur burung garuda yang dipinjam Sultan Hamid II merupakan penghias puncak penyangga tiang gantungan gong yang dibawa Patih Logender dari Majapahit. Bahkan pada saat itu, Sultan Hamid II diharuskan menandatangani semacam berita acara peminjaman yang dibatasi waktunya hingga satu bulan saja.

Lambang garuda sendiri dipilih menjadi simbol Kesultanan Sintang berdasarkan pemberian Patih Logender kepada Putri Dara Juanti. Dikutip dari Liputan6.com²¹, ketika itu, Putri Dara Juanti pergi ke Jawa untuk mencari kakaknya, Deming Nutup, yang menurut kabar ditawan oleh Kerajaan Majapahit.

21 *Kisah Cinta Patih Majapahit di Balik Lambang Burung Garuda* [Online], Rizki Gunawan, tersedia di: <https://www.liputan6.com/news/read/2192668/kisah-cinta-patih-majapahit-di-balik-lambang-burung-garuda> [9 September 2022]

Karena itu, Putri Dara Juanti menyamar sebagai laki-laki dan langsung menghadap Patih Logender untuk menyampaikan permohonan agar ia dapat membebaskan kakaknya. Untuk membuktikan bahwa Dara Juanti adalah adik Deming Nutup, Patih Logender mengajukan tes menyeberang sungai.

Ketika tes pembuktian berlangsung, identitas Dara Juanti terungkap akibat penutup rambut Dara Juanti terlepas yang membuat Patih Logender terkesima oleh kecantikan Dara Juanti. Sang patih pun meminta Dara Juanti untuk menjadi istrinya jika ingin kakaknya dibebaskan. Sang putri pun setuju dengan permintaan itu. Namun, Dara Juanti mengajukan syarat jika Patih Logender ingin meminangnya. Ia mensyaratkan sang patih harus memberikan seserahan berupa keris elok berkepala naga, tiang penyangga gong besar, seperangkat gamelan, dan 40 kepala keluarga dari tanah Jawa. Lohgender bersedia memenuhi permintaan itu. Bahkan ia menambahkan tiang penyangga gong besar yang ia bawa berkepala garuda.

Kepala garuda itulah yang kemudian menjadi inspirasi lambang Kesultanan Sintang. Hingga saat ini, figur garuda itu selalu menjadi benda sakral yang selalu diritualkan setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa 17 Agustus setiap tahunnya.

SEJARAH PENCIPTAAN LAMBANG NEGARA GARUDA PANCASILA

Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana figur garuda ditemukan dalam kisah-kisah mitologis bangsa Indonesia yang dihadirkan melalui kitab-kitab kuno dan relief-relief candi. Kita juga sudah melihat betapa beragam dan banyaknya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menggunakan figur garuda di dalam lambangnya dengan berbagai arti serta makna di balik lambang tersebut. Bagaimana dengan negara-negara lain yang juga menggunakan figur garuda atau burung sebagai lambangnya?

Jika mencoba mencari tahu melalui jejaring internet, kita akan menemukan banyak sekali negara di dunia ini yang menggunakan figur burung sebagai lambangnya. Ada sekitar 40 lebih negara di dunia ini yang menjadikan figur burung sebagai representasi dari negara dan bangsanya. Sebut saja misalnya Amerika Serikat yang menggunakan figur elang bondol sebagai lambangnya. Figur ini dipilih karena dinilai

gagah, kuat, dan memiliki umur yang panjang. Selain itu, terdapat pula Thailand yang sama-sama dengan Indonesia menggunakan figur garuda sebagai lambangnya. Figur ini dipilih karena melambangkan kebesaran raja dan simbol dari keluarga raja yang berkuasa di sana. Berikutnya adalah negara Meksiko yang menggunakan figur elang emas sebagai lambangnya. Figur ini dipilih berkaitan dengan kisah suku Aztec kuno yang melihat adegan elang memeluk ular di atas kaktus yang menyimbolkan kebenaran mengalahkan kejahatan. Di Suriah kuno, elang berlingan manusia disimbolkan menyembah matahari dan melambangkan jiwa yang abadi. Di sisi lain, dalam tradisi Yunani, figur elang diyakini dapat terbang lebih tinggi daripada burung lain, oleh karena itu ia dianggap sebagai ekspresi paling tepat untuk menggambarkan keagungan ilahi.

Lambang negara Indonesia sendiri mengalami dinamika perjalanan yang menarik untuk mewujudkan menjadi sebuah bentuk representasi dari bangsa dan negara. Para perancang-nya melalui berbagai proses dan diskusi yang alot demi menghasilkan sebuah lambang yang mampu menampilkan identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Dalam bab ini, kita akan melihat bagaimana proses lambang negara dikonsep, diusulkan, dan dirancang melalui urutan waktu sejarah bangsa Indonesia.

MASA REVOLUSI (1945)

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945, para panitia mengagendakan untuk menentukan dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, warga negara, serta rancangan Undang-Undang Dasar, bagi negara yang akan didirikan sesegera setelah kemerdekaan diperoleh. Sidang per-

tama yang diselenggarakan tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 menghasilkan konsep dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Kemudian, pada sidang kedua yang diselenggarakan tanggal 10-17 Juli 1945, dalam sidang Panitia Perancang Undang-Undang, Parada Harahap mengusulkan bahwa Indonesia memerlukan *wapen* atau lambang negara. Dalam sidang tersebut, semua peserta sidang menyetujui usulan tersebut, namun perihal lambang negara akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Istimewa.²² Dengan begitu, proses perancangan lambang negara telah dimulai sejak usulan ini diajukan oleh Parada Harahap.

MASA REPUBLIK INDONESIA (1945-1949)

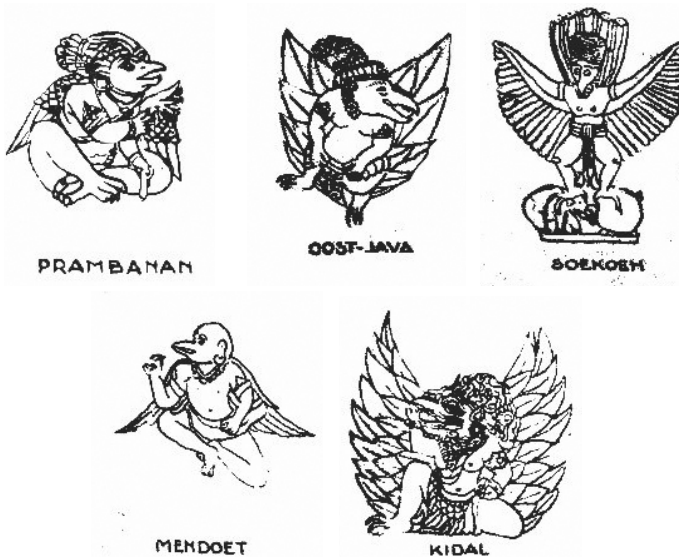
Perancangan lambang negara yang digagas pada tahun 1945 tertunda cukup lama akibat berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia pasca proklamasi. Meski begitu, memasuki akhir tahun 1948, perancangan lambang negara memasuki babak baru. Berdasarkan Penetapan Presiden no. 28 Tahun 1948, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Indonesia Raya pada tanggal 16 November 1948.²³ Tugas panitia ini adalah menetapkan undang-undang dan peraturan yang salah satunya berkaitan dengan bentuk dan cara pemakaian lambang negara Republik Indonesia. Panitia ini diketuai Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Yamin yang menjadi sekretaris umum. Anggota-anggota Panitia Indonesia Raya yang lain di

22 *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 164. Lihat juga *Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*, Mohammad Yamin, Penerbit Prapanca, 1967, hlm. 263.

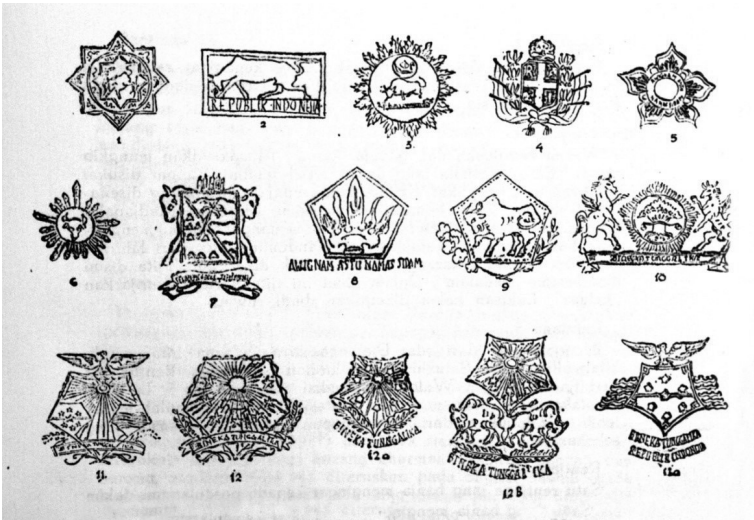
23 *Himpunan Undang-Undang, Peraturan, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1948*, Koesnodiprodjo, S.K. Seno, 1951. Lihat juga *Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949*, Nur Mas Intan Berlianan Marpaung, Arsip Nasional RI, 1995, dan *Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*, Bambang Sularto dkk, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.

antaranya, Prijono, R.M.Ng. Poerbatjaraka, Letkol. A. Latif, Abu Hanifah, Tatang Mahmud, Mapeliey Mantik, Ranti, Suhamir, Sitompoel, Koesbini, Soedarjo Tjokrosisworo, Koentjoro Poerbopranoto, Husein Moetahar, Armijn Pane, M. Tabrani, Basuki Resobowo, Oesman Effendi, Partosiswojo, dan Goesti Major.

Panitia Indonesia Raya yang telah diberi tugas, segera menyelidiki sejarah arti lambang-lambang, keberadaan merah-putih, mitologi, simbologi, arkeologi, kesusasteraan, dan simbol-simbol lain dalam peradaban bangsa Indonesia. Dari hasil penyelidikan panitia ini, salah satu simbol yang ditemukan adalah adanya simbol-simbol burung garuda di berbagai kitab dan candi di Indonesia. Basuki Resobowo,



Gambar 4.1. Sketsa simbol-simbol garuda di berbagai candi yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada Sultan Hamid II pada proses bersama Panitia Perencana Lambang Negara (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)



Gambar 4.2. Lima belas rancangan lambang negara dari seniman.
Sumber: Oesman Effendi, "Tanda Lambang Negara" dalam *Majalah Indonesia* No. 4 Tahun II, April 1954.

yang merupakan teman dekat Ki Hajar Dewantara dan murid terpandai dalam seni lukis di Perguruan Taman Siswa Jakarta, sebagai anggota panitia turut andil membantu mensketsa simbol-simbol itu.²⁴

Untuk membuka inspirasi dan kemungkinan rancangan lambang negara, pada akhir tahun 1948 ini juga pemerintah mengadakan sayembara perancangan lambang negara yang dilaksanakan oleh Prijono sebagai salah satu anggota Panitia Indonesia Raya.²⁵

Sayembara ini diikuti oleh seniman-seniman Indonesia dari SIM (Seniman Indonesia Muda), Pelukis Rakjat, PTPI (Pusat Tenaga Pelukis Indonesia), dan KPP bagian Kesenian, yang

24 *Mencari Telur Garuda (Jilid Kedua)*, Nanang R. Hidayat, I:Boekoe & Rumah Garuda, 2020.

25 *Bung Hatta Menjawab*, Mohammad Hatta & Z. Yasni, PT Gunung Agung, 1979, hlm. 108.

menghasilkan lima belas karya rancangan lambang negara.²⁶ Dalam sayembara rancangan ini, terdapat beberapa syarat yang diajukan oleh panitia²⁷, yaitu:

1. Hasrat mau hidup sebagai bangsa yang berdaulat yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia.
2. Negaranya berdasarkan Pancasila sebagai tanda kekokohan tata negara.
3. Kesadaran bahwa kepulauannya berada di persimpangan jalan dari dua benua dan dari dua samudera pada mana sifat politik kenegaraannya harus didasarkan pada politik damai aktif.
4. Negaranya lahir dengan perebutan kekuasaan dari tangan penjajah dan pada ketika Perang Dunia II berakhir, yaitu pada waktu bangsa-bangsa yang menang dari kaum fasis berhasrat membentuk dunia yang sanggup menjamin perdamaian.
5. Negaranya satu negara agraria dan tanahnya cukup mengandung kekayaan-kekayaan lain. Ini menimbulkan perhatian dunia luar terhadapnya.
6. Bangsa (masanya) lahir dengan sumpah mau mempertahankan tanah air dengan semangat banteng timbul semangat yang sangat digembar-gemborkan pada waktu (akan) memulai Revolusi.
7. Bangsa Indonesia ada hak sejarah hadirnya, apalagi dia telah pernah mempunyai zaman keemasan yang meliputi seluruh kepulauan seperti di zaman Majapahit.
8. Struktur dunia seharusnya adalah dari zaman baru di mana pendekatan atau perhubungan batin bangsa-bangsa akan menjadi soal yang utama.

26 *Mencari Telur Garuda (Jilid Kedua)*, Nanang R. Hidayat, I:Boekoe & Rumah Garuda, 2020.

27 Oesman Effendi, "Tanda Lambang Negara" dalam *Majalah Indonesia* no. 4 Tahun II April 1954, hlm. 23-24.

Menurut Oesman Effendi, rancangan-rancangan para seniman ini tidak ada yang berhasil menerjemahkan apa yang dibutuhkan untuk membuat lambang negara. Rancangan pertama yang dibuat oleh seniman Kerton dikomentarnya, *"djelas segala sesuatu lepas dari tudjuan jang diharapkan. Tiap-tiap detail tidak berarti."* Rancangan kedua dibuat oleh Kusnadi, rancangan ketiga dan keempat tidak disebutkan oleh Effendi dalam artikelnya. Untuk rancangan ketiga, Effendi berkomentar, *"banjak melihat kepunjaan radja-radja di Barat. Djiwa keradjaan dan heraldik tak tjotjok dengan djiwa Republik Indonesia."* Untuk rancangan keempat, komentarnya adalah, *"...kandungan tjita dari lahirnja Republik diabad sekarang tak sedikitpun diketemui ... Dalam abad ini tjita harus dipantjarkan "keluar"..."*. Rancangan kelima dibuat oleh Djajanegara dan menurut Effendi gambar ini *"tak berbitjara apa-apa"*. Sementara itu untuk rancangan keenam dan ketujuh, Effendi juga tidak menyebutkan siapa pembuatnya dan hanya memberi komentar, *"satu rentjana jang hanja mengingat kepada perdjungan revolusi. Sifat lentjana lebih tjotjok untuk satu lentjana badan pemberontakan"* dan *"... Pengaruh wapen radja-radja Barat dan bentuk wapen jang pernah ada dizaman Hindia-Belanda ... Garis kesatuan tidak ada. Devies "sekali merdeka, tetap merdeka" adalah djanggal"*.

Rancangan kedelapan berasal dari Djajanegara juga, yang menurut Effendi memaksakan untuk mengawinkan kekuonan dan kebaruan. Rancangan kesembilan datang dari Suromo Warna, yang menurut Effendi sederhana, namun menghindarkan arti keluasan. Kemudian rancangan kesepuluh sampai dua belas dengan varian-variannya adalah rancangan Abdulsalam. Rancangan Abdulsalam ini menarik, karena ia dengan konsisten menyematkan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam komentarnya terhadap rancangan-rancangan

Abdulsalam, Effendi banyak menjelaskan soal-soal teknis. Menurutnya rancangan ini *"diusahakan melepaskan diri dari sentiment perjuangannya sekarang. Dan mengedjar tjita negara sebenarnya. Satu rentjana yang hampir diluar dugaan umum. Karena itu kemungkinan banjak akan ditolak."*²⁸

MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949-1950)

Konferensi Meja Bundar resmi dibuka pada 23 Agustus di Ridderzaal, Den Haag, Belanda, dan berlangsung hingga 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh Delegasi RI, Delegasi Belanda, serta perwakilan UNCI. Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa keputusan, antara lain sebagai berikut: (1) Penyerahan Kedaulatan Republik Indonesia dari Pemerintah Belanda kecuali Irian Barat; (2) Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun; (3) Dibentuknya sebuah Uni Belanda-Indonesia, Republik Indonesia Serikat (RIS); (4) Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat; (5) Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat; (6) Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Desember 1949.

Pada 14 November 1949, Delegasi RI yang diketuai Moh. Hatta tiba di Yogyakarta dengan membawa hasil-hasil KMB. Namun, tidak serta merta hasil-hasil KMB dapat diterima oleh Republik Indonesia, terutama para anggota KNIP, militer dan masyarakat luas. Mengantisipasi hal tersebut, Menteri Koordinator Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX lantas mengadakan "Konferensi Militer" di Yogyakarta pada 15 November 1949. Konferensi yang dihadiri oleh para Komandan

28 Ibid., hlm. 27-29.

dan Gubernur Militer Jawa dan Sumatera ini bertujuan mempersiapkan diri terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi akibat hasil-hasil KMB. Pun demikian dengan Kementerian Penerangan, mereka menggelar “Konferensi Besar” di Yogyakarta pada 30 November – 1 Desember 1949. Konferensi ini bertujuan memberi informasi kepada masyarakat dan dunia luar mengenai hasil-hasil KMB.

Setelah hasil-hasil KMB disosialisasikan, KNIP lalu mengadakan Sidang Pleno ke-VI di Gedung Sitihiinggil Kraton Yogyakarta pada 7 – 15 Desember 1949. Sidang yang dibuka secara resmi oleh Presiden Sukarno tersebut secara khusus membahas hasil-hasil KMB. Dalam pemungutan suara, sebanyak 236 suara setuju dengan hasil KMB, sedangkan 62 suara menentang. Akhirnya Sidang Pleno KNIP resmi ditutup dengan menghasilkan keputusan menerima hasil-hasil KMB.

Pada 17 Desember 1949, sebagai calon tunggal, Ir. Sukarno dilantik menjadi presiden pertama Republik Indonesia Serikat (RIS) di Gedung Sitihiinggil Kraton Yogyakarta. Selanjutnya Kabinet RIS pertama dibentuk pada 20 Desember 1949. Moh. Hatta terpilih sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri. Sedangkan jabatan menteri-menteri negara, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Menteri Pertahanan), Ide Agung Gde Agung (Menteri Dalam Negeri), Mr. Syafrudin Prawiranegara (Menteri Keuangan), Ir. Djuanda (Menteri Kemakmuran), Ir. Laoh (Menteri Perhubungan, dan Pekerjaan Umum), Prof. Mr. Dr. Soepomo (Menteri Kehakiman), Dr. Abu Hanifah (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), Dr. J. Leimena (Menteri Kesehatan), Mr. Wilopo (Menteri Perburuhan), Mr. Kosasih (Menteri Sosial), H. Abdul Wachid Hasyim (Menteri Agama), Arnold Mononutu (Menteri Penerangan), sedangkan Menteri Negara dijabat Sultan Hamid II, Mr. Moh Roem, dan Dr. Soedarmo.

Setelah itu, pada 23 Desember 1949, rombongan Delegasi RIS yang diketuai Perdana Menteri Moh. Hatta bertolak ke Belanda untuk menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana. Pada tanggal 27 Desember 1949, pukul 10.17 (waktu Belanda), Ratu Juliana membubuhkan tandatanganannya di Akta Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat dalam sebuah upacara protokol yang diadakan di Istana Kerajaan Belanda "*Het Paleis op de Dam*", Amsterdam. Pada hari yang sama, pukul 17.45, di Istana Lapangan Merdeka, wakil Belanda H.V.K. Lovink dan wakil RIS, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menandatangani Akta Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, di Yogyakarta, Mr. Asaat diambil sumpahnya sebagai Pemangku Jabatan Sementara (*acting*) presiden Republik Indonesia, dan Prawoto Mangkusasma sebagai Wakil Ketua KNIP RI. Dengan terbentuknya RIS, kemudian ibukota dipindahkan lagi ke Jakarta. Pada 28 Desember 1949, sekitar pukul 10.00 pagi, rombongan Presiden Sukarno "boyongan" meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta.

Perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan pada pemerintahan Indonesia tersebut, dari sistem pemerintahan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, membuat tugas Panitia Indonesia Raya otomatis terhenti. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk kepanitiaan baru untuk merancang lambang negara.

Pada 20 Desember 1949, berdasarkan Keputusan Presiden RIS no. 2 Tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio.²⁹ Ia mendapat tugas khusus dari Presiden Sukarno untuk merencanakan, meran-

29 Menteri Negara tanpa portofolio, menteri pemerintahan yang tidak mengepalai kementerian tertentu dan tidak memiliki tugas yang terbatas pada bidang tertentu.

cang, dan merumuskan bentuk gambar lambang negara, serta menyiapkan gedung parlemen.³⁰ Kemudian pada tanggal 10 Januari 1950, pada sidang kedua kabinet RIS, untuk membantu tugas Sultan Hamid II dibentuk Panitia Perencana Lambang Negara Republik Indonesia Serikat yang diketuai oleh Mohammad Yamin dan beranggotakan antara lain Ki Hajar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, Raden Mas Ng. Poerbatjaraka.³¹ Panitia ini bertanggung jawab dan dikoordinatori oleh Sultan Hamid II selaku Menteri Negara. Secara khusus, panitia ini ditugasi untuk menyeleksi usulan-usulan rancangan lambang negara yang akan dipilih dan diminta menyelesaikan pekerjaannya sesegera mungkin setelah rancangan yang dipilih diperiksa oleh *ahli heraldik*³² sebelum disampaikan kepada Dewan Menteri RIS serta disetujui oleh DPR dan Senat.

Maka, setelah itu, untuk merealisasikan sidang kabinet tersebut, berbagai data yang mendukung perancangan lambang negara dihadirkan, termasuk usulan-usulan rancangan lambang negara hasil sayembara yang pernah diadakan oleh Panitia Indonesia Raya. Sayangnya, menurut Sultan Hamid II *"tidak ada satupun dari para pelukis jang memenuhi prinsip-prinsip hukum pembuatan lambang menurut semiologi untuk dijadikan sebagai lambang negara RIS demikian pendjelasan Menteri Prijono."*³³ Oleh karena itu,

30 *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 165.

31 Disebut pula Panitia Lencana Negara, lihat *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1989, hlm. 63-65. Disebut pula Panitia Lambang Negara oleh Sultan Hamid II, lihat *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 168. Dalam hal ini, buku ini menggunakan nama resmi Panitia Perencana Lambang Negara, berdasarkan Keputusan Presiden RIS no. 21 tahun 1950.

32 Ahli lambang dan simbologi.

33 *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 16.

Presiden
Republik Indonesia Serikat

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No.21 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : perlu membentuk sebuah Panitia untuk membuat Rentjana Lambang Negara (Staatswapen) Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat : Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 3 ayat 3;
- Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat yang ke-2 pada tanggal 10 Djanuari 1950.

M e m u t u s k a n :

- I. Membentuk sebuah "Panitia Perentjana Lambang Negara Republik Indonesia Serikat" yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II dan terdiri atas :
- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Mr. Mohammad Yamin | sebagai Ketua, |
| 2. Ki Hadjar Dewantara | sebagai Anggota, |
| 3. J. Pelupessy | sebagai Anggota, |
| 4. Mohammad Natsir | sebagai Anggota, |
| 5. Dr. Poerbodjaroko | sebagai Anggota. |
- II. Memerintahkan kepada Panitia tersebut dalam sub I supaya menyelesaikan pekerjaannya pada akhir bulan ini dan setelah diperiksa oleh seorang ahli heraldik menjampaikan rentjannya kepada Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat yang kemudian dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk disahkan.
- III. Semua bea yang dikeluarkan oleh Panitia itu diberatkan kepada anggaran belandja Sekretariat Persana Menteri Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1950.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO).

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1950.

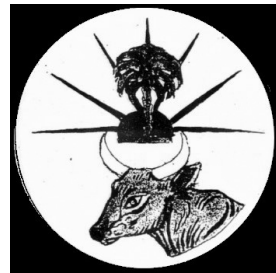
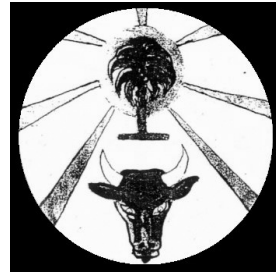
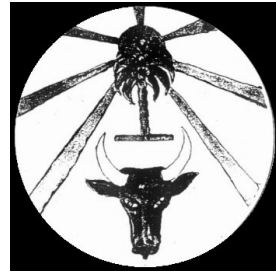
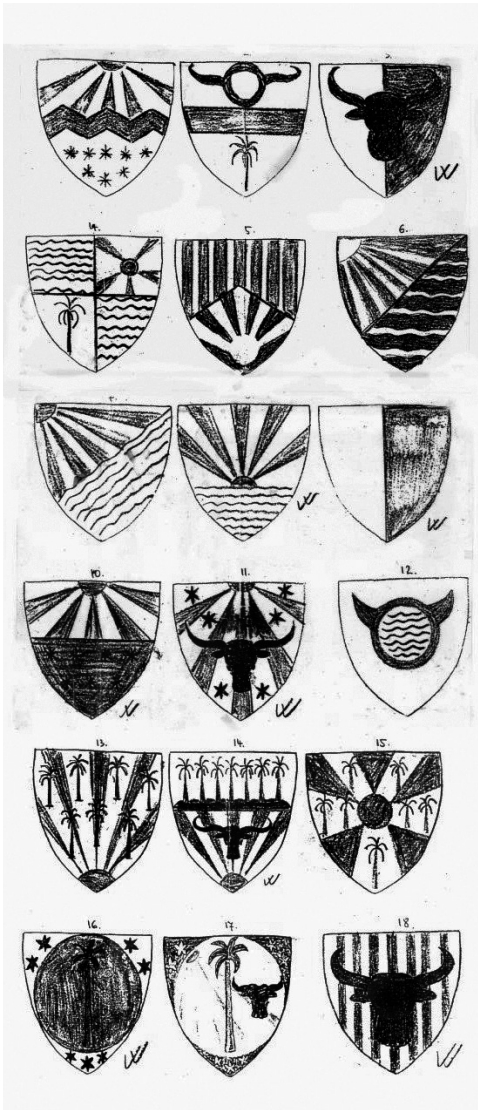
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

Mr. A. K. Pringgodigdo
(Mr. A. K. PRINGGODIGDO).

PERDANA MENTERI,

Moehammad Hatta
(MOHAMMAD HATTA).

Gambar 4.3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Panitia Perencana Lambang Negara (Sumber: anri.sikn.go.id)



Gambar 4.4. Rancangan lambang negara yang diusulkan oleh Mohammad Yamin (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

Sultan Hamid II berinisiatif mempersiapkan usulan rancangan lambang negaranya sendiri. Selaku ketua Panitia Perencanaan Lambang Negara, Mohammad Yamin pun turut serta mengusulkan rancangan lambang negaranya sendiri.

Meskipun Mohammad Yamin pernah menjadi sekretaris Panitia Indonesia Raya yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan menemukan berbagai simbol garuda dalam penelitiannya, tampaknya Yamin dalam rancangannya menggunakan simbol-simbol dari sumber yang lain. Terlihat dari unsur-unsur alam yang ia tampilkan di dalam usulannya, Yamin seperti mengambil inspirasi unsur yang muncul dalam lambang panji Indonesia Moeda yang juga dulu sempat ia dirikan tahun 1930. Begitu pula dengan lambang banteng yang muncul dalam usulan-usulannya, kemungkinan terinspirasi dari lambang Perhimpoean Indonesia (PI) yang menggunakan lambang kerbau atau lambang Partai Indonesia (Partindo) yang sempat ia ikuti pula, menggunakan banteng sebagai lambangnya.

Berbeda dengan Mohammad Yamin, Sultan Hamid II menggunakan bahan-bahan dari Panitia Indonesia Raya yang direkomendasikan oleh Ki Hajar Dewantara di akhir Januari 1950. Pada tanggal 26 Januari 1950, Ki Hajar Dewantara mengirimkan surat kepada Sultan Hamid II melalui Dewan Menteri RIS, Z. Yahya, yang menjelaskan ketidakhadirannya dalam rapat Panitia Perencanaan Lambang Negara.³⁴ Menyusul kemudian pada tanggal 31 Januari 1950, Ki Hajar Dewantara kembali mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai anggota Panitia Perencanaan Lambang Negara disertai bahan-bahan yang diperoleh oleh Panitia Indonesia Raya yang dulu ia ketuai,³⁵

34 *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 146-147.

35 *Indeks Beranotasi Karya Ki Hadjar Dewantara*, Mona Lohanda (ed.), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm. 119.



**Gambar 4.5. Sketsa rancangan lambang negara Sultan Hamid II
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)**

termasuk di dalamnya sketsa relief garuda yang dibuat oleh Basuki Resobowo.³⁶

Sultan Hamid II baru mendapat ide untuk mengusulkan figur garuda sebagai lambang negara setelah berdiskusi dengan Ade Mohammad Djohan, seorang kepala Swaparaja Sintang yang juga anggota parlemen RIS.³⁷ Selain mengusulkan burung Ruai untuk dijadikan model lambang negara, Ade juga mengatakan bahwa lambang Kesultanan Sintang adalah burung garuda.³⁸ Sultan Hamid II tertarik dengan ide tersebut dan memutuskan untuk merancang lambang negara meng-

³⁶ Lihat Gambar 4.1.

³⁷ Massuka Djanting dalam *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 369-370.

³⁸ Lihat *Museum Dara Djuanti* [Online], tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Dara_Juanti [9 Oktober 2022]

gunakan figur garuda berdasarkan sketsa figur garuda dari Ki Hajar Dewantara dan lambang Kerajaan Sintang sebagai pembandingnya.³⁹

Sesuai pesan Presiden Sukarno kepada Sultan Hamid II, bahwa lambang negara Indonesia hendaknya mencerminkan pandangan hidup bangsa, dimana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara yang sedang dirancang. Beberapa anggota Panitia Perencana Lambang Negara mencoba mengajukan berbagai simbol yang dianggap mampu merepresentasikan setiap sila dari Pancasila hingga menjadi seperti sekarang ini. Dalam surat yang Sultan Hamid II kirimkan kepada Solichim Salam⁴⁰, ia memaparkan siapa saja tokoh-tokoh yang memberikan usul mengenai simbol-simbol Pancasila di dalam perisai lambang negara.

Mohammad Natsir memberikan masukan untuk meletakkan Nur (cahaya) berbentuk Bintang bersudut lima di tengah perisai sebagai simbol sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Sultan Hamid II mengusulkan Rantai untuk menggambarkan sila kemanusiaan yang terinspirasi dari kalung Dayak berbentuk bulatan dan kotak sebagai simbol yang melambangkan laki-laki dan perempuan, ekspresi regenerasi yang tak terputus.

Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka memberikan masukan untuk menggambarkan



39 *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konferensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 17.

40 *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konferensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 18-19.

Pohon Astana sebagai lambang sila ketiga, yaitu pohon besar sejenis pohon beringin yang hidup di depan istana, melambangkan pengayoman dan perlindungan, sekaligus menjadi simbol menyatunya rakyat dengan istana.

Mohammad Yamin mengusulkan gambar Kepala Banteng untuk merepresentasikan sila keempat yang melambangkan kerakyatan atau tenaga rakyat.



Ki Hajar Dewantara dalam proses perancangan lambang negara banyak memberikan masukan, di antaranya adalah gambar Padi-Kapas sebagai simbol sila kelima yang melambangkan ketersediaan sandang dan pangan yang merupakan simbol tujuan kemakmuran bangsa.

Masih dalam surat tersebut, Sultan Hamid menyebutkan bahwa, *"...saja selaku pribadi mempersiapkan gambar lambang negara dengan berkonsultasi [pada] seorang ahli lambang/semiologi berkebangsaan Perantjis jang kebetulan sahabat dekat saja saudara Dirk Rühl, Jr. , dan beliau djuga saja perkenalkan Mr. M. Yamin selaku Ketua Panitia Lambang Negara ketika RIS sekitar pertengahan Djanuari 1950 untuk memberi masukan djuga."*⁴¹

Merujuk pada kutipan surat di atas, besar kemungkinan selain berkonsultasi, Sultan Hamid II juga meminta Dirk Rühl, Jr. menggambar sketsa rancangan lambang yang sudah ia buat ke dalam bentuk desain.⁴² Beberapa usulan rancangan

41 Ibid., hlm. 16

42 Berdasarkan latar belakang Sultan Hamid II yang hanya berkuliah satu tahun di THS dan lebih banyak menghabiskan sebagian besar karirnya di bidang kemiliteran Belanda dan belum ditemukan data yang menunjukkan kemampuan Sultan Hamid II dalam bidang menggambar. Lihat *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 1-9.



Gbr 4.6. Usulan 1



Gbr 4.7. Usulan 2



Gbr 4.8. Usulan 3



Gambar 4.9. Usulan 4. Sila Ketuhanan YME belum hadir dalam perisai Pancasila. (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)



Gambar 4.10. Rancangan Lambang Negara dengan bentuk tubuh antropomorfis (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)



Gambar 4.11. Rancangan Lambang Negara dengan bentuk tubuh antropomorfis yang sudah diubah pitanya (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

lambang negara segera diajukan kepada Panitia Perencana Lambang Negara.

Dialog intensif antara Sultan Hamid II, Perdana Menteri Mohammad Hatta, dan Presiden Sukarno terus dilakukan hingga terjadi kesepakatan mereka bertiga untuk mengganti pita merah-putih menjadi pita putih bertuliskan seloka Empu Tantular berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika.”⁴³ Hingga terbentuklah rancangan seperti ditunjukkan gambar 4.10 dan 4.11.

43 U'un Mahdar Asmadi dalam *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara*, Ansari Dimiyati dkk, TOP Indonesia, 2013, hlm. 195.



Gambar 4.12. Lambang Kerajaan Samudera Pasai.
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

Pada awal Februari 1950, didapatkan bentuk lambang negara dengan figur garuda setengah manusia yang memegang perisai dengan simbol-simbol Pancasila di atasnya. Namun, rancangan lambang negara ini mendapat tentangan keras dari Mohammad Natsir. Ia berpendapat bahwa lambang negara berbentuk manusia setengah burung (antropomorfis) terlalu bersifat feodal dan mitologis.

Temuan lambang Kerajaan Samudera Pasai (berangka tahun 1267) yang memiliki bentuk dasar (*shape*) sangat mirip Lambang Negara kita saat ini membuka ruang kajian baru terkait kronologi perancangannya. Kalau memang lambang ini akurat keabsahannya maka bisa jadi Mohammad Natsir yang membawa lambang ini ke meja Panitia Perencana Lambang Negara.⁴⁴

44 Mengingat prinsip keislaman Natsir yang kuat, sebagai ketua Masyumi, dan menentang penggunaan makhluk hidup dalam bentuk gambar atau patung.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat no. 72 Tahun 1950, pemerintah menghentikan dengan hormat atas permohonan sendiri keanggotaan Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Natsir dari Panitia Perencana Lambang Negara pada 3 Februari 1950. Ini berarti bahwa sejak tanggal tersebut, dua orang panitia tidak lagi terlibat dalam diskusi perancangan lambang negara.

Namun, keberatan Mohammad Natsir terhadap bentuk antropomorfis rancangan lambang negara ditanggapi secara serius oleh Sultan Hamid II. Ia mencoba melakukan studi banding dengan melihat lambang-lambang negara lain yang menggunakan figur burung sebagai lambangnya. Ia melihat bahwa banyak negara-negara Eropa dan Asia Barat Daya yang menggunakan figur elang rajawali sebagai lambang.



Gambar 4.13. Lambang-lambang negara Syria, Polandia, dan Mesir
(Sumber: Wikipedia)

Pada rapat Panitia Perencana Lambang Negara tanggal 8 Februari 1950, R.M.Ng. Poerbatjaraka mengkritisi rancangan lambang negara usulan Sultan Hamid II. Ia mengkritisi ekor garuda yang berjumlah 7 helai. Padahal usul jumlah 7 helai ekor garuda ini diusulkan oleh Mohammad Yamin untuk menggambarkan kesempurnaan tata negara. M.A. Pellaupessy kemudian mengusulkan perubahan pada jumlah bulu ekor



Gambar 4.14. Perubahan jumlah bulu ekor pada rancangan lambang negara dari tujuh helai menjadi delapan helai (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

garuda tersebut menjadi delapan helai. Ia menghitung bahwa jumlah bulu terluar pada masing-masing sayap garuda sudah berjumlah 17, sehingga jika jumlah bulu ekor diubah menjadi delapan helai, jumlah bulu pada sayap dan ekor akan menjadi candrasengkala tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia.⁴⁵

Sultan Hamid II kemudian merevisi rancangan lambang negara usulannya berdasarkan keberatan dan masukan dari anggota-anggota Panitia Perencana Lambang Negara atas inisiatifnya sendiri.⁴⁶ Ia mengubah bentuk antropomorfis garuda menjadi bentuk elang realistik.

45 Jumlah bulu sayap garuda pada relief di candi-candi di Indonesia berjumlah 17 dan jumlah bulu primer pada burung elang rata-rata antara 17-19 helai. Artinya jumlah 17 helai bulu sayap garuda rancangan lambang negara sejak awal tidak dirancang menjadi angka filosofis yang menggambarkan tanggal kemerdekaan. Lihat surat Sultan Hamid II kepada Solichim Salam dalam *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konperensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 20.

46 Ibid., hlm. 20-21.

Dua hari kemudian, 10 Februari 1950, usulan rancangan lambang negara dari Sultan Hamid II dan Mohammad Yamin diserahkan kembali kepada Panitia Perencana Lambang Negara. Hasil-hasil rancangan itu kemudian diserahkan kepada Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta untuk dibawa ke pemerintah dan Sidang Parlemen RIS untuk dipilih. Dalam sidang parlemen, usulan Sultan Hamid II yang terpilih, sedangkan usulan Mohammad Yamin ditolak. Menurut Mohammad Hatta penolakan terhadap rancangan lambang negara usulan Mohammad Yamin itu *"karena disana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruh Jepang."*⁴⁷

Dalam Sidang RIS tanggal 11 Februari 1950, yang dipimpin oleh Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta, rancangan lambang negara yang diajukan oleh Panitia Perencana Lambang Negara diresmikan. Sultan Hamid II menyatakan kepada Solichim Salam,

... alhamdulillah gambar rantjangan saja jang diterima 10 Februari 1950 ... jang kemudian pada rapat Parlemen RIS bersama Pemerintah ditetapkan oleh Parlemen RIS sebagai Lambang Negara RIS pada tanggal 11 Februari 1950 ...⁴⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh Mohammad Hatta dalam wawancaranya bersama Z. Yasni. Ia menyatakan,

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno, setelah kita merdeka, semboyan itu kemudian diperkuat dengan lambang yang dibuat oleh Sultan

47 Ibid., hlm. 21. Lihat juga *Bung Hatta Menjawab*, Mohammad Hatta & Z. Yasni, PT Gunung Agung, 1979, hlm. 108.

48 *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konferensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 21.

Hamid Pontianak dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950.⁴⁹

Sejalan dengan pernyataan Mohammad Hatta, Soepomo juga memaparkan dalam tulisannya,

Ichtisar Parlemen, 17 Februari 1950 nomor 2 memuat berita negara, bahwa sidang Dewan Menteri R.I.S. tanggal 11 Februari 1950 telah mengesahkan Lambang Negara R.I.S. yang direntjanakan oleh Panitia Lambang Negara menurut bagian III pasal 3 Konstitusi R.I.S. Gambarnya lambang negara tersebut adalah dimuat dalam ichtisar Parlemen tersebut.⁵⁰

Lambang negara RIS yang dimaksud di atas adalah lambang negara yang bentuk kepalanya masih "gundul dan tidak berjambul," belum berbentuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini, A. G. Pringgodigdo menyatakan,

Berdasarkan atas pasal 3 Konstitusi itu (RIS) pada tanggal 11 Februari 1950 Pemerintah RIS telah menetapkan lambang negara, yang berupa lukisan burung Garuda dan Perisai, yang terbagi dalam 5 ruang yang mengingatkan kepada Pancasila. Pada waktu itu burung Garuda kepala 'gundul,' tidak pakai 'jambul.' Hal ini berubah dalam Lambang Negara Republik Indonesia Kesatuan, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tanggal 17 Oktober 1951 Nomor 66 Tahun 1951.⁵¹

49 *Bung Hatta Menjawab*, Mohammad Hatta & Z. Yasni, PT Gunung Agung, 1979, hlm. 108. Kalimat "Bhinneka Tunggal Ika" dicetuskan pertama kali oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma, Sukarno yang kemudian mempopulerkannya dan mengusulkan dituliskan dalam pita putih yang dicengkeram oleh Garuda dalam lambang negara.

50 *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Prof. Dr. R. Soepomo, Noordhoff-kolff N.V., 1954, hlm. 25.

51 *Sekitar Pancasila*, A.G. Pringgodigdo, Balai Penelitian IKIP, 1970.



**Gambar 4.15. Rancangan Lambang Negara dengan bentuk kepala gundul dan arah cakar terbalik
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)**

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa inilah tanggal pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki lambang negara, yang sosoknya berupa Garuda berbentuk elang realis dan berkalungkan perisai berisi simbol-simbol Pancasila serta mencengkeram pita putih bertuliskan seloka *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pada tanggal 15 Februari 1950, Presiden Sukarno untuk pertama kalinya memperkenalkan lambang negara di Hotel Duta Indonesia Jakarta. Sebelumnya, hotel ini adalah Hotel Des Indes Batavia yang pasca kemerdekaan diakuisisi oleh Indonesia tanpa kompensasi. Pada tahun 1970-an, hotel ini dirubuhkan untuk keperluan pembangunan jalan Mall Duta Indah.

Pada tanggal ini pula, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat no. 72 Tahun 1950



Gambar 4.16. Hotel Des Indes, Batavia [Hotel Duta Indonesia, Jakarta].
(Sumber: wikipedia)

mengenai pembubaran Panitia Perencana Lambang Negara. Dalam surat ini terlihat bahwa Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Natsir sudah tidak menjadi anggota Panitia Perencana Lambang Negara sejak 3 Februari 1950. Panitia Perencana Lambang Negara yang terdiri atas Mohammad Yamin, sebagai ketua, Pellaupessy dan Poerbatjaraka sebagai anggota dihentikan tugasnya sebagai panitia sejak 15 Februari 1950 karena tugasnya sudah selesai.

Mundurnya Ki Hajar Dewantara dan Mohammad Natsir dari kepanitiaan disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing dalam kegiatan. Ki Hajar Dewantara dalam suratnya kepada Sultan Hamid II tertanggal 31 Januari 1950, ia menyatakan mundur dari kepanitiaan yang disebabkan oleh kesibukannya bersama Taman Siswa di Yogyakarta.⁵² Di sisi lain, Mohammad Natsir pun menyatakan mundur dari kepanitiaan yang kemungkinan besar disebabkan oleh kesibukan-

⁵² *Indeks Beranotasi Karya Ki Hadjar Dewantara*, Mona Lohanda (ed.), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, hlm. 119.

nya bersama Masyumi sejak 1949 dan menjadi anggota pembentuk kabinet Republik Indonesia sejak awal Januari 1950.⁵³

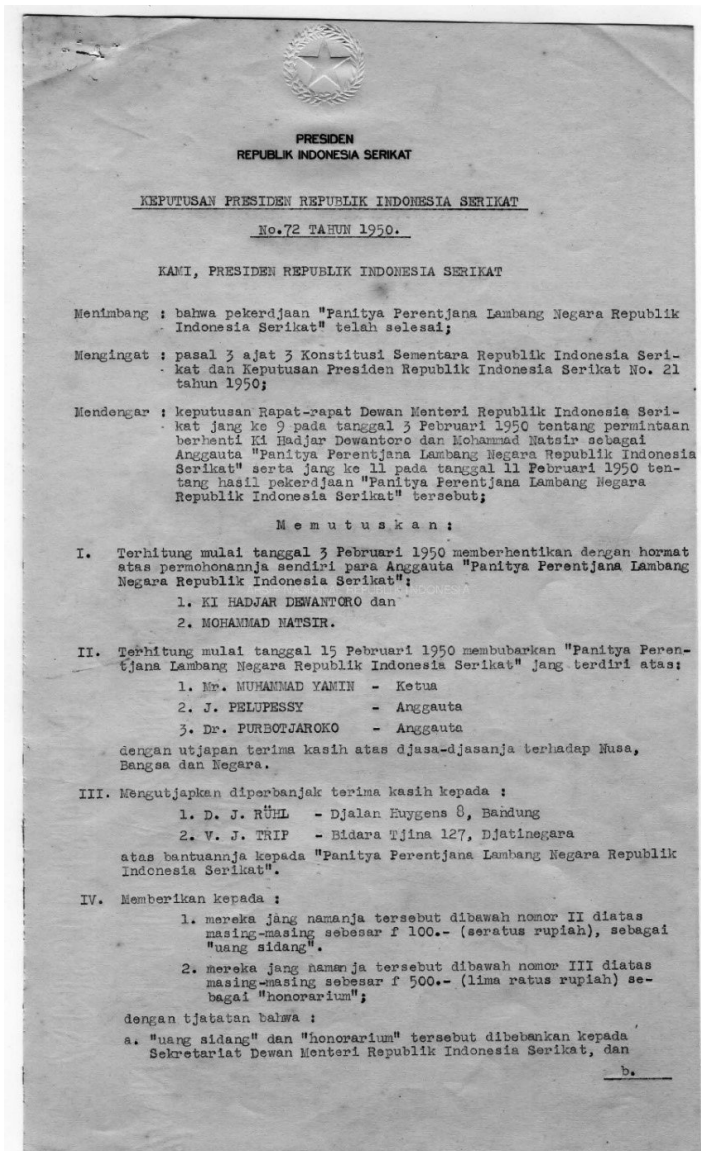
Pada surat ini pula terdapat ucapan terima kasih kepada dua orang, yaitu Dirk J. Rühl dan V.J. Trip yang sudah membantu selama proses perancangan lambang negara. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Dirk Rühl memang sejak awal sudah membantu Panitia Perencana Lambang Negara sebagai “ahli heraldik” yang diminta pemerintah memeriksa rancangan lambang negara sebelum diserahkan kepada Dewan Menteri RIS.⁵⁴ Namun nama V.J. Trip sendiri belum ditemukan keterangan siapa dan apa perannya dalam membantu Panitia Perencana Lambang Negara.

Dengan begitu, tugas Panitia Perencana Lambang Negara Republik Indonesia Serikat telah selesai dalam memenuhi perintah presiden dan menteri negara dalam membantu merancang lambang negara.

Pada tanggal 20 Februari 1950, lambang negara yang telah disetujui dan diperkenalkan kepada publik, telah terpasang di ruang sidang gedung parlemen Istana Merdeka Pejambon yang diresmikan oleh Sukarno. Namun, saat berpidato di sana, ia melihat bahwa lambang negara yang ada di belakang podium ruang sidang itu nampak “kurang gagah” karena kepalanya “tidak berjambul” sehingga terlihat “gundul” dan cakarnya terbalik.

53 Republik Indonesia yang dimaksud adalah salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Mr. Asaat sebagai “Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia” dan beribukota di Yogyakarta. Tanggal 4 Januari 1950, Mr. Asaat mengangkat tiga orang untuk membentuk kabinet, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir, dan Dr. Halim. Pergerakan Mohammad Natsir yang memperjuangkan bentuk satu negara kesatuan berpuncak pada pidatonya tanggal 3 April 1950 yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir. Lihat Nugroho Dewanto, *Seri Buku Saku Tempo: Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim*, Jakarta: Tempo, 2017, hlm. 31.

54 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat no. 21 Tahun 1950 pada Gambar 4.3.



Gambar 4.17. Keputusan Presiden RIS No. 72 Tahun 1950 tentang pembubaran Panitia Perencana Lambang Negara (Sumber: anri.sikn.go.id)



Gambar 4.18. Presiden Sukarno duduk di ruang sidang gedung parlemen Istana Merdeka Pejambon. Terlihat lambang negara yang masih terlihat “gundul” dan cakarnya terbalik.
(Sumber: anri.sikn.go.id)

Presiden Sukarno segera memerintahkan Sultan Hamid II untuk menyempurnakan bentuk kepala garuda yang terlihat “gundul” dengan menambahkan jambul seperti bentuk alamiah burung elang rajawali khas Indonesia dan mengubah arah cakar garuda menjadi ke depan. Untuk keperluan itu, Sultan Hamid II meminta bantuan Dullah, yang pada saat itu menjadi pelukis di Kementerian Penerangan, untuk melukis ulang lambang negara berdasarkan arahan darinya. Sesudah lambang negara itu diperbaiki, Sultan Hamid II menyerahkannya kembali kepada Presiden Sukarno.⁵⁵

Akan tetapi, tampaknya Kementerian Penerangan tidak memerintahkan Dullah untuk merevisi lambang negara, melainkan pelukis lain. Keterangan ini dapat dilihat dari tulisan Dullah sendiri dalam majalah *Minggu Merdeka* yang hanya diperintahkan mengubah jari kaki Garuda sehari setelah tiba di Jakarta.⁵⁶ Jika Dullah juga pernah merevisi kepala garuda, tentu ia akan memberikan kesaksian bahwa ia tidak hanya merevisi cakar garuda saja.

Kemudian, lambang negara hasil revisi Kementerian Penerangan itu sepertinya sudah bocor duluan sebelum sempat dikoreksi oleh presiden. Rancangan lambang negara yang dilukis oleh pelukis lain itu sudah muncul dalam majalah mingguan *Lukisan Indonesia* yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan yang pada saat itu masih berposisi di Yogyakarta.

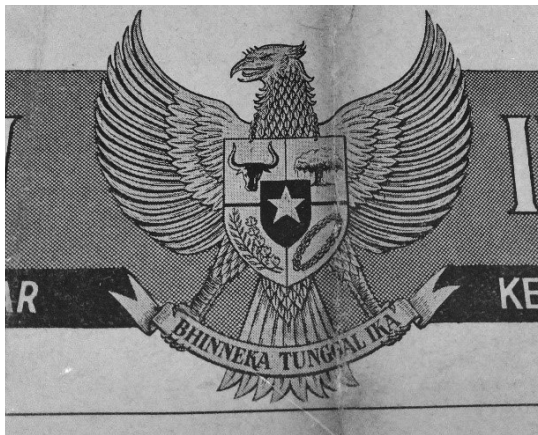
Presiden Sukarno nyatanya tidak puas dengan hasil revisi ini. Meskipun kepala garuda sudah berjambul, namun revisi

55 *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konperensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 23.

56 Dullah, “Mengubah Jari Kaki Garuda” dalam *Minggu Merdeka* 26 September 1982, lihat Agus Dermawan T, *Dongeng dari Dullah*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020, hlm. 183.

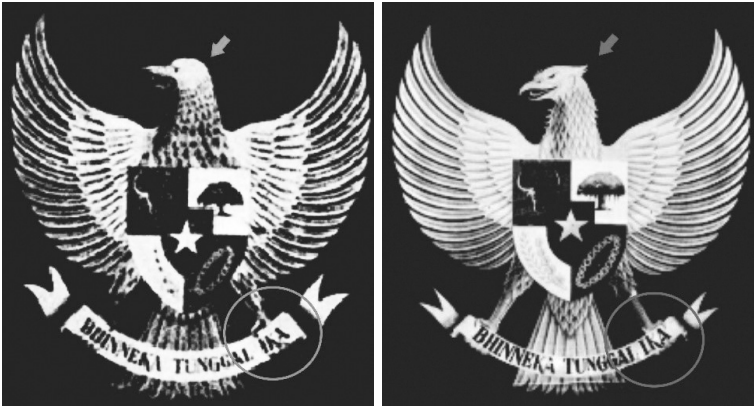


Gambar 4.19. Majalah Mingguan Bergambar Kementerian Penerangan RIS Lukisan Indonesia.



Gambar 4.20. Terlihat pada gambar cakar garuda masih terbalik (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

cakar kaki garuda masih terbalik. Revisi hanya terjadi pada kedua jempol cakar garuda yang dipindahkan dari dalam ke luar, tetapi secara keseluruhan cakar garuda masih salah. Dalam surat Sultan Hamid II kepada Solichim Salam, ia mengatakan bahwa, "*saja mentjoba mendjelaskan kepada Paduka Jang Mulia, memang begitu burung terbang*



Gambar 4.21. Kepala garuda sudah berjambul, namun cakar masih terbalik, hanya berubah posisi jempol cakarnya dari dalam ke luar.
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

membawa sesuatu seperti keadaan alamiahnya ..." Akan tetapi, Presiden Sukarno tetap meminta untuk mengubah arah cakar garuda menjadi mencengkeram pita dengan alasan berkaitan dengan prinsip "jati diri" bangsa Indonesia.⁵⁷ Oleh karena itu, atas perintah presiden, Sultan Hamid II meminta kepada Kementerian Penerangan supaya desain itu jangan sampai tersebar dulu ke seluruh negeri.

Dalam upaya mengubah arah cakar garuda yang masih salah, tampaknya Presiden Sukarno mengundang langsung Dirk Rühl, Jr. untuk datang membantu pemerintah memper-

57 Kemungkinannya, Sultan Hamid II tidak mengubah arah cakar garuda, bukan hanya karena soal teknis, melainkan juga soal ideologis. Sultan Hamid II meyakini arah cakar yang terbalik menurut Sukarno, mewakili pandangan "federalis." Namun dengan cerdasnya, Sukarno memutar-balikkan pandangan itu dengan mengatakan bahwa cakar yang mencengkeram justru mewakili perpaduan antara pandangan "federalis" dan pandangan "kesatuan" dalam negara RIS. Itu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap satu. Lihat *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konferensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 22-23.



Gambar 4.22. Lembaran berita dari Kantor Berita Antara, Bandung, 16 Maret 1950, yang menyebutkan Dirk Rühl diperintahkan oleh presiden untuk memperbaiki lambang negara
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

baik desain rancangan lambang negara.⁵⁸ Ini dapat dilihat dari lembaran Kantor Berita "Antara" yang memberitakan bahwa Dirk Rühl, Jr. mendapat undangan dari Presiden Sukarno dan Panitia Perencana Lambang Negara untuk memperbaiki bentuk kepala dan cakar garuda, kepala banteng, dan warna padi-kapas.

Pada gambar di atas, Kantor Berita “Antara” Bandung memberitakan tanggal 16 Maret 1950 bahwa Presiden Sukarno telah memerintahkan Dirk Rühl, Jr. untuk mengubah lambang negara, terutama pada bentuk jambul dan cakar kaki. Secara lengkap, berita itu tertulis seperti di bawah ini.

58 Sebelumnya, Dirk Rühl, Jr. sudah terlibat bersama Panitia Perencana Lambang Negara sebagai "ahli heraldik."

Bandung, 16/3 (Antara)

Dirk Rühl, bibliothecaric perpustakaan V & U, pentjipta lambang R.I.S. "*Bhinneka Tunggal Ika*," sedjak beberapa hari telah meninggalkan kota Bandung untuk melaksanakan perintah Presiden Sukarno dan Panitia Lambang, kabarnja untuk mengadakan perubahan atas lambang tsb, ja'ni mengenai bentuk kepala dan kakinja radjawali, disesuaikan dengan bentuk burung radjawali Indonesia. (Jang sekarang menimbulkan kesan radjawali jang digambarkan dalam lambang2 Amerika).

Djua kepala banteng akan mendapat perubahan, jaitu menurut bentuk kepala banteng Indonesia jang terdapat kira-kira 2000 tahun jl. Djuga warna padi dan kapas akan dirubah.

Menurut kabar tsb, Dirk Rühl juga akan membikin gambar untuk perangko Republik Indonesia dari berbagai harga, dan kabarnja pun sedang mempelajari pembikinan lambang buat Presiden R.I.S. serta benderanja.

Dirk Rühl adalah seorang keturunan Djerman jang kini kira2 65 tahun, dan sedjak umur 16 tahun telah mempelajari soal2 lambang sehingga mendapat penghargaan dari ahli2 kebudayaan Indonesia, misalnja Dr. Purbatjaroko, Mr. Moh. Yamin, dll.

Ia sudah lama tinggal di Indonesia dan kenal baik semua insinjurz keluaran Sekolah Insinjur Bandung, seperti Ir. Sukarno, Ir. Joh.alm., Ir. Anwari, dll.

Penyebutan Dirk Rühl sebagai "*pentjipta lambang R.I.S. Bhinneka Tunggal Ika*" dalam berita ini tidaklah tepat. Penyebutan ini kemungkinan merujuk pada keterlibatannya sebagai "ahli heraldik" yang membantu Panitia Perencana

Lambang Negara sebelumnya dan menerjemahkan sketsa Sultan Hamid II menjadi rancangan lambang negara.⁵⁹ Sedangkan penyebutan "*Panitia Lambang*" kemungkinan untuk mewakili Sultan Hamid II sebagai koordinator Panitia Perencanaan Lambang Negara.⁶⁰

Pada tanggal 20 Maret, lambang negara yang telah diperbaiki oleh Dirk Rühl diajukan kembali pada Presiden Sukarno dan langsung mendapatkan disposisi persetujuan. Presiden kemudian memanggil Dullah ke Jakarta dan memerintahkannya untuk melukis ulang gambar tersebut.⁶¹ Rupanya perintah melukis ulang tersebut bukanlah melukis ulang hasil gambar Dirk Rühl, melainkan merevisi gambar lambang negara yang dibuat oleh Kementerian Penerangan, yang kakinya masih terbalik namun bentuk kepalanya sudah benar.⁶² Bahkan Dullah sendiri mengakui bahwa ia lupa menanyakan siapa pembuat lambang negara itu pada awalnya.⁶³

Hasil lukisan Dullah itulah yang diperintahkan oleh Presiden Sukarno untuk disebarkan ke seluruh negeri. Sultan Hamid II sendiri kemudian diminta untuk membuat perbandingan skala ukuran, bentuk, dan warna lambang negara

59 Dirk Rühl juga disebut sebagai salah satu nama yang diberikan ucapan terima kasih oleh pemerintah dalam Keputusan Presiden no. 72 tahun 1950 tentang pembubaran Panitia Perencana Lambang Negara. Lihat Gambar 4.17.

60 Sebab Panitia Perencana Lambang Negara sudah dihentikan penguasaannya sejak 15 Februari 1950.

61 "Hikayat Dullah dan Bibi Fatima" dalam Gatra 24 Juni 1995, hlm. 51. "Kedekatan adalah kepercayaan. Itu yang tampak dalam hubungan Bung Karno dan Dullah. Salah satu bentuk kepercayaan itu ialah permintaan Bung Karno kepada Dullah untuk mengubah posisi kaki gambar Garuda Pancasila, yang tadinya dirancang di Kementerian Penerangan."

62 Dullah, "Mengubah Jari Kaki Garuda" dalam *Minggu Merdeka* 26 September 1982, lihat Agus Dermawan T, *Dongeng dari Dullah*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020, hlm. 183.

63 Ibid.



**Gambar 4.23. Lambang negara final yang direvisi oleh Dirk Rühl
(Sumber: Koleksi Rumah Garuda)**

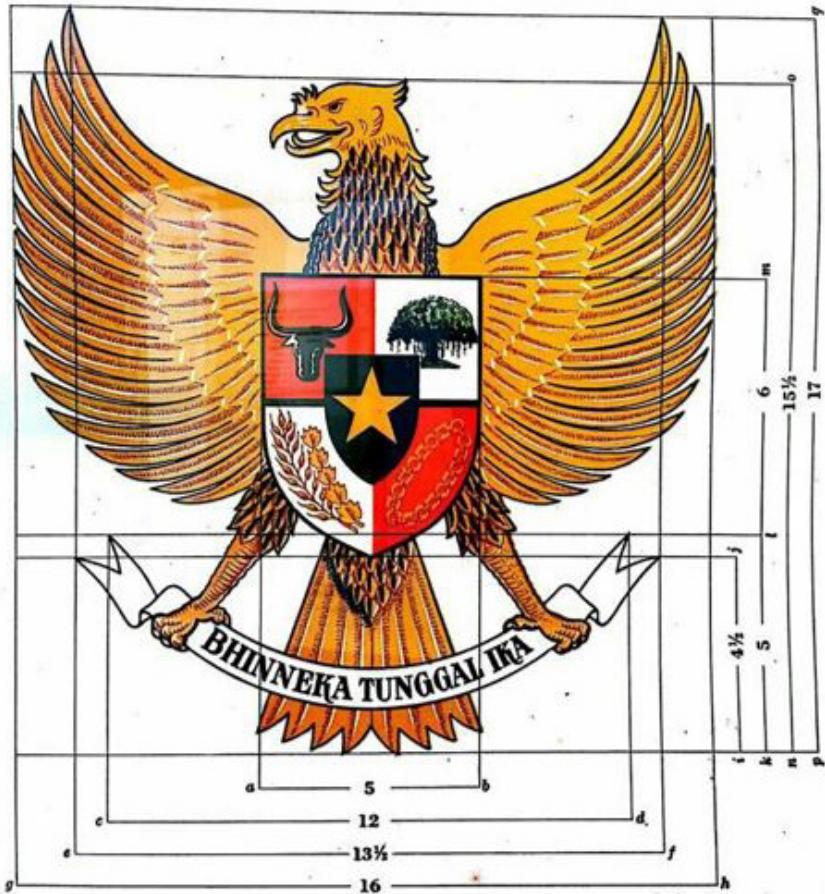
sebagai pertanggungjawaban koordinator Panitia Perencana Lambang Negara dan Menteri Negara.⁶⁴

Lembar rancangan hasil revisi Dirk Rühl ini diserahkan kepada Sultan Hamid II dengan menyertakan catatan yang mendisposisi dirinya oleh presiden untuk menetapkan lambang negara yang akan digunakan. Pada sudut kanan gambar tersebut, Presiden Sukarno menuliskan catatan kecil sebagai tanda disposisi.

J.M. Sultan Hamid Menteri Negara, menurut pendapat saja, lukisan Rühl ini membuat lambang negara kita lebih kuat karena itu saja tetapkan bahwa inilah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi beberapa ribu rupiah daripada mempunyai lambang negara yang kurang sempurna. Saja harap J.M. mengambil tindakan seperlunya conform kehendak saja. Merdeka! 20/3/'50⁶⁵

64 Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Sultan Hamid II berkoordinasi dengan Dirk Rühl, Jr. , sebagai orang yang mendesain rancangan final lambang Negara.

65 Pernyataan "*rugi beberapa ribu rupiah*" itu, menurut Sultan Hamid II, bukan untuk membayar bantuan Dirk Rühl, melainkan untuk membayar jasa Dullah. Lihat *Lihat Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konperensi Asia-Afrika, 2014, hlm. 23.



Gambar 4.24. Proporsi skala ukuran, bentuk, dan warna yang dibuat oleh Sultan Hamid II (Sumber: Koleksi Rumah Garuda)

MASA REPUBLIK INDONESIA ERA ORDE LAMA

RIS berakhir dan berubah menjadi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, yang juga merupakan hari peringatan kemerdekaan yang ke-lima. Di hari ini, lambang negara Garuda Pancasila mulai diberlakukan di seluruh Indonesia, namun belum ditetapkan secara resmi. Penetapan tersebut baru dilakukan pada tanggal 17 Oktober 1951 dalam Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 1951 yang menerangkan elemen-elemen Garuda Pancasila.

Mengenai Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1. Mengambil gambaran hewan untuk Lambang Negara bukanlah barang yang ganjil. Misalnya untuk lambang Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharaja Priyadarsi Asyoka berasal dari Sarnath dekat Benares.

Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, symbologi dan kesusastraan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16.

Perisai adalah asli, sedangkan arti semboyan yang dituliskan dengan huruf latin berbahasa Jawa kuno menunjukkan peradaban klasik.

Pasal 2. Warna kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara. Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang sebenarnya dalam alam.

Pasal 3. Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (*creatif vermogen*) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythology menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan di candi Dieng, Prambanan dan Panatara. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); di candi Prambanan dan di candi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda di candi Mendut, Prambanan dan di candi-candi Sukuh, Kidal di Jawa Timur.

Umumnya makna garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythology Indonesia.

Lencana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda.

Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

Pasal 4. Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik

Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Dengan garis yang melukiskan katulistiwa (*aequator*) itu, maka ternyatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa panas; garis katulistiwa melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidaklah (belumah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat, terletak di katulistiwa dipermukaan bumi.

Mata bulatan dalam rantai menunjukkan bahagian perempuan dan digambar berjumlah 9; mata pesagi yang digambar berjumlah 8 menunjukkan bahagian laki-laki.

Rantai yang bermata 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya, sesuai dengan manusia yang bersifat turun-temurun.

Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

Pasal 5. Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin: berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti: di antara pusparagam adalah kesatuan.

Kemudian, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 1958, tentang penggunaan Lambang Negara dengan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 1636. Pada peraturan ini pemerintah memberikan arahan bagaimana dan di mana saja masyarakat dapat menggunakan lambang negara beserta dengan batasan-batasan yang diperbolehkan. Ketika menyosialisasikan peraturan ini tanggal 22 Juli 1958, Presiden Sukarno berkali-kali menyatakan kebanggaan dan kekagumannya kepada lambang negara Republik Indonesia.

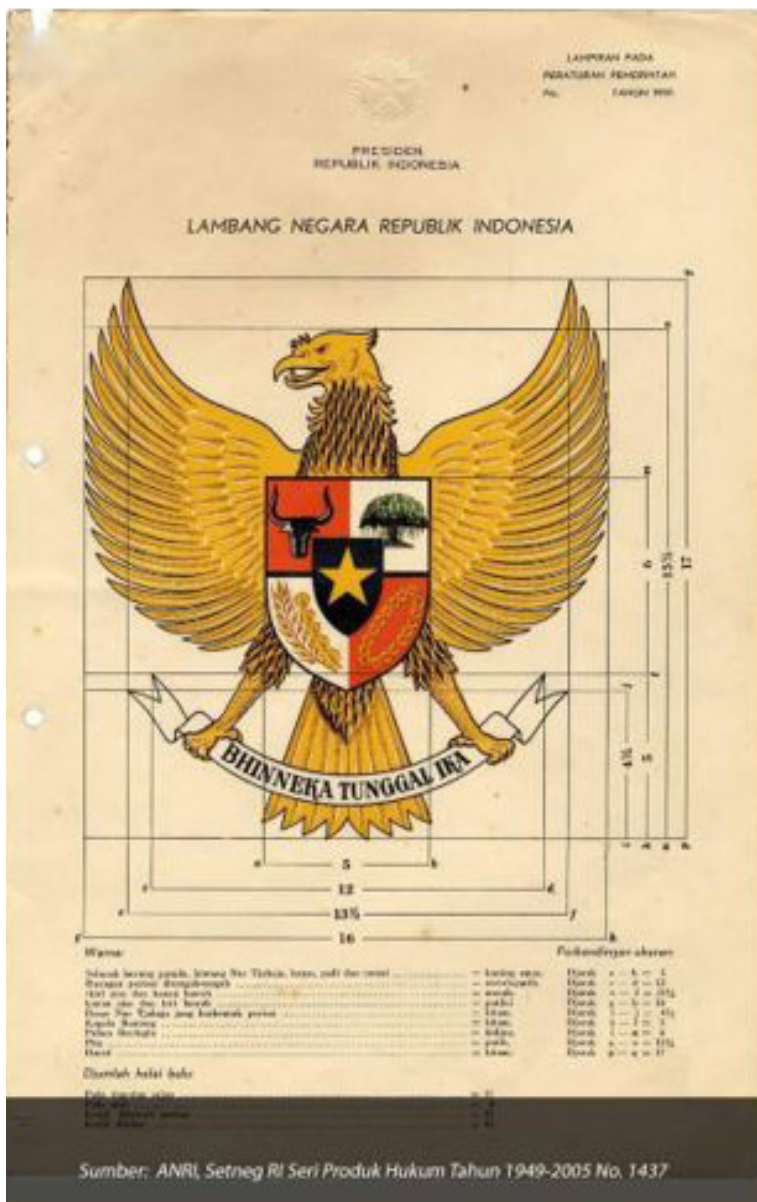
Dalam brosur *Lembaran Sejarah* yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia di awal bulan Agustus 1950, menyebutkan bahwa lambang negara yang ditetapkan oleh pemerintah secara resmi bernama "Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika."⁶⁶ Meski begitu, Presiden Sukarno dalam pidatonya di banyak termpat, berkali-kali menyebut lambang ini dengan nama "Elang Rajawali Garuda Pancasila." Salah satunya dapat dilihat pada pidatonya tanggal 22 Juli 1958.⁶⁷ Sebagai koordinator Panitia Perencana Lambang Negara, Sultan Hamid II secara khusus, dalam suratnya kepada Solichim Salam, juga menyebut lambang ini dengan nama "Burung Elang Radjawali Garuda Pantja-sila"⁶⁸ atau dengan singkat "Rajawali Garuda Pancasila."⁶⁹ Tentu saja, saat ini rakyat Indonesia mengenal lambang negara Republik Indonesia ini dengan nama populernya "Garuda Pancasila."

66 Lihat *Lembaran Sejarah*. Brosur, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1950, halaman 61. Terlihat pula pada koran "Antara" pada Gambar 4.22. yang menyebut lambang negara Bhinneka Tunggal Ika.

67 Lihat *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konperensi Asia-Afrika, 2014, halaman 5

68 Ibid., halaman 25

69 Ibid., halaman 23



Gambar 4.25. Lampiran Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951
(Sumber: Instagram ANRI)

MASA REPUBLIK INDONESIA ERA REFORMASI

Dinamika perancangan lambang negara rupanya tidak berhenti dengan munculnya Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 1958 tentang penggunaan Lambang Negara dengan penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 1636. Memasuki masa reformasi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang no. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada 9 Juli 2009. Undang-undang ini tidak menyebutkan secara resmi apa nama lambang negara ini, pada Pasal 46 hanya disebutkan *"Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda."*

Di dalam lembaran undang-undang ini disematkan pula Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5035, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 24 tahun 2009 memuat aturan proporsi dan warna baru untuk lambang negara. Dikutip dari Nanang R. Hidayat⁷⁰, *"revisi ini tanpa didasari alasan apapun menggantikan proporsi gambar lambang negara pada Lembaran Negara PP 66 tahun 1951."* Kalimat ini muncul karena melihat kenyataan bahwa PERURI sebagai lembaga negara masih menggunakan desain lambang negara berdasarkan Lembaran Negara PP no. 66 tahun 1951 pada sudut uang kertas hasil cetakannya hingga hari ini.

Secara umum, lambang negara Undang-Undang no. 24 tahun 2009, mempunyai bentuk lebih buntet. Perbandingan tubuhnya menjadi lebih besar dibanding dengan sayapnya.

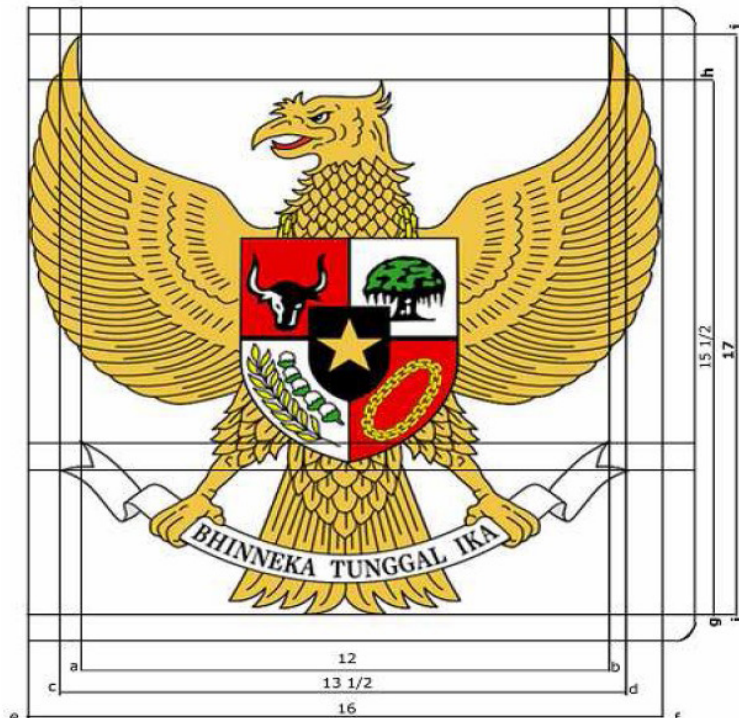
⁷⁰ Mencari Telur Garuda, Edisi Kedua, Nanang R. Hidayat, I:Boekoe & Rumah Garuda, 2020.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 Tahun 2009

TANGGAL : 9 Juli 2009



Warna:

Warna Merah : MHB (RGB) : merah 255, hijau 000, dan biru 000

Warna Putih : MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 255

Warna Kuning Emas : MHB (RGB) : merah 255, hijau 255, dan biru 000

Warna Hitam : MHB (RGB) : merah 000, hijau 000, dan biru 000

Perbandingan Ukuran:

Jarak A – B = 12

Jarak C – D = 13 ½

Jarak E – F = 16

Jarak G – H = 15 ½

Jarak I – J = 17

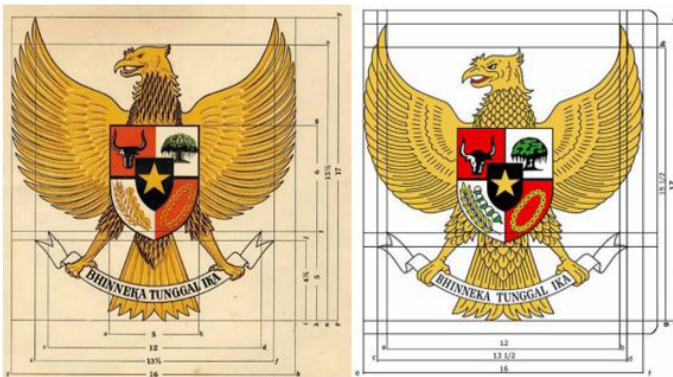
Gambar 4.26. Lambang negara dengan proporsi dan warna baru pada Lampiran Undang-Undang No. 24 Tahun 2009

Selain itu, terlihat jambul depannya nampak lebih dominan dibandingkan dengan jambul depan lambang negara Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 1951.

Terdapat perubahan jenis font atau huruf yang membentuk kalimat BHINNEKA TUNGGAL IKA. Perubahan itu terlihat terutama pada variasi huruf K unik yang terdapat pada lambang negara Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 1951. Jari-jari kaki yang gemuk dan dua bulu ekor bagian tengah yang membesar sehingga mengesankan tidak rata, juga perubahan yang terjadi pada lambang negara yang baru.

Simbol-simbol Pancasila pada perisai garuda pun tidak luput dari perubahan. Kepala Banteng terlihat lebih gemuk dibanding sebelumnya dan Pohon Astana digambar lebih "vektor" dibandingkan gambar sebelumnya yang lebih realis. Perubahan paling signifikan terdapat pada simbol Padi-Kapas. Pada lambang negara yang baru, tangkai keduanya terpisah dan terjadi perubahan warna kapas beserta kelopaknya menjadi putih dan hijau, yang sebelumnya berwarna emas semua.

Untuk melihat perbandingan keduanya, dapat dilihat pada Gambar 4.27 di bawah ini.

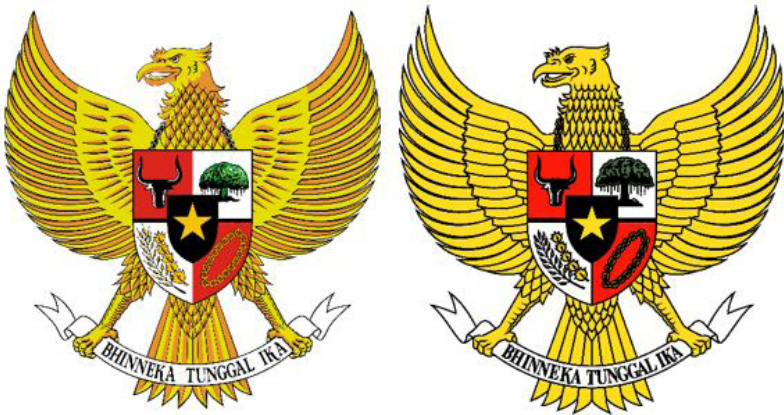


Gambar 4.27. Perbandingan proporsi dan warna lambang negara PP No. 66 tahun 1951 dan UU No. 24 tahun 2009

Kemudian, memasuki masa keterbukaan informasi yang dipenuhi dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat di berbagai media, mengharuskan kita semakin berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan kembali informasi yang didapat. Begitu pula dalam masalah lambang negara. Peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang membatasi kita dalam menggunakan lambang negara pada media-media tersebut. Apalagi terkait dengan bentuk, proporsi, dan warna yang ditampilkan dalam lambang negara. Pasal 57 ayat b Undang-Undang no. 24 tahun 2009 menyebutkan, *"setiap orang dilarang menggunakan Lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran."*

Sayangnya dalam hal ini, selain perdebatan apakah lambang negara proporsi Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 1951 ataukah lambang negara proporsi Undang-Undang no. 24 tahun 2009 yang secara resmi digunakan, pemerintah juga tidak memiliki gambar lambang negara standar yang dapat digunakan oleh masyarakat. Tidak heran jika di dunia internet bertebaran lambang-lambang negara hasil kreasi para desainer sesuai dengan keinginan mereka masing-masing tanpa mendasarkannya pada proporsi yang telah ditentukan pemerintah. Tentu saja imbasnya, jika masyarakat menggunakan lambang negara yang tidak sesuai proporsi bentuk, warna, dan perbandingan ukuran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi larangan pada Pasal 57 ayat b di atas.

Pada tanggal 11 Februari 2019, Museum Rumah Garuda yang diinisiasi oleh Nanang R. Hidayat meluncurkan dua gambar vektor lambang negara yang didasarkan pada proporsi



Gambar 4.28. Lambang Negara yang telah divektorisasi,
hasil karya Muhammad Fajar (kiri) dan Rahmad Kurniawan (kanan).
(Sumber: Nanang R Hidayat)

Peraturan Pemerintah no. 66 tahun 1951.⁷¹ Kedua gambar yang didesain oleh Muhammad Fajar dan Rahmad Kurniawan ini diluncurkan sebagai upaya membantu pemerintah menjaga proporsi bentuk, warna, dan perbandingan ukuran gambar lambang negara yang seringkali digunakan oleh masyarakat secara serampangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu masyarakat yang butuh gambar lambang negara yang sesuai proporsinya baik secara bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, terbantu dengan adanya gambar vektor ini.

⁷¹ Gambar vektor adalah gambar yang menggunakan fungsi matematis dalam menciptakan gambar pada grafis komputer. Berapapun ukuran yang digunakan untuk mencetak gambar vektor, hasil gambar terlihat jelas dan tidak akan pecah (terlihat kotak-kotak *pixel* seperti gambar bitmap)

TOKOH-TOKOH DAN PERANANNYA DALAM PERANCANGAN LAMBAANG NEGARA

Seperti yang terlihat pada bab sebelumnya, terdapat banyak sekali tokoh yang terlibat di dalam proses perancangan lambang negara. Mereka melakukan penelitian dan investigasi, melakukan diskusi dan debat sesama mereka, membuat sketsa dan gambar rancangan yang mereka imajinasikan, demi mewujudkan lambang negara yang dapat merepresentasikan dasar negara, jiwa, dan raga bangsa Indonesia.

Tokoh-tokoh yang terlibat ini berasal dari berbagai latar belakang, pendidikan, dan daerah di Indonesia. Rekam jejak mereka dalam bidang politik, sosial, maupun pendidikan sudah terasah sejak masa pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perancangan lambang negara adalah mereka yang sejak awal sudah terlibat dalam membentuk bangsa Indonesia dan mendirikan negara dengan pemerintahan sendiri, bebas dari cengkeraman penjajah.

Masing-masing dari mereka memiliki imajinasi yang berbeda mengenai bagaimana bentuk bangsa dan negara yang akan mereka dirikan. Meski begitu, perjalanan sejarah, termasuk dalam proses perancangan lambang negara, memperlihatkan bahwa perbedaan yang signifikan pun dapat disatukan apabila memiliki visi, misi, dan niat baik yang sama demi terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang dicita-citakan.

PARADA HARAHAP

Dalam perancangan lambang negara, Parada Harahap-lah yang pertama kali mengusulkan perlunya perancangan lambang negara dalam Sidang BPUPK tanggal 13 Juli 1945. Latar belakangnya sebagai *King of Java Press* kemungkinan membuatnya terpikir untuk mengajukan usulan tersebut.



Gambar 5.1. Parada Harahap
(Sumber: akhirmh.blogspot.com)

Parada Harahap telah berkecimpung dalam bidang media massa sudah sejak masa muda dengan belajar secara otodidak dan mengikuti kursus-kursus. Malahan pada tahun 1917 dan 1918, berkat kegigihannya mempelajari bahasa Belanda, ia sudah dapat menulis dan membongkar kekejaman *poenale sanctie* dan perlakuan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan para tuan kebun dan mandor terhadap kuli-kuli kontrak.

Karir jurnalismenya dengan memimpin surat kabar *Sinar Merdeka* dan majalah *Poestaha* pada tahun 1919 di Asahan, menerbitkan *Bintang Hindia*, *Bintang Timur*, dan *Sinar Pasundan* tahun 1922 di Jakarta, membuatnya menyadari kekuatan identitas dalam media massa. Oleh karena itu, pada saat ia diminta bergabung dalam susunan anggota BPUPK sebagai satu-satunya yang berasal dari suku Batak, ia mengusulkan adanya perancangan lambang negara sebagai bagian dari identitas bangsa dan negara.

SUKARNO

Sebagai seorang presiden, Sukarno terlibat cukup banyak dalam proses perancangan lambang negara. Ia yang memerintahkan untuk membentuk Panitia Indonesia Raya pada tahun 1948 untuk melakukan riset terkait dengan lambang negara. Ia juga yang membentuk Panitia Perencana Lambang Negara pada tahun 1950 dan menunjuk Sultan Hamid II sebagai koordinator panitia untuk segera menyelesaikan perancangan lambang negara.

Latar belakangnya sebagai seorang pembelajar yang sejak kecil mendengar banyak cerita pewayangan dan karir politiknya menggiring ia ke arah nasionalisme, mungkin menjadi alasan mengapa Sukarno mengusulkan mengubah pita merah putih yang dicengkeram garuda menjadi pita putih



Gambar 5.2. Sukarno (Sumber: Wikipedia)

bertuliskan seloka Bhinneka Tunggal Ika, selain bahwa warna merah putih sudah terwakili dalam warna perisai garuda.

Keahliannya sebagai seorang arsitek dan ahli gambar juga membuatnya mengkritisi kepala garuda yang terlihat gundul. Ia menilai bahwa garuda dengan kepala yang terlihat gundul tampak tidak gagah, selain bahwa ia mungkin juga tidak ingin lambang negaranya mirip dengan lambang negara Amerika Serikat yang menggunakan figur elang botak. Sukarno juga mengkritisi cakar garuda yang terbalik, mengingat bahwa sebagai seniman ia berpengalaman sebagai pelukis

realis yang pernah ia tunjukkan melalui lukisan pura dan gambar seting panggung pertunjukan Toneel Kelimutu di Ende.

Selain itu, Sukarno juga mengundang Dirk Rühl untuk merevisi lambang negara dan memerintahkan Dullah, pelukis kesayangannya, untuk mereproduksi lambang negara yang telah disetujui tersebut. Ia juga memerintahkan Kementerian Penerangan untuk mendistribusikan lambang negara ke seluruh penjuru negeri segera setelah Republik Indonesia berdiri kembali pada 17 Agustus 1950.⁷²

BASUKI RESOBOWO

Basuki Resobowo memegang salah satu peranan penting di awal penelitian mengenai lambang negara. Ia diminta oleh Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu anggota Panitia Indonesia Raya. Sebagai siswa lukis terpandai di Taman Siswa, ia ditugaskan untuk melukis simbol-simbol keindonesiaan yang ditemukan oleh Panitia Indonesia Raya dalam penelitian.



Gambar 5.3. Basuki Resobowo (Sumber: Konstituante.net)

72 Lihat Gambar 4.1 pada Bab Sejarah Penciptaan Lambang Negara



Gambar 5.4. Basuki Resobowo di masa tua (Sumber: hypeabis.id)

Salah satu simbol yang ia gambar adalah figur-figur garuda yang ditemukan di berbagai candi di Indonesia. Sketsa yang ia buat ternyata membantu Sultan Hamid II dalam merancang lambang negara yang diterima oleh Panitia Perencana Lambang Negara pada tahun 1950.

Berdasarkan cerita Dr. Ner. Nat. Hilarion Widyatmoko⁷³, ia pernah bertemu dengan Basuki Resobowo di tempat tinggalnya di Amsterdam. Basuki mengakui ia pernah memenangi sayembara Perancangan Lambang Negara dan ide mengenai pencantuman tanggal 17-8-45 datang dari seorang penyair tak ternama dari Pasar Minggu. Cerita ini dikonfirmasi oleh Ki Suratman, pimpinan Taman Siswa, yang mengatakan bagaimana Ki Hajar Dewantara sering membebaskannya dari kewajiban belajar di kelas demi melukis. Hilarion juga sempat mendengar keluhan Basuki bahwa Garuda Pancasila yang sekarang digambar oleh “pelukis Amerika” itu bentuknya seperti layangan.

⁷³ *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konferensi Asia-Afrika, 2014, halaman 5

SULTAN HAMID II

Dalam perjalanan karirnya, Sultan Hamid II tidak memiliki kemampuan menggambar seperti Sukarno. Ia hanya pernah berada satu almamater dengan Sukarno di Technische Hoogeschool selama satu tahun saja. Selebihnya ia habiskan di dunia kemiliteran. Meski begitu, ia memegang salah satu peranan penting dalam perancangan lambang negara.

Saat Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio, satu-satunya tugas yang diberikan oleh Presiden Sukarno kepadanya adalah merancang lambang negara dan menyiapkan gedung parlemen. Untuk membantunya dalam tugas itu, pemerintah membentuk Panitia Perencana Lambang Negara dan ia ditunjuk sebagai koordinator. Meski begitu, saat beberapa usulan lambang negara hasil sayembara



Gambar 5.5. Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau Sultan Hamid II
(Sumber: Wikipedia)

ditolak oleh pemerintah, ia berinisiatif mengajukan usulannya sendiri.

Sesuai petunjuk pemerintah, Sultan Hamid II pun meminta bantuan "ahli heraldik" Dirk Rühl untuk mengeksekusi sketsa usulan rancangan lambang negaranya. Ia menggunakan bahan-bahan Panitia Indonesia Raya untuk mengusulkan figur garuda sebagai usulannya. Ketika bentuk antropomorfis usulannya ditolak, ia menggunakan pengalamannya dalam meneliti lambang-lambang negara lain dan lambang-lambang kemiliteran selama di KNIL, untuk mengubah usulan rancangannya menjadi bentuk elang realis.

Ia kembali meminta bantuan Dirk Rühl untuk merevisi saat lambang negara dikritisi oleh Presiden Sukarno. Latar belakangnya bergaul di lingkungan petinggi Belanda dan cara pandangya terhadap sistem federal, membuatnya bersikeras mempertahankan bentuk cakar kaki yang terbalik sebagai perwujudan negara RIS yang federal. Meski begitu, ia dapat memahami cara pandang Presiden Sukarno setelah mendapat penjelasan.

Ketika lambang negara telah final dan disetujui oleh presiden, ia diminta untuk membuat skala ukuran, bentuk, dan warna lambang negara sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai koordinator Panitia Perencana Lambang Negara dan Menteri Negara Zonder portofolio.

MOHAMMAD YAMIN

Sebagai seorang budayawan dan sejarawan, Mohammad Yamin juga ikut berperan penting dalam perancangan lambang negara. Meskipun pada akhirnya usulannya yang diterima dalam rancangan final lambang negara hanya berupa Kepala Banteng yang menyimbolkan sila keempat, namun keterlibatannya jauh lebih besar dibanding itu.



Gambar 5.6. Mohammad Yamin
(Sumber: Wikipedia)

Sebelumnya, Mohammad Yamin pernah terlibat dalam penelitian mengenai simbol-simbol keindonesiaan sebagai sekretaris umum Panitia Indonesia Raya. Berdasarkan surat Ki Hajar Dewantara, hasil-hasil penelitian Panitia Indonesia Raya lebih banyak disimpan oleh Mohammad Yamin. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan oleh Panitia Perencana Lambang Negara kebanyakan merupakan data milik Panitia Indonesia Raya.

Selain itu, banyaknya bahan-bahan yang Mohammad Yamin miliki berkat data-data Panitia Indonesia Raya, membuat ia juga berinisiatif mengusulkan rancangan lambang negara setelah berbagai usulan rancangan hasil sayembara

ditolak oleh pemerintah. Ia menciptakan banyak sketsa usulan rancangan lambang negara yang terdiri atas banyak simbol. Namun, hasil akhir usulan rancangan lambang negaranya diberi nama Aditya-Chandra yang ditolak oleh pemerintah karena melihat adanya simbol sinar matahari dan dinilai disengaja atau tidak, sedikit banyak terpengaruh oleh kebudayaan Jepang.

Meski begitu, usulan Kepala Banteng yang memiliki makna kerakyatan atau tenaga rakyat diterima oleh panitia untuk menyimbolkan sila keempat Pancasila. Latar belakangnya berkecimpung dalam kegiatan politik Partai Nasional Indonesia yang berlambang banteng menjadi alasan di balik usulannya ini.

KI HAJAR DEWANTARA

Latar belakang politik dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, mungkin membuatnya mengusulkan Padi-Kapas sebagai simbol tujuan kemakmuran, simbol dari keadilan sosial pada lambang negara. Dibesarkan di lingkungan bangsawan, Ki Hajar memilih jalur lain dalam kehidupannya. Ia menulis, menjadi wartawan, bergabung dalam berbagai organisasi politik, dan akhirnya menjadi pendidik dengan mendirikan Taman Siswa. Kepekaannya terhadap ketidakadilan yang terjadi di negerinya membuat ia bercita-cita mewujudkan keadilan tersebut dalam bentuk pendidikan. Akhirnya simbol keadilan itu terwujud dalam bentuk Padi-Kapas di dalam perisai garuda.

Akan tetapi, keterlibatannya dalam perancangan lambang negara tidak hanya sekadar itu saja. Tahun 1948, ia menjadi ketua Panitia Indonesia Raya yang salah satu tugasnya adalah meneliti simbol-simbol keindonesiaan. Bisa jadi, salah satu simbol yang ia temukan dari penelitian tersebut adalah simbol padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran

paling dasar, yaitu terpenuhinya kebutuhan makanan dan pakaian.

Selain itu, saat ia ditunjuk menjadi anggota Panitia Perencana Lambang Negara, ia juga yang menyarankan kepada panitia untuk berkonsultasi dengan Mohammad Yamin mengenai data-data hasil penelitian Panitia Indonesia Raya. Data-data itu dapat digunakan untuk membantu panitia untuk menyelesaikan perancangan lambang negara. Sebab, akibat kesibukannya di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota panitia pada akhir Januari 1950.



Gambar 5.7. Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara
(Sumber: Wikipedia)

MOHAMMAD NATSIR

Mohammad Natsir dikenal sebagai tokoh pergerakan muslim yang konsisten. Pergerakannya bersama Jong Islamieten Bond dan Persis sejak masa pergerakan nasional menjadikannya salah satu tokoh yang pemikirannya diperhitungkan. Tidak aneh jika cara pandangnya itu juga mempengaruhi usulannya terhadap perancangan lambang negara.



Gambar 5.8. Mohammad Natsir (Sumber: Wikipedia)

Diduga, Mohammad Natsir lah yang membawa lambang kerajaan Samudera Pasai ke atas meja Panitia Perencana Lambang Negara. Usulannya ini kemungkinan untuk menolak bentuk antropomorfis lambang negara yang diusulkan oleh Sultan Hamid II. Latar belakang keislamannya menyebutkan bahwa muslim dilarang untuk menggunakan figur antropomorfis yang lebih condong pada bentuk siluman, sehingga membuatnya menolak bentuk tersebut.

Selain itu, unsur keislaman lain yang diusulkan oleh Mohammad Natsir adalah simbol nur (cahaya) berbentuk bintang bersudut lima. Ia mengartikan bahwa simbol ini merupakan simbol dari cahaya ketuhanan yang melambangkan sila pertama Pancasila dalam perisai garuda. Cahaya ketuhanan ini menyinari keempat sila lainnya dan menjadi sinar yang memancar dari dada garuda.

Meski begitu, kesibukannya sebagai ketua Masyumi sejak 1949 dan anggota formatur kabinet Republik Indonesia di bawah pimpinan Mr. Asaat sejak 4 Januari 1950 membuatnya tidak dapat berpartisipasi lebih banyak dalam Panitia Perencana Lambang Negara. Ia mengundurkan diri dari kepanitiaan sejak akhir Januari 1950.

RADEN MAS NGABEHI POERBATJARAKA

Tumbuh sebagai ahli bahasa, R.M.Ng. Poerbatjaraka memberikan andil yang tidak sedikit dalam perancangan lambang negara. Hasil-hasil penelitiannya terhadap naskah kuno dan kebudayaan selama masa pendidikan, memberikannya banyak kesempatan untuk menggali nilai-nilai masyarakat nusantara. Selain itu, keterlibatannya dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda juga memberikan banyak sisi nasionalisme dalam kepribadiannya.



Gambar 5.9. Raden Mas Ngabehi Poerbatjaraka
(Sumber: Wikipedia)

Ia sudah terlibat dalam penelitian simbol-simbol keindonesiaan sejak menjadi anggota Panitia Indonesia Raya. Saat ditunjuk menjadi anggota Panitia Perencana Lambang Negara, ia menolak jumlah ekor garuda yang berjumlah 7 helai. Padahal jumlah itu merupakan usulan dari Mohammad Yamin yang meyakini bahwa angka 7 merupakan simbol keteraturan tata negara. Akan tetapi, belum ada data yang menyebutkan mengapa penolakan itu ia sampaikan.

Selain itu, Poerbatjaraka juga mengusulkan simbol Pohon Astana sebagai simbol sila ketiga Pancasila. Latar belakangnya yang berasal dari kalangan istana meyakini bahwa pohon

Astana yang sering ditanam di bagian depan istana kerajaan menyimbolkan kebersatuan antara istana dan rakyat, serta menyimbolkan perlindungan istana terhadap rakyatnya.

MELKIAS AGUSTINUS PELLAUPESSY

Tidak terlalu banyak keterangan yang memaparkan mengenai kehidupan Melkias Agustinus Pellaupessy. Latar belakang kehidupannya lebih banyak dihabiskan sebagai pejabat publik, baik pada saat masa Hindia Belanda, maupun masa Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat.

Keterlibatannya dalam perancangan lambang negara adalah usulannya untuk memperbaiki penolakan yang dilakukan R.M.Ng. Poerbatjaraka. Saat itu, ia mengusulkan untuk mengubah jumlah bulu ekor garuda dari 7 helai menjadi 8



Gambar 5.10. Melkias Agustinus Pellaupessy
(Sumber: Wikipedia)

helai. Angka 8 ini akan menjadi simbol bulan Agustus, bulan kemerdekaan, jika disandingkan dengan jumlah bulu sayap. Ia menghitung jumlah bulu terluar sayap kanan dan kiri garuda masing-masing sudah berjumlah 17. Jika jumlah bulu sayap digabungkan dengan jumlah bulu ekor, maka akan menjadi candrasengkala tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, tanggal 17 bulan 8.

Nyatanya, jumlah bulu primer terluar pada masing-masing sayap elang berkisar antara 17-19 helai. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya jumlah 17 pada sayap garuda tidak dimaksudkan sebagai makna filosofis tanggal kemerdekaan. Hanya kebetulan semata bahwa angka tersebut adalah jumlah rata-rata bulu primer terluar pada masing-masing sayap garuda.

DIRK RÜHL, JR.

Keterangan mengenai tokoh ini sangat sedikit yang dapat ditemukan. Potongan artikel Kantor Berita "Antara" tanggal 16 Maret 1950 menyebutkan bahwa Dirk Rühl, Jr. adalah seorang simnolog senior berkebangsaan Jerman yang sudah lama tinggal di Bandung dan sudah menjadi ahli yang membuat berbagai lambang daerah di Hindia Belanda. Namun, pada surat yang dikirimkan oleh Sultan Hamid II kepada Solichim Salam, Dirk Rühl, Jr. merupakan simnolog berkebangsaan Perancis.

Di luar berbagai perdebatan dan data yang ada, dari surat Keputusan Presiden RIS no. 21 tahun 1950 tentang pembentukan Panitia Perencana Lambang Negara dan surat Keputusan Presiden RIS no. 72 tahun 1950 tentang pembubaran Panitia Perencana Lambang Negara, Dirk Rühl, Jr. secara meyakinkan terlibat dalam proses perancangan lambang negara sebagai "ahli heraldik". Tidak hanya mengubah bentuk kepala garuda dengan menambahkan jambul dan mengubah arah

kaki garuda yang terbalik⁷⁴, Dirk Rühl, Jr. juga terlibat sejak awal menjadi orang yang diminta bantuan oleh Sultan Hamid II untuk mendesain rancangan lambang negara hasil sketsanya.⁷⁵ Bahkan Sultan Hamid II pun meminta beberapa desain rancangan alternatif kepada Dirk Rühl, Jr.⁷⁶

Terakhir, nama Dirk Rühl, Jr juga muncul pada catatan kaki desain akhir rancangan lambang negara yang dikirimkan oleh Presiden Sukarno kepada Sultan Hamid II dalam rangka mendisposisi keputusan akhir rancangan lambang negara yang disetujui.⁷⁷

Untuk mempertegas mengapa Dirk Rühl, Jr. diminta menjadi “ahli heraldik” sebagai konsultan lambang oleh Panitia Perencana Lambang Negara, diminta bantuan oleh Sultan Hamid II untuk mendesain sketsa rancangan lambang negara usulannya, dan diminta langsung oleh Presiden Sukarno untuk memperbaiki rancangan lambang negara versi final, kita dapat melihat beberapa judul hasil karya Dirk Rühl, Jr. yang sempat beredar di Indonesia. Di antaranya adalah:

1. *Het wapen van Bandoeng : legenden, geschiedenis en de heraldische waarde* (Lambang Bandung: Legenda, Sejarah dan Nilai Heraldik, 1921)
2. *Nederl.-Indische gemeentewapens: geschiedenis, legenden en besluiten* (Lambang Kota Hindia Belanda: Sejarah, Legenda, dan Kebijakan, 1933)

74 Pada proses akhir penyempurnaan lambang negara, berdasarkan berita yang diterbitkan oleh koran “Antara” Bandung tanggal 16 Maret 1950. Lihat Gambar 4.22 pada Bab Sejarah Penciptaan Lambang Negara.

75 Berdasarkan surat Sultan Hamid II kepada Solichim Salam. Lihat *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara: Bunga Rampai Pameran dan Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*, Sahabat Museum Konferensi Asia-Afrika, 2014.

76 Lihat Gambar 4.6, Gambar 4.7, Gambar 4.8, dan Gambar 4.9 pada Bab Sejarah Penciptaan Lambang Negara

77 Lihat Gambar 4.23 pada Bab Sejarah Penciptaan Lambang Negara

3. *Ornamentiek op Bali* (Ornamen di Bali, 1932)
4. *De Wajang* (Wayang, 1922)
5. *Vlaggen van den Oost-Indischen Archipel (1600-1942)* (Bendera Kepulauan Hindia Timur (1600-1942), 1945 dan 1952)
6. *Familiewapens in het landsarchief van Nederlandsch-Indië te Batavia* (Lambang Keluarga dalam Arsip Tanah Hindia Belanda di Batavia, 1942)
7. *Het Nederlandsche wapen en de Nederlandsche vlag : historisch overzicht betreffende den oorsprong en de wijzigingen van het Nederlandsche wapen en van de Nederlandsche vlag* (Lambang Belanda dan Bendera Belanda : gambaran sejarah tentang asal usul dan perubahan lambang Belanda dan bendera Belanda, 1940)
8. *De afstamming van H.K.H. prinses Juliana en Z.D.H. prins Bernhard uit het Huis Oranje-Nassau: voordracht* (Silsilah HRH Putri Juliana dan Z.D.H. Pangeran Bernhard dari House of Orange-Nassau: nominasi, 1937)
9. *Het wapen van H.K.H. Prinses Juliana : toelichting bij den kwartierstaat van H.K.H. Prinses Juliana* (Lambang HRH Puteri Juliana: penjelasan silsilah HRH Puteri Juliana, 1936)

DULLAH

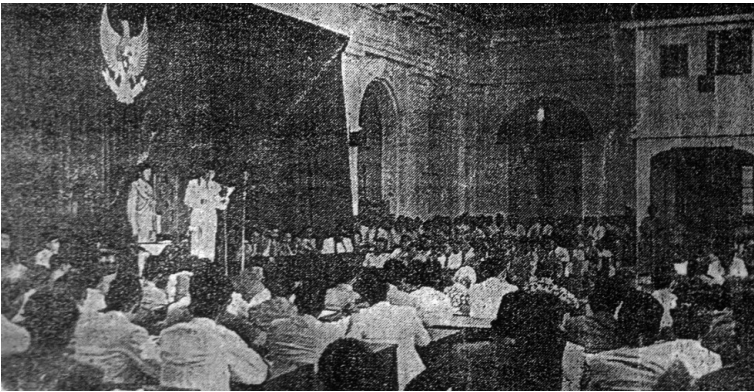
Dullah merupakan pelukis realisme ternama di Indonesia dan merupakan pelukis kesayangan Presiden Sukarno. Selama kepemimpinan Sukarno, ia menjadi pelukis dan kurator seni rupa istana negara. Tidak heran jika ia dipercaya untuk merevisi sekaligus mereproduksi rancangan lambang negara final.



Gambar 5.11. Dullah
(Sumber: Wikipedia)

Pada akhir Februari 1950, Sultan Hamid II menyatakan bahwa ia meminta bantuan Dullah untuk merevisi lambang negara, yaitu bentuk kepala dan cakarnya. Namun, berdasarkan pengakuan Dullah sendiri, ia hanya diminta oleh Presiden Sukarno untuk merevisi cakarnya saja. Itu pun merevisi gambar yang sudah terlanjur bocor dan muncul di koran mingguan Lukisan Indonesia terbitan Kementerian Penerangan. Sedangkan berdasarkan Sultan Hamid II, Dullah diminta untuk mereproduksi ulang lambang negara final yang telah disetujui hasil gambar Dirk Rühl, Jr. Meski begitu, ia juga diminta oleh Presiden Sukarno untuk mereproduksi gambar lambang negara final yang telah disetujui untuk disebar dan digunakan segera oleh masyarakat.

PENUTUP



Tanggal 22 Juli 1958 dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara yang ditandatangani oleh Menteri Kehakiman GA Maengkom pada Lembaran Negara No. 71 Tahun 1958 dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara No. 1636 tahun 1958, Presiden Sukarno memberikan pidato mengenai lambang negara.

Saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang ini. Alangkah megahnja, alangkah hebatnja, dan cantiknya Burung Elang Radjawali Garuda jang sajab kanan dan sajab kirinja berelar 17 buah dengan ekor berelar 8 buah, tanggal 17 bulan 8 dan jang berkalungkan perisai jang diatas perisai itu tergambar Pantjasila, jang dibawahnja tertulis seloka buatan Empu Tantular Bhinneka Tunggal Ika, bhinna ika tunggal ika, berdjenis-djenis tetapi tunggal.

Lihatlah sekali lagi, aku berkata betapa indahnja lambang negara ini. Menurut pendapat saja Lambang Negara Republik Indonesia ini adalah lambang jang terindah dan terhebat, terhebat daripada seluruh lambang-lambang negara di muka bumi ini. Saja setelah melihat dan mempeladjar lambang-lambang negara jang lain-lain, tetapi tida ada jang sehebat, seindah, seharmonis seperti Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang jang telah ditjintai oleh rakjat kita sehingga djikalau kita masuk ke desa-desa sampai kepelosok-pelosok jang paling djauh dari dunia ramai, lambang ini sering dicoretkan orang-orang di gardu-gardu, di tembok-tembok, di gerbang-gerbang jang didirikan djikalau hendak menjatakan suatu utjapan selamat datang seorang tamu.

Lambang jang demikian telah terpaku dalam kalbunja rakjat Indonesia, sehingga lambang ini telah mendjadi darah daging rakjat Indonesia dalam ketjintaannya kepada republik. Sehingga bencana batin akan amat besarlah djikalau dasar negara kita itu roboh, djikalau dasar negara itu tidak ditetapkan dan dilanggengkan: Pantjasila. Sebab, lambang negara sekarang jang kepelosok-pelosok desa itu adalah lambang jang bersendikan kepada Pantjasila. Sesuatu perobahan daripada Dasar Negara membawa perobahan daripada lambang negara.

Saja mengetahui djikalau lambang negara ini dirobah, sebagian terbesar dari rakjat Indonesia akan menolaknya. Tjinta rakjat Indonesia kepada lambang ini telah terpaku sedalam-dalam djiwanja, berarti tjinta sebagian terbesar daripada rakjat Indonesia kepada Pantjasila. Lihatlah sekali lagi kepada lambang negara kita, Pantjasila jang dilukis diatas burung garuda.

Jika kita berusaha mengimajinasikan seolah-olah berada di hadapan sebuah podium dengan sesosok Sukarno di depan sana, tentunya kita bisa merasakan dari gelegar kata-kata pidatonya bagaimana bangganya ia, sebagai seorang presiden, memiliki lambang negara seperti Garuda Pancasila.

Beragamnya versi sejarah perjalanan panjang lambang negara Indonesia sejak digagas hingga hari ini, bukan untuk dijadikan alasan perpecahan dan membentuk kubu-kubu yang berseberangan demi kepentingan pribadi. Melainkan justru supaya menjadi satu kesatuan. Lambang negara terdiri atas tiga komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai Pancasila, dan pita seloka Bhinneka Tunggal Ika.

Burung Garuda melambangkan raga bangsa Indonesia yang mesti kuat, gagah, penuh semangat, jujur dan teguh berbakti kepada Ibu Pertiwi, serta mampu melesat terbang melampaui batasan diri hingga ke masa depan. Perisai Pancasila adalah jiwanya bangsa Indonesia yang menjadi pertahanan bangsa ini untuk *"bisa bertahan maju kedepan untuk membangun generasi penerus/kader-kader pedjuang bangsa jang bermartabat/berperikemanusiaan jang disimbolkan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, setelah itu membangun persatuan Indonesia sila ketiga, karena hanya dengan bersatulah dan perpaduan antar negara dalam RIS inilah bangsa Indonesia mendjadi kuat, pada langkah berikutnja baru mem-*

bangun parlemen negara RIS yang demokratis dalam permusyawaratan/perwakilan, karena dengan djalan itulah bisa bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, karena berbakti kepada bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa."⁷⁸

Sedangkan pita seloka Bhinneka Tunggal Ika adalah pengikat raga dan jiwa itu. Raga yang berbeda-beda, jiwa yang berbeda-beda, namun diikat oleh satu kesatuan bernama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya perbedaan yang muncul dalam sejarah perancangan lambang negara juga bukan alasan yang dapat dijadikan sebagai alat perpecahan, justru menjadi alasan persatuan yang kuat.

Jika kita melihat lagi pidato Presiden Sukarno di atas, ia mengatakan bahwa lambang negara kita terdiri atas 3 entitas, yaitu elang, rajawali, dan garuda. Entitas "elang" melambangkan realitas yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, sedangkan entitas "garuda" melambangkan kemitologian yang sudah hidup mengakar di dalam jiwa bangsa. Keduanya menjadi sayap-sayap sang "rajawali" yang menjadi identitas diri sesungguhnya bangsa Indonesia: Raja yang Wali, pemimpin yang juga memiliki kejernihan diri (spiritualitas) layaknya wali.

Maka, sudah sepatutnya, kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Lambang Negara Bhinneka Tunggal Ika, Elang Rajawali Garuda Pancasila, pada tanggal 11 Februari setiap tahunnya untuk merayakan identitas diri kita sebagai bangsa di hadapan warga dunia.

⁷⁸ Menurut Mohammad Hatta yang dipaparkan oleh Sultan Hamid II dalam suratnya kepada Solichim Salam. Lihat *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara, Bunga Rampai Pameran & Seminar Lambang Negara Republik Indonesia, Sahabat Museum Konperensi Asia-Afrika*, 2014.

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1951
TENTANG
LAMBANG NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa menurut Undang-undang Dasar perlu ditetapkan Lambang Negara untuk Republik Indonesia;

Mengingat :

Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Juli 1951;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG NEGARA.

Pasal 1.

Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda;
3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 2.

Perbandingan-perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam pasal 6. Warna terutama yang dipakai adalah tiga, yaitu Merah, Putih dan Kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna yang sebenarnya dalam alam.

Warna emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan Merah-Putih didapat pada ruangan perisai di tengah-tengah.

Pasal 3.

Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangun.

Sayap Garuda berbulu 17 dan ekornya berbulu 8.

Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk Garuda adalah seperti dilukiskan dalam gambar tersebut dalam pasal 6.

Pasal 4.

Ditengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katu-listiwa (aequator).

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Panca Sila :

- I. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya di ruangan tengah berbentuk bintang yang bersudut lima.
- II. Dasar Kerakyatan dilukiskan Kepala Banteng sebagai lambang tenaga rakyat.
- III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung.

- IV. Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi.
- V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, sebagai tanda tujuan kemakmuran.

Pasal 5.

Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa-Kuno, yang berbunyi :
BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Pasal 6.

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO

GARUDA PANCASILA

Diundangkan
Pada tanggal 28 Nopember 1951.

MENTERI KEHAKIMAN,

MOEHAMMAD NASROEN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1951
TENTANG
LAMBAANG NEGARA.

UMUM

Menurut pasal 3 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia maka Pemerintahlah yang menetapkan Lambang Negara.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Mengambil gambaran hewan untuk Lambang Negara bukanlah barang yang ganjil. Misalnya untuk lambang Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan gajah, seperti tergambar pada tiang Maharaja Priyadarsi Asyoka berasal dari Sarnath dekat Benares.

Lukisan garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, seperti hidup dalam mythologi, symbologi dan kesusastaan Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa candi sejak abad ke 6 sampai ke-abad ke 16.

Perisai adalah asli, sedangkan arti semboyan yang dituliskan dengan huruf latin berbahasa Jawa-kuno menunjukkan peradaban klasik.

Pasal 2.

Warna kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau keluhuran Negara. Warna-warna pembantu dilukiskan dengan hitam atau meniru seperti yang sebenarnya dalam alam.

Pasal 3.

Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali. Burung itu dilukiskan di candi Dieng, Prambanan dan Panataran. Ada kalanya dengan memakai lukis berupa manusia dengan berparuh burung dan bersayap (Dieng); di candi Prambanan dan di candi Jawa Timur rupanya seperti burung, dengan berparuh panjang berambut raksasa dan bercakar. Lihatlah lukisan garuda di candi Mendut, Prambanan dan di candi-candi Sukuh, Kedal di Jawa Timur.

Umumnya makna garuda terkenal baik oleh archeologi, kesusasteraan dan mythologi Indonesia. Lencana garuda pernah dipakai oleh perabu Airlangga pada abad kesebelas, dengan bernama Garudamukha. Menurut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai seekor garuda.

Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai panji-panji sayap garuda yang ditengah-tengahnya berdiri sebilah keris di atas tiga gurisan garis. Sayap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornya berbulu 8 (bulan 8 = Agustus).

Pasal 4.

Perisai atau tameng dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang; wujud dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan.

Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia Asli.

Dengan garis yang melukiskan katulistiwa (aequator) itu, maka ternyatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara Asli yang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi berhawa-panas; garis katulistiwa melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Di daerah Kongo, di kepulauan Pasifik dan Amerika Selatan tidak-lah (belumah) terbentuk negara penduduk Asli. Jadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Republik Indonesia ialah satu-satunya Negara Asli yang merdeka berdaulat, terletak di katulistiwa dipermukaan bumi.

Mata bulatan dalam rantai menunjukkan bahagian perempuan dan digambar berjumlah 9; mata pesagi yang digambar berjumlah 8 menunjukkan bahagian laki-laki.

Rantai yang bermata 17 itu sambung menyambung tidak putus-putusnya, sesuai dengan manusia yang bersifat turun-temurun. Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne yang memuji-muji pakaian (sandang) dan makanan (pangan).

Pasal 5.

Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin : berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah kesatuan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG NEGARA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan peraturan tentang penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia yang selaras dengan kedudukannya; Mengingat Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951 tentang Lambar Negara (Lembaran Negara tahun 1951 No.911).

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 107 pada tanggal 30 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN
LAMBANG NEGARA

Pasal 1.

- (1) Lambang Negara digunakan pada gedung-gedung Negeri di muka sebelah luar dan/atau di dalam dan pada kapal-kapal Pemerintah yang digunakan untuk keperluan dinas.
- (2) Penggunaan Lambang Negara pada gedung-gedung Negeri tersebut di atas dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang

Negara pada kapal-kapal Pemerintah tersebut di atas dilakukan dibagian luar anjungan (brug), ditengah-tengah.

Pasal 2.

Penggunaan Lambang Negara dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada :

1. Rumah-rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat dengan ini;
2. Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 3.

- (1) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung diharuskan pada tiap-tiap:
 - a. Kantor Kepala Daerah
 - b. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Ruang sidang pengadilan.
 - d. Kantor Kepolisian Negara.
 - f. Kantor Imigrasi.
 - g. Kantor Bea dan Cukai.
 - h. Kantor Syahbandar.
- (2) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung dibolehkan pada kantor-kantor Negeri yang lain daripada yang tersebut diayat 1.

Pasal 4.

- (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951,

maka Lambang Negara yang dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 harus mempunyai ukuran yang pantas mengingat besar-kecilnya gedung, ruangan atau kapal-kapal itu dan sedapat-dapatnya dibuat dari bahan yang tahan lama.

- (2) Jika Lambang Negara diselenggarakan dalam lebih daripada satu warna maka harus diindahkan warna-warna dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Jika hanya dipergunakan satu warna maka warna itu harus layak dan pantas.

Pasal 5.

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, maka kepada Lambang Negara diberi tempat yang paling sedikit sama utamanya.

Pasal 6.

Lambang Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap nomor Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia serta tambahan-tambahannya, dihalaman pertama di atas ditengah-tengah.

Pasal 7.

- (1) Cap jabatan dengan lambang Negara di dalamnya hanya dibolehkan untuk cap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati ke atas dan Notaris.

- (2) Cap dinas dengan Lambang Negara di dalamnya dibolehkan untuk kantor-kantor pusat dari pejabat-pejabat tersebut dalam ayat 1.
- (3) Lambang Negara dapat digunakan pada surat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris.

Pasal 8.

Lambang Negara dapat digunakan pada

- a) Mata uang logam dan mata uang kertas;
- b) Kertas bermeterai, dalam meterainya;
- c) Surat ijazah Negara;
- d) Barang-barang Negara di rumah-rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri;
- e) Pakaian resmi yang dianggap perlu oleh Pemerintah.
- f) Buku-buku dan majalah-majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
- g) Buku pengumpulan Undang-undang yang diterbitkan oleh Pemerintah dan, dengan izin Pemerintah, juga buku pengumpulan Undang-undang yang diterbitkan oleh partikelir,
- h) Surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan izin Menteri yang bersangkutan,

Pasal 9.

Yang dimaksud dengan menggunakan Lambang Negara dalam pasal 6, 7 dan 8, ialah menempatkan gambarnya pada benda-benda tersebut dalam pasal-pasal tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951 atau dengan satu warna.

Pasal 10.

Lambang Negara dapat digunakan ditempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain yang pantas.

Pasal 11.

- (1) Lambang Negara dapat digunakan sebagai lencana oleh warga-negara Indonesia yang berada di luar negeri.
- (2) Jika Lambang Negara digunakan sebagai lencana, maka Lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri di atas.

Pasal 12.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Panji dan Bendera Jabatan, maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pada Lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

Pasal 13.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi partai atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Negara.

Pasal 14.

Penggunaan Lambang Negara disesuatu Negara asing oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia dilakukan menurut

peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan Lambang kebangsaan asing yang berlaku di negara itu.

Pasal 15.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 12 dan pasal 13 dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya limaratus rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1958
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri,

ttd.

DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 10 Juli 1958.

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUNAAN LAMBANG NEGARA.

PENJELASAN UMUM

Setelah ditetapkan Lambang Negara Republik Indonesia, maka siapa saja dapat menggunakannya, oleh karena belum ada Peraturan tentang penggunaan Lambang Negara. Acap kali Lambang Negara digunakan dan ditempatkan pada tempat yang tidak selaras dengan kedudukannya. Misalnya pada buku, Lambang Negara seharusnya ditempatkan di kulit muka atau di halaman muka di atas atau di tengah-tengah, tidak di bawah seperti sering terjadi, dan harus tegak dan lengkap, yaitu tidak miring dan tidak dilukiskan sebagian saja. Tidak jarang Lambang Negara digunakan sebagai perhiasan belaka atau sebagai reklame perdagangan. Untuk menjaga agar supaya penggunaan Lambang Negara tak merendahkan derajatnya, maka perlu diadakan Peraturan Pemerintah tentang penggunaan itu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Ada dua cara pemasangan Lambang Negara pada gedung Negeri:

- a) di muka sebelah luar gedung
- b) di dalam gedung.

Tidak ditentukan di tempat-tempat mana harus dipasang, karena sukar untuk menetapkan buat gedung-gedung Negeri. Maka hanya ditetapkan bahwa Lambang Negara digunakan pada tempat yang pantas (dalam arti yang sesuai dengan

derajat Lambang dan baik bagi pandangan mata) dan yang menarik perhatian, yaitu yang mudah tampak pada semua penjungjung gedung dan mereka yang lalu di muka gedung itu. Pada gedung-gedung Negeri mana dilakukan dua cara pemasangan tersebut, ditetapkan dalam pasal-pasal berikut.

Pemasangan pada kapal-kapal terbatas pada kapal-kapal Pemerintah yang diperlukan untuk keperluan dinas. Dengan demikian tidak termasuk kapal-kapal Pemerintah yang digunakan untuk maksud perusahaan.

Pasal 2.

Penggunaan Lambang Negara di muka sebelah luar gedung dianggap suatu keistimewaan. Maka dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam pasal ini. Rumah jabatan (*ambtswoning*) ialah rumah dinas (*dienstwoning*) yang khusus disediakan untuk penjabat tersebut.

Pasal 3.

Pada umumnya Lambang Negara dapat digunakan di dalam semua gedung Negeri. Penggunaan Lambang Negara diwajibkan khusus pada gedung-gedung tersebut dalam ayat 1 untuk memperlambangkan kewibawaan Negara.

Pasal 4.

- (1) Sangat sukar untuk menetapkan ukuran pokok bagi Lambang Negara yang akan dipasang pada macam-macam gedung atau ruangan. Maka hanya ditetapkan supaya ukuran itu pantas mengingat besar kecilnya gedung, ruangan atau kapal, asal diindahkan pertimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.

- (2) Yang dimaksud dengan "layak dan pantas" ialah misalnya sawo mateng, perunggu, kuning; yang harus dihindari ialah misalnya warna hijau, merah dan sebagainya.

Pasal 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

Oleh karena Lambang Negara itu merupakan tanda keresmian, maka sudah selayaknya ditempatkan pada parpor, Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Untuk menjaga derajat Lambang Negara, maka penggunaan Lambang Negara dalam cap jabatan atau cap dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Negara yang tersebut dalam pasal ini.

Dalam istilah Kepala Daerah termasuk Walikota, sehingga Walikota kota besar (setingkat dengan Bupati) dapat pula menggunakan cap jabatan dengan Lambang Negara di dalamnya.

Pasal 8.

- a) Sudah selayaknya dan telah terjadi dalam praktek;
- b) Yang dimaksud ialah lukisan Lambang Negara yang ditempatkan dalam materai pada kertas bermaterai;
- c) Sudah selayaknya;
- d) Yang dimaksud dengan barang-barang ialah perabot rumah tangga;
- e) Yang dimaksud dengan pakaian resmi ialah misalnya pakaian seragam, pakaian kebesaran, dan dengan izin Menteri yang bersangkutan juga pakaian mereka yang melawat keluar negeri;

- f) Cukup jelas.
- g) Yang dimaksud dengan izin di sini, ialah izin untuk menggunakan Lambang Negara.

Pasal 9.

Yang dimaksud dengan satu warna ialah misalnya warna emas, hitam dan sebagainya.

Pasal 10.

Yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah upacara-upacara, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 11.

Dalam praktek memang telah dilakukan untuk menunjukkan kewarganegaraannya.

Pasal 12.

- (1) Menurut Peraturan Pemerintah tentang Panji dan Bendera Jabatan, maka Lambang Negara dapat digunakan dalam bendera jabatan.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Yang dimaksud dengan "menggunakan" dalam ayat ini ialah menggunakan Lambang Negara berbentuk Lambang itu sendiri atau digambar, dicetak atau disulam pada barang lain, dan tiak boleh dipakai dengan cara lain daripada ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal di atas.

Pasal 13.

Pasal ini untuk menjaga agar khalayak ramai tidak salah-salah dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini

sebagai Lambang Negara. Istilah "pada pokoknya menyerupai Lambang Negara" berarti bahwa suatu lukisan pada khalayak ramai memberi kesan utama, bahwa lukisan tersebut seolah-olah Lambang Negara.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 71 DAN
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1636

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadisimbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A,
Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BENDERA,
BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

5. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.
6. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. kebhinnekatunggalikaan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

Pasal 3

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

...

BAB IV
LAMBANG NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Pasal 47

- (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
- (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45.

Pasal 48

- (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
- (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
 - a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
 - b. dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
 - c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
 - d. dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
 - e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Pasal 49

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas:

- a. warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
- b. warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
- c. warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
- d. warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
- e. warna alam untuk seluruh gambar lambang.

Pasal 50

Bentuk, warna, dan perbandingan ukuran Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Lambang Negara

Pasal 51

Lambang Negara wajib digunakan di:

- a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- b. luar gedung atau kantor;
- c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- e. uang logam dan uang kertas; atau
- f. materai.

Pasal 52

Lambang Negara dapat digunakan:

- a. sebagai cap atau kop surat jabatan;
- b. sebagai cap dinas untuk kantor;
- c. pada kertas bermaterai;
- d. pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- e. sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri;

- f. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi;
- g. dalam buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- h. dalam buku kumpulan undang-undang; dan/atau
- i. di rumah warga negara Indonesia.

Pasal 53

- (1) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada:
 - a. gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. gedung dan/atau kantor lembaga negara;
 - c. gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan
 - d. gedung dan/atau kantor lainnya.
- (2) Penggunaan Lambang Negara di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b pada:
 - a. istana Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. gedung atau kantor dan rumah jabatan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - d. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat.
- (3) Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan di luar gedung atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diletakkan pada tempat tertentu.
- (4) Penggunaan Lambang Negara pada lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 huruf c diletakkan di bagian tengah atas halaman pertama dokumen.

- (5) Penggunaan Lambang Negara pada paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d diletakkan di bagian tengah halaman dokumen.

Pasal 54

- (1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Mahkamah Agung dan badan peradilan;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. menteri dan pejabat setingkat menteri;
 - h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;
 - i. gubernur, bupati atau walikota;
 - j. notaris; dan
 - k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Lambang Negara sebagai lencana atau atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.
- (4) Lambang Negara yang digunakan dalam penyelenggaraan peristiwa resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dipasang pada gapura dan/atau bangunan lain yang pantas.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
- a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan

- b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
- (2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Pasal 56

- (1) Ukuran Lambang Negara disesuaikan dengan ukuran ruangan dan tempat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (2) Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibuat dari bahan yang kuat.

**Bagian Ketiga
Larangan**

Pasal 57

Setiap orang dilarang:

- a. mencoret, menulis, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Asvi Warman. 2010. *Menguak Misteri Sejarah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Adam, Asvi Warman., Turiman Faturrahman Nur, Hilarion Widyatmoko, Nanang R Hidayat. 2014. *Perjalanan 60 Tahun Lambang Negara, Bunga Rampai Pameran & Seminar Lambang Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sahabat Museum KAA & Museum KAA.
- Asdi, Endang Daruni. 1984. *Lambang Negara Republik Indonesia Garuda Pancasila*. Yogyakarta: PD Lukman.
- Dimiyati, Ansari., Nur Iskandar, Turiman Faturrahman Nur. 2013. *Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara "Elang Rajawali-Garuda Pancasila."* Pontianak: TOP Indonesia.
- Dewanto, Nugroho. 2017. *Seri Buku Saku Tempo: Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim*. Jakarta: Tempo.
- Djazh, Dahlan. 1989. *Seri Pendidikan Kepribadian Bangsa: Garuda Pancasila Lambang Negaraku*. Jakarta: Penerbit Bahtera Jaya.
- Djazh, Dahlan. 1991. *Seri Pendidikan Kepribadian Bangsa: Sejarah Penciptaan Lambang Garuda Pancasila*. Jakarta: Penerbit Bahtera Jaya.
- Ds, Sides Sudiyarto. 1979. *Seri Mengabdikan Tanah Air: Pancasila dalam Puisi*. Jakarta: Penerbit Aries Lima.

- Effendi, Oesman. "Tanda Lambang Negara" dalam *Majalah Indonesia* No. 4 Tahun II, April 1954.
- Hatta, M. 1979. *Bung Hatta Menjawab: Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Herkulana. 2018. *Peran Muhammad Yamin dalam Meraih Kemerdekaan Indonesia*. Skripsi.
- Hidayat, Nanang R. 2020. *Mencari Telur Garuda (Jilid Kedua)*. Yogyakarta: I:Boekoe & Rumah Garuda.
- Kementerian Penerangan RI. 1950. *Lembaran Sejarah*. Brosur.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2012. *Garuda Pancasila Lambang Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Lohanda, Mona (ed). 2017. *Indeks Beranotasi Karya Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Marpaung, Nur Mas Intan Berliana. 1995. *Invetaris Arsip Sekretariat Negara RI 1945-1949*. Jakarta: Arsip Nasional RI
- Notosoetardjo, H.A. 1965. *Dari Lahirnya Pantja-sila Sampai Tjamkan Pantja-Sila!*. Jakarta: Endang dan Pemuda.
- Nur, Turiman Faturrahman. 1996. *Historisitas Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pengaturan Lambang Negara Republik Indonesia Dalam Peraturan Perundang-undangan)*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Nur, Turiman Faturrahman. 2014. Menelusuri "Jejak" Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (44), 1.
- Nur, Turiman Faturrahman. 2014. Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (44), 3.

- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila. 2017. *Kisah Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Permana, Ghea Dwi Indra. 2015. *Board Game Ketokohan Garuda Dalam Kitab Adiparwa*. Skripsi.
- Pringgodigdo, AG. 1970. *Sekitar Pancasila*. Surabaya: Balai Penelitian IKIP.
- Drs. Sudiyo, dkk. 1997. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan Kedaulatan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Sularto, Bambang., Kusbini dkk. 1982. *Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutja, Akmal. 1986. *Sekitar Garuda Pancasila*. Bandung: Angkasa
- Tim Buku Tempo. 2016. *Seri Tempo: Natsir, Politik Santun di Antara Dua Rezim*. Jakarta: Gramedia
- Virdianti, Puput dan Septina Alrianingrum. 2014. Proses Pene-tapan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara In-donesia Tahun 1949-1951. *Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah* (2), 2.
- Wiryopranoto, Suhartono., Tim Museum Kebangkitan Nasio-nal, dkk. 2017. *Perjuangan Ki Hajar Dewantara: Dari Politik ke Pendidikan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Yamin, Mohammad. 1958. *6000 Tahun Sang Merah Putih*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Yuliantri, Rhoma Dwi Aria, dkk. 2015. *Tokoh Pemikir Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebuda-yaan RI.
- ____. "Hikayat Dullah dan Bibi Fatima" dalam *Gatra*, 24 Juni 1995.
- ____. 1989. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka

INTERNET

- Akhir Matua Harahap. 2015. *Sejarah Marah Halim Cup (15): Parada Harahap, Pers, dan Sepakbola, Persija Barat vs Persija Timor, Pewarta Deli vs Sinar Deli, Benih Merdeka vs Sinar Merdeka*. [Online] Tersedia di: <http://akhirmh.blogspot.com/2015/06/sejarah-marah-halim-cup-15-pers-dan.html>
- Alan Malingi. 2016. *Lambang Kesultanan Bima*. [Online] Tersedia di: <https://www.sejarahbima.com/2016/05/lambang-kesultanan-bima.html>
- BeritaSatu. 2012. *Lambang RI Mirip Kerajaan Samudera Pasai*. [Online] Tersedia di: <https://www.beritasatu.com/home/76210/lambang-ri-mirip-kerajaan-samudera-pasai>
- Fadrik Aziz Firdausi. 2019. *Parada Harahap: Sejarah Hidup si Raja Media Pembela Para Kuli*. [Online] Tersedia di: <https://tirto.id/parada-harahap-sejarah-hidup-si-raja-media-pembela-para-kuli-dyEt>
- IndonesiaKuno. 2022. *Poerbatjaraka, Sang Ahli Bahasa Jawa Kuno*. [Online] Tersedia di: <https://www.indonesiakuno.net/2022/02/poerbatjaraka-sang-ahli-bahasa-jawa-kuno.html>
- Kemdikbud. 2019. *Aktivis Persatuan Pemuda RM. Joesoepadi Danoehadiningrat (9). "Indonesia Muda"*. [Online] Tersedia di: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/msp/aktivis-persatuan-pemuda-rm-joesoepadi-danoehadiningrat-9/>
- Kompas.com. 2022. *Sejarah dan Makna Lambang Keraton Yogyakarta yang Dibuat Tahun 1921*. [Online] Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/20/121500065/sejarah-dan-makna-lambang-keraton-yogyakarta-yang-dibuat-tahun-1921?page=all>

- KonstituanteNet. *Basuki Resobowo*. [Online] Tersedia di: http://www.konstituante.net/id/profile/REPUBLIK_PROKLAMASI_basuki_resobowo
- Mister Pangalayo. 2017. *Elang Laut: Si Penguasa Langit Pesisir Lambang Kesultanan Sambas*. [Online] Tersedia di: <https://www.misterpangalayo.com/2017/05/elang-laut-lambang-kesultanan-sambas.html>
- Petronela Putri. 2017. *Keraton Ternate, Kerajaan Islam Sejak Abad 15*. [Online] Tersedia di: <https://bobo.grid.id/read/08674329/keraton-ternate-kerajaan-islam-sejak-abad-15?page=all>
- Pemerintah Kota Kediri. 2014. *Lambang Daerah Kota Kediri*. [Online] Tersedia di: <https://kedirikota.go.id/page/profil/3>
- Rizki Gunawan. 2015. *Kisah Cinta Patih Majapahit di Balik Lambang Burung Garuda*. [Online] Tersedia di: <https://www.liputan6.com/news/read/2192668/kisah-cinta-patih-majapahit-di-balik-lambang-burung-garuda>
- Tito Ramadhani. 2018. *Terungkap, Ini Ternyata Simbol Istana Alwatzikhoebillah Sambas*. [Online] Tersedia di: <https://pontianak.tribunnews.com/2018/01/28/terungkap-ini-ternyata-simbol-istana-alwatzikhoebillah-sambas?page=3>
- Wahyu Setyo Widodo. 2017. *Makna di Balik Lambang Kesultanan Ternate yang Mendunia*. [Online] Tersedia di: <https://travel.detik.com/domestic-destination/d-3628232/makna-di-balik-lambang-kesultanan-ternate-yang-mendunia>
- Wikipedia. *Basuki Resobowo*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Resobowo
- Wikipedia. *Dullah*. [Online] Tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Dullah>

Wikipedia. *Indonesia Moeda*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Moeda

Wikipedia. *Ki Hadjar Dewantara*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara

Wikipedia. *Melkias Agustinus Pellaupessy*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Melkias_Agustinus_Pellaupessy

Wikipedia. *Mohammad Natsir*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Natsir

Wikipedia. *Mohammad Yamin*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yamin

Wikipedia. *Museum Dara Juanti*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Dara_Juanti

Wikipedia. *Parada Harahap*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Parada_Harahap

Wikipedia. *Poerbatjaraka*. [Online] Tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Poerbatjaraka>

Wikipedia. *Syarif Hamid II dari Pontianak*. [Online] Tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Syarif_Hamid_II_dari_Pontianak

Worldcat. *Ruhl, Dirk Jr.* [Online] Tersedia di: <http://www.worldcat.org/identities/viaf-13315160/>

Yudi Supriyanto. 2021. *Galnas Segera Gelar Pameran Basuki Resobowo*. [Online] Tersedia di: <https://hypeabis.id/read/6181/galnas-segera-gelar-pameran-basuki-resobowo>

@rsipIVAA. *Basuki Resobowo*. [Online] Tersedia di: <http://archive.ivaa-online.org/pelakuseni/basuki-resobowo-1>

PROFIL PERISET

Nanang R. Hidayat

Lahir 10 Mei 1966 di Mojokerto, ia adalah seniman sekaligus akademisi dari ISI Yogyakarta dan bekerja di Fakultas Seni Media Rekam di kampus yang sama. Dikenal dengan nama Nanang Garuda, sejak 17 Agustus 2011 ia menginisiasi berdirinya Rumah Garuda di Bantul, Yogyakarta, untuk menjadi Pusat Studi Lahirnya Lambang Negara Garuda Pancasila.

Dalam perjalanannya untuk mengenalkan dan membumikan kembali Garuda Pancasila, ia menciptakan Wayang Pulau sebagai media penyampaian kisah-kisah ke-Indonesiaan. Ia juga membuat Wayang Purba dan kini sedang menekuni pembuatan alat musik eksperimental, di antaranya alat musik berbentuk kapal yang diberi nama Bahterasvara.

Banyak karya film yang sudah ditelurkannya, terutama yang terkait dengan lambang negara di antaranya, *Mencari Telur Garuda* (dokumenter), *Supramawira Gardala*, dan *Jas Merah Sang Garuda* (dokumenter). Bukunya bersampul telur ceplok berjudul *Mencari Telur Garuda* (2020) telah diterbitkan ulang dengan banyak tambahan informasi baru di dalamnya. Ia dapat dikontak melalui instagram @nananggaruda.

Pramukti Adhi Bhakti

Lahir 27 Agustus 1990, menyelesaikan semua pendidikan akademisnya, hingga menjadi sarjana Psikologi, di Bandung. Mulai berkecimpung di bidang sejarah sejak bergabung dengan komunitas Asian-African Reading Club (AARC), menjadi pe-

mandu wisata sejarah bersama Cemara Wisata, dan menjadi desainer grafis di beberapa museum di kota Bandung dari tahun 2014. Sejak saat itu, ia aktif mengawal pertunjukan Monolog Inggit Garnasih ke berbagai kota bersama komunitas Api Bandung, mendirikan Rumah Garuda di berbagai kota bersama Nanang R. Hidayat, dan menulis beberapa buku.

Karya tulis yang pernah ia terbitkan di antaranya, terjemah buku *The Color Curtain, Reportase Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung* (2020), antologi *Membaca Mohammad Yamin dan Kisah-Kisah di Balik Tadarusan Buku AARC* (2020), dan memoar *Tadarus The Bandung Connection* (2021). Ia mendapat sertifikasi sebagai penulis sejarah lokal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2021 karena tulisannya yang berjudul *Rumah Makan Madrawi: Peran dan Kiprahnya di Bandung Tahun 1890-1987* (2020). Tulisan-tulisannya yang lain dapat ditemukan di blog pramredesign.wordpress.com dan instagram [@pramredesign](https://www.instagram.com/pramredesign).

Buku ini secara komprehensif menjelaskan hal-hwal terciptanya lambang negara Indonesia. Tidak benar lambang negara dibuat oleh orang perorangan, namun ini hasil karya bersama. Siapa saja yang terlibat atau berjasa dalam penciptaan lambang negara? Kapan lambang negara ini dibuat? Prosesnya dimulai sejak Indonesia belum merdeka, diusulkan Parada Harahap dalam sidang BPUPK tanggal 13 Juli 1945 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah no. 66/1951 pada tanggal 17 Oktober 1951.

Prof. Dr. Asvi Warman Adam

